



LAPORAN PENDAHULUAN

KAJIAN PENGUATAN INDEKS HARMONI DAN TOLERANSI SOSIAL DI KABUPATEN LAHAT



PEMERINTAH
KABUPATEN LAHAT



UNIVERSITAS
AIRLANGGA

Kata Pengantar

Puji Syukur senantiasa terpajatkan kehadiran Allah SWT mengiringi pengajuan laporan kajian penguatan indeks harmoni dan toleransi sosial di Kabupaten Lahat tahun 2023. Laporan ini menjadi pengantar yang memberikan gambaran secara holistik, urgensi, serta mekanisme metodologis yang mendasari kegiatan kajian ini. Relasi empiris dengan metodologis terus digabungkan untuk menghasilkan temuan dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kegiatan kajian penguatan indeks harmoni dan toleransi sosial di Kabupaten Lahat tahun 2023 mengukur aspek untuk layanan bidang toleransi dan kerukunan di Lahat yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat. Dalam kegiatan kajian ini Unair sebagai mitra dari balitbang Pemkab Lahat terus berkoordinasi dengan stake holders maupun kelompok masyarakat untuk menghasilkan kajian yang kredibel.

laporan ini merupakan gambaran awal yang akan berkembang seiring dengan aktivitas kegiatan ini, saran dan masukan terus kami lakukan demi kebaikan kegiatan survey penerimaan publik untuk layanan bidang toleransi dan kerukunan di Kabupaten Lahat Tahun 2023.

Surabaya, 2023

Unair

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
2.1. Latar Belakang	1
2.2. Maksud, Tujuan dan Manfaat	4
Bab II Kerangka Hukum dan Teori.....	6
2.1. Dasar Hukum.....	6
2.2. Toleransi Kehidupan Beragama.....	7
2.3. Pendidikan Beragama	11
2.4. Kerukunan Antar Umat Beragama	15
Bab III Metode	24
3.1. Metodologi Penelitian	24
3.2. Populasi, Sampel dan Margin of Error	24
BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN LAHAT	40
2.5. 4.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	40
4.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	40
2.6. 4.2 Demografi.....	61
2.7. 4.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	62
4.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	80
2.8. 4.4 ASPEK PELAYANAN UMUM	82
2.9. 4.5 FOKUS URUSAN DASAR	89
2.10. 4.6 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN.....	104
BAB V HASIL KEGIATAN.....	112
5.1 Sebaran Responden.....	112
5.1.1 Sebaran Responden Menurut Kecamatan	112
5.1.2 Sebaran Responden Menurut Kelompok Umur.....	117
5.1.3 Sebaran Responden Menurut Jenis Kelamin	117
5.1.4 Sebaran Responden Menurut Suku	121
5.1.5 Sebaran Responden Menurut Pendidikan Terakhir	124
5.1.6 Sebaran Responden Menurut Agama.....	128
5.1.7 Sebaran Responden Menurut Pekerjaan	130
5.1.8 Sebaran Responden Menurut Penghasilan Perbulan	135
5.2 Indeks Toleransi Antarumat Beragama.....	136
5.2.1 Indeks Persepsi Responden tentang Toleransi Antarumat Beragama	136

BAB VI PENUTUP	148
Referensi	149

Bab I Pendahuluan

2.1. Latar Belakang

Studi tentang toleransi telah banyak dilakukan, salahsatunya yang lazim digunakan sebagai model penelitian kuantitatif tentang toleransi adalah yang dilakukan oleh Bogardus pada tahun 1925. Studi ini kemudian direplikasi pada tahun 1946, 1956, 1966, dan 2005. Fokus kajiannya adalah pada pengukuran sejauh mana penerimaan seseorang terhadap orang lain yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda dengan dirinya. Konsep Bogardus ini kemudian populer dengan sebutan Social Distance Scale yang kemudian banyak digunakan sebagai alat ukur toleransi sosial. Bogardus mendefinisikan jarak sosial (social distance) sebagai function of affective distance between the members of two groups: [i]n social distance studies the center of attention is on the feeling reactions of persons toward other persons and toward groups of people (Bogardus, 1947). Dalam konsep ini, jarak sosial pada dasarnya diukur dari seberapa besar simpati yang dirasakan individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain yang berbeda dengan dirinya. Secara rinci, pengukuran tersebut dioperasionalkan ke dalam skala yang mencakup rentang skor dari 1,00 hingga 7,00, di mana skor 1,00 berarti tidak ada jarak sosial. Skala yang dipakai Bogardus sebagai berikut: As close relatives by marriage (i.e., as the legal spouse of a close relative) (score 1.00) As my close personal friends (2.00) As neighbors on the same street (3.00) As co-workers in the same occupation (4.00) As citizens in my country (5.00) As non-citizen visitors in my country (6.00) Would exclude from entry into my country (7.00) (Bogardus, 1925).

Konsep Bogardus tidak secara khusus membahas tentang toleransi sosial ataupun toleransi antarumat beragama. Terdapat beberapa kelemahan ketika hal tersebut dipakai untuk melihat keintiman atau kedekatan hubungan sosial antara pemeluk yang berbeda agama di suatu negara. Tingkatan hubungan yang dikonsepsikan Bogardus tidak selamanya bisa dilihat berjenjang seperti itu, mengingat dua variabel jenjang yang ada, misalnya, bisa saja memperlihatkan

keintiman atau jarak sosial yang sama dalam praktek kehidupan masyarakat. Selain itu, terdapat juga variabel antara (*intervening variables*) yang ikut berpengaruh terhadap pilihan hubungan yang dilakukan seseorang. Definisi toleransi beragama (*religious tolerance*) tidak mudah ditemukan secara eksplisit. Sebagian besar studi tentang toleransi beragama lebih banyak mendeskripsikan sikap yang disebut toleran.

Powell dan Clarke (2002) menyatakan bahwa an attitude of tolerance is only possible when some action or practice is objectionable to us, but we have overriding reasons to allow that action or practice to take place. Dalam pernyataan tersebut, tersirat bahwa toleransi adalah pengecualian (*exception*) atas hal-hal yang sebenarnya tidak disukai, tapi tetap dibiarkan dilakukan. Definisi lain dikemukakan oleh Andrew Cohen (2004: 69), yang menyatakan bahwa an act of toleration is an agent's intentional and principled refraining from interfering with an opposed other (or their behaviour, etc.) in situations of diversity, where the agent believes she has the power to interfere. Dalam definisi tersebut, toleransi diartikan sebagai sikap untuk tidak mencampuri atau mengintervensi urusan atau perilaku pihak lainnya

Toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu *tolerare* yang artinya menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Sikap toleran tidak berarti membenarkan pandangan yang dibiarkan itu, tetapi mengakui kebebasan serta hak-hak asasi para penganutnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, toleransi dimaknai sebagai bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.

Indonesia sebagai bangsa yang besar dan terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras dan golongan, tentunya sangat perlu memiliki sikap toleran. Dalam hubungannya dengan agama, toleransi menjadi sesuatu yang sangat penting. Dalam pandangan saya, toleransi beragama dapat dibagi dalam enam indikator. Pertama, saling menerima keberadaan umat beragama lain. Dua, mengerti

kebutuhan beragama lain. Ketiga, percaya dan tidak saling mencurigai antar sesama umat. Empat, ada kemauan untuk tumbuh dan berkembang bersama. Kelima, rela berkorban untuk kebaikan bersama. Terakhir yaitu keenam, mengedepankan nilai-nilai ajaran universal agama (kejujuran, kedamaian, menghormati, taat pada pimpinan/ pemerintah).

Masyarakat Lahat yang masuk dalam kategori toleransi aktif (active tolerance). Kategori ini, harus diakui merupakan kategori terbaik dan paling ideal, karena toleransi telah menjadi nalar dan tingkah laku setiap individu. Masing-masing kelompok memahami dengan sangat baik, bahwa toleransi merupakan kebajikan dan hak setiap individu. Nalar mayoritas-minoritas dikubur hidup-hidup dan digantikan dengan paradigma kesetaraan. Di samping itu, toleransi sebagai kebajikan juga diperkuat oleh kebijakan publik yang secara nyata mendorong dan membumikan toleransi. Negara-negara yang menerapkan multikultural sebagai kebijakan publik, pada umumnya merupakan contoh paling baik. Dalam konteks Lahat, tentu saja masalahnya tidak kalah rumit. Hal ini karena potensi untuk menjadi zero-tolerance dan active tolerance sama-sama ada. Sejauh ini, negara kita bisa dikatakan sebagai relative tolerance, karena mempunyai kebijakan publik yang mewadahi kerukunan dan toleransi. Salah satunya dengan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Pemkab Lahat telah melakukan berbagai upaya untuk menumbuhkembangkan kehidupan masyarakat yang mendukung toleransi dan kerukunan. Berbagai inovasi tersebut, hendaknya secara berkelanjutan diukur efektivitasnya. Banyak instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah, namun sejalan dengan upaya pemerintah pusat yang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, maka pemerintah pusat maupun daerah dapat mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Amanat peraturan tersebut menyebutkan Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Untuk itu berbagai terobosan dan perbaikan telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik baik

itu instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dihasilkan dari perbaikan tersebut melalui pelaksanaan kajian penguatan indeks harmoni dan toleransi sosial di Kabupaten Lahat tahun 2023.

Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri dari regulasi pemerintah kota, tindakan pemerintah, regulasi sosial (praktik antar warga) dan demografi agama wilayah kota tersebut. Sedangkan parameter kerukunan mencakup: toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Untuk mendapatkan simpulan tentang skor di Lahat, harus diukur beberapa indeks, yakni: Indeks Persepsi, Indeks Sikap, Indeks Kerja Sama, Indeks Sikap Pemerintah, dan Indeks Harapan terhadap Pemerintah.

Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan Publik Pemerintah Kabupaten Lahat akan memfokuskan pada bidang-bidang yang paling banyak bersentuhan dengan masyarakat. Kegiatan yang bertajuk kajian penguatan indeks harmoni dan toleransi sosial di Kabupaten Lahat tahun 2023 dilaksanakan dengan kerjasama antara Universitas Airlangga Surabaya (UNAIR) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lahat.

2.2.Maksud, Tujuan dan Manfaat

1. Maksud

Adanya kegiatan kajian penguatan indeks harmoni dan toleransi sosial di Kabupaten Lahat tahun 2023.

2. Tujuan

1. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publikbidang toleransi dan kerukunan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan public bidang toleransi dan kerukunan.

3. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public bidang toleransi dan kerukunan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Lahat.
4. Mengkaji keberterimaan layananan bidang toleransi dan kerukunan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat dari hasil pengukuran kuantitatif.
5. Merumuskan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan di lingkup Pemerintah Kabupaten Lahat tentang program yang optimal serta dibutuhkan masyarakat maupun program pemerintah daerah yang masih perlu kajian lebih lanjut.

3. Manfaat

Dengan dilakukan SKM diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari unit pemberi layanan publikbidang toleransi dan kerukunandi Lahat;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan publik bidang toleransi dan kerukunan yang telah dilaksanakan oleh secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil kajian penguatan indeks harmoni dan toleransi sosial di Kabupaten Lahat tahun 2023;

Bab II Kerangka Hukum dan Teori

2.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
6. Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

2.2.Toleransi Kehidupan Beragama

Keragaman beragama dalam segala segi kehidupan merupakan realitas yang tidak mungkin untuk dihindari. Keragaman tersebut menyimpan potensi yang dapat memperkaya warna hidup. Setiap pihak, baik individu maupun komunitas dapat menunjukkan eksistensi dirinya dalam interaksi sosial yang harmonis. Namun, dalam keragaman tersimpan juga potensi destruktif yang meresahkan yang dapat menghilangkan kekayaan khazanah kehidupan yang sarat keragaman. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan agar potensi destruktif ini tidak meledak dan berkelanjutan. Salah satu cara yang banyak dilakukan adalah memperkokoh nilai toleransi beragama. Toleransi menurut KBBI (Alwi, et al., 2002:1478) adalah sifat atau sikap toleran. Sikap toleran yang dimaksud adalah sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dsb.) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Toleransi beragama dapat diartikan sebagai sikap menenggang terhadap ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia dan lingkungannya.

Pada masyarakat yang multiagama, Harold Howard (Saefullah dalam Suryana, 2011: 133) mengatakan bahwa ada tiga prinsip umum dalam merespon keanekaragaman agama: pertama, logika bersama, Yang Satu yang berwujud banyak. Kedua, agama sebagai alat, karenanya wahyu dan doktrin dari agama- agama adalah jalan atau dalam tradisi Islam disebut syariat untuk menuju Yang Satu. Ketiga, pengenalan kriteria yang mengabsahkan, maksudnya mengenakan kriteria sendiri pada agama-agama lain. Toleransi kehidupan beragama di masyarakat Indonesia perlu ditingkatkan mengingat ada lima agama yang diakui resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, 6 Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Budha. Suryana (2011: 133) menyatakan bahwa kerukunan beragama tidak berarti merelatifkan agama-agama yang ada dengan melebur kepada satu totalitas (sinkretisme agama) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai unsur dari agama totalitas tersebut. Urgensi dari kerukunan adalah mewujudkan kesatuan pandangan dan sikap guna melahirkan kesatuan perbuatan dan tindakan serta tanggung jawab bersama sehingga tidak ada pihak yang melepaskan diri dari tanggung jawab atau menyalahkan pihak lain. Kerukunan beragama berkaitan dengan toleransi, yakni istilah dalam konteks sosial, budaya, dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya toleransi beragama, yakni penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Dalam pengertian yang luas toleransi lebih terarah pada pemberian tempat yang luas bagi keberagaman dan perbedaan yang ada pada individu atau kelompok-kelompok lain. Oleh sebab itu, perlu ditekankan bahwa tidak benar bilamana toleransi dimaknai sebagai pengembirian hak-hak individu atau kelompok tertentu untuk disesuaikan dengan kondisi atau keadaan orang atau kelompok lain, atau sebaliknya mengorbankan hak-hak orang lain untuk dialihkan sesuai dengan keadaan atau kondisi kelompok tertentu. Toleransi justru sangat menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing

individu atau kelompok tersebut, namun di dalamnya diikat dan disatukan dalam kerangka kebersamaan untuk kepentingan yang sama. Toleransi adalah penghormatan, penerimaan dan penghargaan tentang keragaman yang kaya akan kebudayaan dunia kita, bentuk ekspresi kita dan tata cara sebagai manusia. Hal itu dipelihara oleh pengetahuan, keterbukaan, komunikasi, dan kebebasan pemikiran, kata hati dan kepercayaan. Toleransi adalah harmoni dalam perbedaan (UNESCO APNIEVE, dalam Endang, 2013: 92)

Toleransi terhadap keragaman mengandung pengertian bahwa setiap orang harus mampu melihat perbedaan pada diri orang lain atau kelompok lain sebagai sesuatu yang tidak perlu dipertentangkan. Sesuatu yang berbeda pada orang lain hendaknya dipandang sebagai bagian yang dapat menjadi kontribusi bagi 7 kekayaan budaya sehingga perbedaan-perbedaan yang ada akan memiliki nilai manfaat apabila digali dan dipahami dengan lebih arif. Imron (2000: 95) mengatakan bahwa diperlukan keteladanan para pemimpin agama (ulama, pastur, pendeta, dan lain sebagainya) dan pemimpin organisasi keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat baik dalam berbicara, bersikap, maupun berperilaku. Para pemimpin ini perlu menunjukkan sikap dan tindakan yang bersahabat dengan individu maupun kelompok yang menganut agama lain, atau agama yang sama tetapi berbeda faham. Suasana sejuk yang jauh dari konflik perlu diusahakan oleh para pemimpin ini. Bukan sebaliknya menjadi provokator dalam menghidupkan fanatisme buta pada agama sehingga menganggap kelompok beragama lain sebagai musuhnya. Selain itu, Imron (2000: 95) menambahkan perlunya mengefektifkan dan mengintensifkan forum komunikasi antar-pemimpin umat beragama secara terprogram dan kontinyu. Dengan forum komunikasi itu, para pemimpin agama dapat duduk semeja menjalin hubungan akrab di antara mereka sehingga tercipta suasana psikologis dan politis yang kondusif.

2.1.2 Tindakan Intoleransi dalam Kehidupan Beragam

Tindakan intoleransi dalam kehidupan beragama sering menimbulkan teror di masyarakat. Terorisme secara klasik diartikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan untuk menciptakan rasa takut dalam masyarakat (Hakim, 2004). Dengan beralih pada agama seseorang atau sekelompok orang melakukan kekerasan terhadap orang lain sehingga orang lain atau kelompok merasa takut atau terancam hidupnya. Tindakan intoleransi sering mengarah pada radikalisme. Alwi, et al. (2002: 919) mengartikan radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Paham ini menganggap apa yang diyakini sebagai suatu kebenaran yang harus disebarluaskan kepada masyarakat agar terjadi perubahan dalam masyarakat sesuai dengan keyakinan yang dianut. Cara yang dilakukan dengan memaksakan kehendak kepada orang lain atau menimbulkan kekerasan dan teror menimbulkan konflik sosial.

Pembahasan radikalisme yang sering menimbulkan kerusuhan dan konflik sosial sering dikaitkan dengan agama. Imron (2000: 86) menyebutkan minimal ada dua alasan mengapa dimensi agama perlu ditekankan dalam pembahasan mengenai kerusuhan ataupun konflik sosial. Pertama, adanya indikasi bahwa modernisasi sosial-ekonomi di berbagai tempat yang berpenduduk muslim, justru mendorong peningkatan religiusitas, bukan sekularisme. Walaupun peningkatan religiusitas juga terjadi di kalangan pemeluk agama lain, yang terjadi pada umat Islam sangat mencolok. Persoalannya adalah bahwa proses itu ternyata memuat potensi yang dapat mengganggu keselarasan dalam hubungan antarumat beragama. Dalam masyarakat seperti itu, militansi cenderung meningkat, fundamentalisme berkembang, toleransi antar pemeluk agama menurun. Kedua, adanya dugaan bahwa proses yang sama menghasilkan pengenduran hubungan antara sebagian pemeluk agama dengan lembaga-lembaga keagamaan yang melayaninya.

Tindakan radikalisme sering juga terjadi pada umat Islam. Arif (2010: 113) menyatakan bahwa radikalisme Islam sering muncul di “Islam

Kota” yang tidak berada pada rengkuhan budaya Islam. Dia menyatakan bahwa pesantren adalah wujud “Islam desa” yang tidak terjadi radikalisme karena Islam telah lama tumbuh dalam struktur budaya di pesantren. Berbeda dengan itu, “Islam kota” sering terseret pada globalisasi Islam karena budaya Islam kurang merengkuh dengan baik. Sebagian besar aktivis Islam tidak mengenyam pendidikan kultural Islam seperti pesantren. Hal ini menyebabkan pemahaman para aktivis terhadap agama sangat dangkal dan tidak substansial. Aktivis yang semacam inilah yang sering bertindak secara radikal karena mudah tersulut oleh provokasi dari lingkungannya.

2.3. Pendidikan Beragama

Pendidikan adalah proses pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran, karakter, dan seterusnya, khususnya melalui persekolahan formal (Webster’s New Word Dictionary dalam Sagala, 2007: 1). Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa (pendidik) kepada orang yang belum dewasa (peserta didik) untuk memperoleh kedewasaan, baik kedewasaan jasmani, rohani, maupun sosial, baik faktor kognitif, afektif, maupun 9 psikomotor (Samino, 2013: 37).

Pendidikan selalu menjanjikan perubahan ke arah yang lebih baik bagi peserta didiknya. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomer 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menyatakan bahwa (1) Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama. (2) Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Berlandaskan peraturan pemerintah ini, maka pendidikan agama merupakan pendidikan dasar bagi

setiap manusia. Pendidikan agama tidak hanya diajarkan di pendidikan formal, namun jauh lebih awal telah diajarkan di pendidikan-pendidikan keluarga. Keluarga menjadi wahana pendidikan pertama yang mengenalkan agama kepada anak. Pendidikan agama yang diajarkan di keluarga bisa diterapkan dalam bentuk teori dan praktik. Pendidikan beragama yang dilaksanakan di pendidikan formal lebih bercorak pendidikan multikultural. Secara etimologi istilah pendidikan multikultural terdiri dari dua term, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan berarti proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan melalui pengajaran, pelatihan, proses dan cara mendidik (Umar, 2010: 28).

Multikultural diartikan sebagai keragaman kebudayaan, aneka kesopanan (Masngud, 2010: 19). Secara terminologis, pendidikan multikultural berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku dan aliran (agama) (Masngud, 2010: 21). Pengertian seperti ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam pendidikan karena pendidikan dipahami sebagai proses tanpa akhir atau proses sepanjang hayat. Dengan demikian, pendidikan multikultural menghendaki penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat manusia. 10 Listia et al. (2007) pendidikan keagamaan kita belum memberikan kondisi mempersatukan bangsa dalam corak multikulturalisme bangsa untuk menyikapi ragam Agama di Indonesia, melainkan justru memperuncing perbedaan antar Agama. Kondisi ini justru sering memicu konflik antar Agama sehingga konflik masih dirasa menjadi fenomena sosial di masyarakat. Pendidikan beragama perlu dirancang secara sadar untuk menghilangkan radikalisme.

Arif (2010:114) menyatakan untuk menghilangkan radikalisme dalam umat Islam perlu pendidikan kultural Islam. Menurutnya, perlu dilakukan 3 langkah sebagai berikut. (1) Dibutuhkan perubahan paradigma pada ranah pengajaran, dari pendidikan Islam yang normatif, ke penyadaran atas pembumian normativitas tersebut ke relung budaya. (2)

Dibutuhkan pengenalan mendalam tentang tradisi keislaman di nusantara yang amat kaya. (3) Dibutuhkan praksis kepesantrenan di pendidikan Islam, artinya, pendidikan agama tidak bisa terhenti pada ruang kelas, tetapi harus mempraksis pada ranah perilaku pendidikan. Pendidikan beragama mestinya terintegrasi dalam dalam semua mata pelajaran di sekolah sehingga ilmu yang dipelajari selalu meningkatkan sikap religius siswa. Religius merupakan salah satu nilai karakter bangsa dari 18 karakter yang menjadi prioritas untuk dikembangkan di sekolah (Puskur Balitbang Kemendikbud, 2010: 9).

Menurut pedoman ini, nilai religius dideskripsikan sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Sikap dan perilaku ini tidak hanya didapat dalam mata pelajaran agama, namun ada di semua mata pelajaran. Guru akan selalu mengaitkan apa yang dipelajari siswa untuk meningkatkan nilai-nilai religius tersebut. Arif (2010: 116) sependapat dengan program itu dengan menyatakan bahwa tidak mesti sekolah dan kampus menjadi pesantren, namun yang dibutuhkan adalah suatu rekayasa atau pengaturan sosial dalam sistem dan lembaga pendidikan yang membuat civitas akademika mampu merasakan nilai keagamaan dalam kehidupan di lingkungan pendidikan. Ini artinya, pendidikan beragama tidak hanya mengajarkan ilmunya, tetapi pada pembiasaan sikap dan perilaku.

Perspektif Sosiologi

Perspektif Sosiologi Agama Secara etimologis kata sosiologi berasal dari bahasa latin :socius dan logos. Socius artinya masyarakat dan logos artinya ilmu, jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antar aneka gejala-gejala sosial, misalnya antara gejala ekonomi dan agama, antara keluarga dan moral, antara hukum dan ekonomi, gerakan masyarakat dan hubungan sosial lainnya (Pitren

Sorokin 2006:20). Sedangkan Soejono Soekanto (dalam Jabal Tharik Ibrohim) mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur-struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk didalamnya perubahan sosial (2003:2). Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan yakni hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, baik formil maupun materil. Dalam kamus sosiologi, pengertian agama ada tiga macam yaitu : pertama, kepercayaan pada hal-hal yang spiritual. Kedua,perangkat kepercayaan dan praktek-praktek spiritual yang dianggap sebagai tujuan tersendiri.

Ketiga, ideologi yang bersifat supranatural.Agama dalam pengertian teologis diartikan sebagai ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya. Dadang Kahmad (2006:13) dalam Sosiologi agama menuturkan bahwa berdasarkan sudut pandang kebahasaan-bahasa Indonesia pada umumnya- agama dianggap kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tidak kacau agama diambil dari dua akar suku kata yaitu a yang berarti tidak kacau yang berarti kacau. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa agama adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Menurut Hendro Puspito (dalam Dadang Kahmad 2006:129) bahwa agama adalah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berproses pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang dipercayainya dan didayagunakan untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan masyarakat luas umumnya.

Sedangkan Narwoko (2006:248) berpendapat, agama secara mendasar dapat diartikan sebagai perangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib - khususnya dengan Tuhan, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa agama adalah suatu hal yang dijadikan sandaran penganutnya ketika terjadi hal-hal yang berada di luar

jangkauan dan kemampuannya karena sifat yang supranatural sehingga diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang non-empiris.

Agama merupakan pedoman bagi manusia untuk bertindak sehingga manusia akan melakukan penafsiran tindakan berdasarkan kerangka referensi ajaran agama yang diyakini benar. Dalam masyarakat yang majemuk seringkali agama dijadikan pedoman untuk mengatur segala hal yang terkait dengan kehidupan lainnya, dan kemudian agama seringkali menjadi identitas untuk membedakan antara satu golongan dengan golongan yang lainnya. Agama bagi orang yang memeluknya secara benar akan mempunyai fungsi memperdalam perasaan, memperkuat keyakinan dan keteguhan sikap, bukan hanya hubungan horizontal di dunia, tetapi juga hubungan vertical dunia akhirat. Keyakinan agama memberikan kekuatan luar biasa bagi orang yang patuh ketika harus menghadapi pilihan yang sulit. Dalam perspektif ini, agama dapat mewarnai cita-cita menjadi lebih halus dan indah, dapat mendorongnya pada cita-cita yang setinggi nilainya. Thomas F.O¹ Dea menuliskan Enam fungsi agama, yaitu :pertama, sebagai pendukung, pelipurlara. Kedua, sebagai sarana hubungan transcendental melalui pemujaan dan sarana ibtidah. Ketiga, sebagai penguat norma-norma yang telah ada. Keempat, pengeroksi fungsi-fungsi yang telah ada.

Kelima, pemberi identitas diri. Keenam, sebagai pendewasaan agama. Fungsi agama yang dijelaskan Hendro Puspito lebih ringkas lagi, namun intinya hampir sama menurutnya, fungsi agama itu adalah edukatif, penyelamatan, pengawasan sosial, memupuk persaudaraan dan transformatif (Dadang Kahmad, 2006:130).

2.4. Kerukunan Antar Umat Beragama

Allah berfirman dalam Al-Qur²an Surat Al-Hujaraat Ayat 13 yang artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsabangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha

mengetahui lagi Maha Mengenal.." Kata syu'ub adalah bentuk jamak dari kata sya'b. Kata ini menunjuk kumpulan dari sekian qobilah yang biasa diterjemahkan suku yang merujuk kepada satu kakek. Qobilah atau suku pun terdiri dari sekian banyak kelompok keluarga yang dinamai Imarah, dan yang ini terdiri lagi dari sekian banyak kelompok yang dinamai bath.

Dibawah bath ada sekian fakhdz hingga akhirnya sampai himpunan keluarga yang terkecil. Terlihat dari penggunaan kata bahwa kata sya'b bukan menunjuk kepada pengertian bangsa, sebagai mana dipahami dewasa ini. Memang, paham kebangsaan sebagai mana dikenal dewasa ini. Pertama muncul dan berkembang di Eropa XVIII M dan baru dikenal umat Islam sejak masuknya Napolion ke Mesir akhir abad XVIII itu. Namun, ini bukan berarti bahwa paham kebangsaan dalam pengertian modern tidak disetujui oleh al-Qur'an. Bahkan disini tempatnya menguraikan hal itu. Kata Ta'arafu terambil dari kata arafu yang berarti mengenal.

Patron kata yang digunakan ayat ini mengandung makna timbal balik dengan demikian berarti saling mengenal. Semakin kuat mengenal satu pihak kepada selainnya, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Karena itu ayat diatas menekankan perlunya saling mengenal. Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan Ukhrowi. Bahkan tidak dapat bekerja sama tanpa saling kenal mengena. Demikian juga halnya dengan pengenalan terhadap Alam raya. Semakin banyak pengenalan terhadapnya, semakin banyak pula rahasiarahasia yang terungkap, dan ini gilirannya melahirkan kemajuan ilmu pengetahuan dan menciptakan kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akhirat (tafsir Quraish shihab, hal 617-618).

Umat beragama adalah komunitas manusia yang mempercayai agama tertentu, pengikut atau penganut ajaran agama tertentu. Umat beragama muncul karena adanya sikap penghormatan terhadap Tuhan sebagaimana diajarkan dalam agama itu menjadi suatu sistem ajaran, tata hidup dan kemasyarakatan. Maka di Indonesia misalnya terdapat umat Islam,

umat Kristen Protestan, umat Katolik, umat Hindu, dan umat Budha. Umat-umat beragama ini dapat saling bersaing dan saling menyerang kalau tidak ada keterbukaan terhadap penerimaan dan pengakuan adanya agama lain. tetapi dapat juga saling berdialog, saling memperdalam pengertian tentang diri dan masalah-masalah agama pada umumnya dan saling mendukung supaya Yang Maha Tinggi semakin dihormati menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia dalam kehidupan sosial bermasyarakat dengan keterbatasannya mempunyai masalah yang serba kompleks dan penuh dinamika dalam menjalin hubungan interaksi dengan sesama. Dalam memelihara keharmonisan hubungan antara sesamanya belum tentu berjalan lancar.

Untuk menjaga keharmonisan hubungan tersebut tuhan menurunkan agama sebagai pedoman dasar dalam mengatur hubungan antara sesama manusia itu sendiri. Dalam mewujudkan kemaslahatan umum, agama telah menggariskan dua pola dasar pokok hubungan yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya, yaitu : hubungan secara vertical dan hubungan secara horizontal. Yang pertama adalah hubungan antara pribadi dengan sang Khaliqnya yang di realisasikan dengan bentuk ibadat sebagai mana yang telah digariskan oleh setiap agama. Hubungan ini dilaksanakan secara individu, tetapi lebih utama dilaksanakan secara kolektif. Pada hubungan pertama ini, berlaku hubungan toleransi agama yang hanya terbatas dalam lingkungan suatu agama saja. Hubungan kedua adalah hubungan manusia dengan sesamanya. Pada lingkungan ini tidak hanya terbatas pada agamanya saja, tetapi juga berlaku kepada orang yang tidak seagama, yaitu dalam bentuk kerjasama dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum. Ibadat dalam pengertian luas tidak hanya terbatas pada hubungan antara manusia dengan Khaliqnya saja, juga meliputi segala ucapan, perbuatan dan tindakan yang bernilai baik, seperti membangun masyarakat dan bangsa, hal tersebut juga termasuk toleransi antar umat beragama.

Kehidupan beragama yang berkembang dengan subur, seperti pelaksanaan upacara-upacara keagamaan baik dalam bentuk ibadat (ritual)

maupun dalam bentuk peringatan tidak hanya terbatas pada rumah-rumah atau tempat-tempat resmi masing-masing agama, tetapi juga pada tempat-tempat lain disilah berlakunya toleransi terhadap umat beragama yang berlainan keyakinan. Yohannes Friedman, Guru Besar Studi Islam pada Hebrew University, Jerussalem mengakui kerumitan untuk menemukan kata toleransi dalam Alquran. Kata toleransi dalam bahasa Arabnya *al-tasāmuh*, memang tidak ditemukan di dalam Alquran. Bila yang dimaksud dengan toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati keragaman budaya dan perbedaan kebebasan berekspresi, termasuk dalam berkeyakinan, maka Alquran secara nyata memberikan perhatian nyata terhadap toleransi. Hal tersebut dapat ditemukan dalam ratusan ayat yang secara gamblang mendorong toleransi dan menolak intoleransi. Secara eksplisit, kata toleransi tidak ditemukan dalam Alquran, tetapi kata *al-tasāmuh* dijumpai dalam Islam.

Oleh karena itu, sesungguhnya konsep toleransi dalam Islam baik berdasarkan Alquran maupun Hadis, yang belakangan semakin (dikaburkan). Umat Islam harus memahami secara benar tentang konsep toleransi ini, sehingga tidak terjebak pada ketidaktahuan dan menjadi sasaran empuk propaganda pemikiran yang merusak Islam. Dalam konteks ini, kajian singkat toleransi ini penting, atau meminjam istilah Yusuf Qardhawi, ia ditujukan untuk menjelaskan konsepsi yang sebenarnya menghilangkan keragu-raguan serta meluruskan persepsi yang keliru. Berdasarkan pemikiran di atas bagaimana toleransi dalam Islam berdasarkan hadis Rasulullah saw., yang dikaitkan dengan ayat-ayat Alquran. Dengan demikian ditemukan kejelasan konsep, pemikiran dan pemahaman tentang apa itu toleransi, dan bagaimana toleransi berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad saw., dan Alquran sebagai pedoman bagi umat Islam ditengah persinggungan pluralitas masyarakat global. Sebab apa yang disampaikan dalam hadis merupakan dari apa yang disampaikan dalam Alquran.

Kerukunan dan toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama merupakan bagian usaha untuk menciptakan kemasyarakatan atau

aman serta kelancaran hubungan antara manusia yang berlainan agama, sehingga setiap golongan umat beragama dapat melaksanakan bagian dan tuntutan agama masing-masing. Bila tujuan yang akan dicapai merupakan tujuan bersama, cita-cita golongan yang dihimpun menjadi cita-cita agama, akan mempersempit jurang perbedaan pandangan. Apabila tujuan itu merupakan tujuan umat beragama, maka dengan kerukunan umat beragama dapat mempersempit jurang perbedaan pandangan serta menghimpun cita-cita masing-masing yang menjadi cita-cita bersama umat beragama, kemudian menjadi cita-cita bangsa. Pengertian umat beragama adalah terbinanya keseimbangan antar hak dan kewajiban dari umat beragama. Keseimbangan antar hak dan kewajiban itu adalah hak yang sungguh-sungguh dari setiap penganut agama untuk meramalkan seluruh ajaran agamanya sehingga ia menjadi agamawan paripurna namun pada saat yang sama pengalaman ajaran agamanya tidak bersinggungan dengan kepentingan orang lain yang juga memiliki hak untuk mengamalkan ajaran agamanya (Said Agil Husain Almunawar, 2004:53).

Membangun kerukunan umat beragama adalah suatu kemestian yang tidak bisa ditawar-tawar. Hal ini disebabkan karena ajaran agama sendiri tidak mengajarkan penganutnya untuk memusuhi agama yang lain sungguh pun tidak mensepakati ajaran agama yang lain itu. Sepantasnya masing-masing penganut agama rela hidup berdampingan dengan berkerja sama untuk membangun masyarakat. Oleh karena program membangun masyarakat ini adalah untuk kepentingan bersama, maka bentuk-bentuk kerja sama itu hendaknya dimulai dari hal-hal yang kongkrit yang dapat dirasakan oleh semua orang tanpa memandang latar belakang agama dan budayanya. Dalam menciptakan hidup bersama secara harmonis, dikalangan umat yang berbeda agama selalu menjadi dua bentuk sikap. Pertama, saling menghargai dan menghormati itu berjalan secara tidak „sadar“. Artinya seseorang menghormati orang yang beragama lain itu hanya karena kepentingan politik. Misalnya karena sama-sama satu bangsa dan negara sepantasnya umat beragama saling rukun demi cita-cita bersama.

Kedua, penghormatan terhadap orang yang menganut agama lain itu muncul bukan hanya karena kepentingan politik tetapi lebih dari itu karena adanya kesadaran bahwa agama-agama yang dianut manusia di bumi ini memiliki titik temu yang sangat mendasar. Bentuk sikap pertama diatas sering kali dibina secara dialog dan mengusahakan saling tenggang serta menabukan masalah sara. Tetapi perlu disadari bahwa sikap seperti ini sering kali lebih dangkal dan rapuh, mudah terpancing jika terusik emosi keagamaannya, bahkan sering kali mengorbankan cita-cita bersama hanya karena ketersinggungan emosi keagamaan. Kerukunan yang berpegang kepada prinsip masing-masing agama menjadikan setiap golongan umat beragama sebagai golongan terbuka sehingga memudahkan untuk saling berhubungan baik dengan anggota dari golongan agama-agama lain, dan akan mudah untuk mengembangkan hubungan dalam berbagai bentuk kerjasama dalam masyarakat.

Menurut Said Agil Husain Almunawar (2004:5) mengatakan bahwa dengan kerukunan dimaksudkan agar terbina dan terjaga hubungan baik dalam pergaulan antara warga yang berlainan agama. Urgensi kerukunan adalah untuk mewujudkan kesatuan pandangan yang membutuhkan kesatuan sikap guna melahirkan kesatuan perbuatan dan tindakan. Sedangkan kesatuan perbuatan dan tindakan menanamkan rasa tanggung jawab atau tidak menyalahkan pihak lain. Dengan kerukunan antar umat beragama, masyarakat menyadari bahwa negara adalah milik bersama dan merupakan tanggung jawab bersama umat beragama karena itu antar umat beragama bukanlah kerukunan sementara, bukan pula kerukunan politisi tapi kerukunan hakiki yang dilandasi dan dijiwai oleh agama masingmasing.

Dalam pengertian sehari-hari kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian, dengan pengertian jelas bahwa kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Kerukunan yang berpegang kepada prinsip masing-masing agama menjadikan setiap golongan umat beragama sebagai golongan terbuka, sehingga memungkinkan untuk saling melakukan interaksi bila anggota dari suatu

golongan umat beragama telah berhubungan dengan baik dengan umat beragama yang lain, maka akan memungkinkan untuk mengembangkan hubungan dalam berbagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan hubungan sesama umat yang didasari toleransi, saling menghormati, menghargai perbedaan keyakinan, pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketidak harmonisan antar pemeluk agama dilatar belakangi oleh banyak faktor. Secara kategoris simplistic hal itu dapat dibedakan ke dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi seseorang bersikap disebabkan paham keagamaan terhadap ajaran agamanya.

Konflik antar umat beragama itu sering terjadi dan merupakan faktor pembakar emosional umat yang paling cepat dalam memunculkan konflik. Dengan demikian, kerukunan menjadi bahan kajian antar umat beragama untuk memutuskan konsep membina kerukunan sehingga konflik yang bersumber dari faktor agama dapat meredam sedini mungkin. Keberhasilan dalam membangun masyarakat salah satunya ditandai dengan terciptanya kerukunan di tengah-tengah masyarakat yang pluralis tersebut. Untuk menyikapi pluralitas agama ini, paling tidak ada dua pertanyaan besar bagi pemeluk agama : pertama, bagaimana memposisikan diri di tengah-tengah pluralitas agama dan kedua, bagaimana teologi suatu agama mendefinisikan diri di tengah-tengah agama lain. Hal ini dimaksudkan agar agama benar-benar berfungsi sebagai faktor pemersatu (integrated factor) dalam masyarakat yang majemuk sehingga tidak saling berbentura. Menyikapi dua problem diatas, maka ada beberapa hal yang perlu tidak direalisasikan oleh pemeluk agama antara lain : Pertama memposisikan diri sebagai pemeluk suatu agama dengan benar. Benar disini maksudnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan hak asasi masing-masing. Sangat tidak bisa dibenarkan tindakan-tindakan menyimpang seperti pemaksaan, penipuan, mistik, terlebih dilakukan kepada orang yang sudah memeluk suatu agama

tertentu, sebab sikap-sikap seperti ini akan menimbulkan emosional pemeluk agama lain. Jadi, penyebaran agama harus dilakukan dengan pola yang arif dan adil (fair play).

Kedua, mendefinisikan teologi keagamaan yang bermuara pada konteks pluralitas. Artinya, meminimalisir bahasa absolutism, eksklusivisme, ekstrimisme, fanatisme dan agresivisme dalam berinteraksi dengan pemeluk antar umat beragama. Absolutisme adalah kesombongan intelektual. Eksklusivisme adalah kesombongan sosial. Fanatisme adalah kesombongan emosional. Ektrimisme adalah berlebih-lebihan dalam bersikap dan Agresivisme adalah berlebih-lebihan dalam tindakan fisik. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap agama memiliki klaim kebenaran (truth claim). Ketiga, reinterpretasi pesan-pesan agama, semua agama harus mampu memerankan fungsinya menjadi dialektis konstruktif. Bahasa-bahasa agama (dogma) harus diwujudkan dalam bentuk teori-teori sosial yang dapat diaplikasikan atau lebih tepatnya harus dikontekstualisasikan agar berfungsi historis, dan membumi. Pencerahan terhadap masyarakat melalui upaya reinterpretasi agama, sehingga pesan-pesan agama menjadi fungsional.

Akhirnya ajaran keadilan, toleransi, dan cinta kasih yang terkandung dalam agama menjadi implementatif dan integrative dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Keempat, dialog antar umat beragama, hal ini perlu dilakukan agar komunikasi antar pemeluk umat beragama yang diwakili oleh pemukapemukanya terjalin dengan baik untuk itu, setiap pemeluk agama harus bersikap terbuka sehingga terwujud dialog yang konstruktif. Kelima, saling menghormati dan saling menghargai. Setiap umat beragama harus memunculkan sikap ini dan bertekad untuk terus menjaga suasana agar tetap damai. Setiap bangsa selalu mengidam-ngidamkan masyarakat yang aman, damai dan tentram. Tidak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk menciptakan kekacauan dalam kehidupan di dunia ini. Untuk itu, hendaknya semua pemeluk agama bertekad untuk benar-benar memfungsikan agama sebagai faktor

pemersatu bangsa dengan senantiasa membina kerukunan antar umat beragama (<http://www.kereukunan.com>).

Pemerintah bersama masyarakat sepakat menggunakan istilah kerukunan dengan konsep kerukunan hidup beragama yang mencakup kerukunan interen umat beragama (kondisi rukun dalam satu agama), kerukunan antar umat beragama (kondisi rukun antar umat yang berbedabeda agama), dan kerukunan antara (pemuka) umat beragama dan pemerintah. Dialog interen umat beragama merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tri kerukunan kehidupan umat beragama, yang pada dasarnya merupakan upaya mempertemukan hati dan pikiran di kalangan sesama penganut agama. Secara umum pemimpin agama berperan penting dalam merancang dan melaksanakan dialog interen umat beragama, antar umat beragama, dan antara umat beragama dan pemerintah baik dari kalangan pemuka agama Ulama“Cendekiawan Muslim, Mubalig, maupun pemimpin kelompok keagamaan dari kalangan penganut dan pemimpin agama lainnya.

Bab III Metode

3.1. Metodologi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian survey. Indriantoro dan Supomo (1999) menyampaikan bahwa penelitian survey merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Metode ini memerlukan kontak atau hubungan antara peneliti dengan subyek (responden) penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Data penelitian berupa data subyek yang menyatakan opini, sikap, pengalaman atau karakteristik subyek penelitian secara individual atau kelompok. Metode ini biasanya digunakan untuk data yang sama dari banyak subyek.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis tingkat penelitian deskriptif. Dimana penelitian deskriptif itu sendiri mempunyai arti penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Sedangkan jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah gabungan data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif digunakan untuk memperkaya hasil penelitian yang didapat dengan melakukan *indepht interview*.

3.2. Populasi, Sampel dan Margin of Error

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah seluruh warga masyarakat Kabupaten Lahat yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah berdasarkan dokumen kependudukan. Jumlah sampel responden untuk survey ini ditetapkan 500 responden. Sehingga batas ambang kesalahan yang dapat ditoleransi adalah sebagai berikut:

Margin of error dari sampel:

$$n^* = \frac{Z^2 * p * q}{e^2}$$

Dimana :

n^* : jumlah sampel yang diambil

Z : Nilai distribusi normal, jika $\alpha = 5\%$ maka $Z = 1.96$

p : proporsi laki-laki, diperkirakan $p = 0.5$

q : proporsi perempuan, diperkirakan $q = 0.5$

e : margin of error

3.3 Metode Pengambilan Sampel

Metode penarikan sampel dalam penelitian ini adalah *Multistage Random Sampling*, yang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Tahap 1: Menentukan Jumlah Sampel per Kecamatan

Jumlah sampel per Kecamatan proporsional berdasarkan jumlah penduduk di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Lahat.

TAHAP 2: Menentukan jumlah kelurahan/desa terpilih.

Kelurahan/desa terpilih diambil secara acak dari seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lahat.

Prinsip penentuan kelurahan/desa: setiap Kelurahan mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel.

Jumlah Kelurahan terpilih pada masing-masing Kecamatan bergantung pada jumlah sampel pada masing-masing Kecamatan

TAHAP 3: Menentukan SSU (*Secondary Sampling Unit*) yaitu RT (Rukun Tetangga) terpilih. Dalam 1 Kelurahan/Desa diambil maksimal 2 RT (Rukun Tetangga). RT terpilih diambil secara acak dari seluruh RT pada masing-masing desa atau kelurahan.

TAHAP 4: Menentukan PSU (*Primary Sampling Unit*) yaitu Rumah Tangga Terpilih diambil secara acak dari rumah tangga yang ada pada masing-masing Rukun Tetangga (RT) terpilih. Interval antar rumah tangga minimal 3 (tiga) rumah

TAHAP 5: Menentukan PSU berdasarkan beberapa kriteria tambahan seperti:

- Berdasarkan gender responden
- Berdasarkan usia responden
- Berdasarkan pekerjaan responden
- Berdasarkan strata Pendidikan responden
- Berdasarkan pemanfaatan responden terhadap layanan publik yang diterima

3.4 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Maret-September 2023 dengan lokasi penelitian di Kabupaten Lahat.

3.5 Variabel

Variabel Toleransi dan Kerukunan *Social Distance Scale* (Bogardus), KUB (kerukunan Umat Beragama), dan IKT (Indeks Kota Toleran)

A. Persepsi

1. Memeluk agama merupakan bagian dari hak asasi manusia
2. Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing merupakan bagian dari hak asasi manusia
3. Setiap pemeluk agama wajib menjamin kebebasan pemeluk agama lainnya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing
4. Setiap pemeluk agama wajib menjamin kebebasan pemeluk agama lainnya untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing
5. Perbedaan agama merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat
6. Agama yang saya anut mengajarkan saya untuk bersikap toleran atau menghargai agama lain
7. Penyebaran agama kepada penganut agama lain tidak diperbolehkan

B. Toleransi

8. Pemeluk agama yang baik tidak akan melakukan kekerasan secara fisik terhadap pemeluk agama lainnya
9. Pemeluk agama yang baik tidak akan melakukan kekerasan secara verbal terhadap pemeluk agama lainnya
10. Kegiatan radikalisme (kekerasan) dilarang dalam agama yang saya anut

11. Di lingkungan tempat tinggal saya pernah terjadi konflik antar umat Bergama
12. Konflik antar umat beragama disebabkan karena kepentingan politik
13. Konflik antar umat beragama disebabkan karena kepentingan ekonomi
14. Konflik antar umat beragama disebabkan karena egoisme masing-masing pemeluk agama
15. Kerjasama antar umat beragama sudah terjalin dengan baik
16. Para tokoh agama sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga kerukunan umat beragama
17. Organisasi keagamaan sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga kerukunan umat beragama
18. Pemerintah sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga kerukunan hidup umat beragama

C. Sikap

19. Saya bersedia bertetangga dengan pemeluk agama lain
20. Saya bersedia bergaul (menyapa, mengobrol dll) dengan pemeluk agama lain
21. Saya bersedia bersahabat dengan pemeluk agama lain
22. Saya bersedia menikah dengan pemeluk agama lain
23. Dalam melakukan hubungan sosial, saya tidak pernah membedakan seseorang berdasarkan agamanya

24. Saya tidak keberatan apabila pemeluk agama lain membangun tempat peribadatnya di lingkungan tempat tinggal saya
25. Saya tidak keberatan apabila pemeluk agama lain mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggal saya
26. Saya pernah berselisih paham dengan pemeluk agama lain
27. Saya bersedia untuk bermusyawarah/berdamai dengan pemeluk agama lain jika terjadi perselisihan.
28. Keberadaan ajaran-ajaran agama lain di luar yang sudah ditetapkan oleh negara meresahkan

D. Kerjasama

29. Saya bersedia mengundang pemeluk agama lain dalam kegiatan (misalnya kegiatan syukuran, pesta, dan lain sebagainya) yang saya lakukan
30. sebagai) yang saya lakukan
31. Saya bersedia menghadiri undangan dari pemeluk agama lain
32. Saya bersedia memberikan sumbangan kepada pemeluk agama lain yang memerlukannya
33. Saya bersedia melakukan hubungan kerja dengan pemeluk agama lain
34. Saya bersedia membantu pemeluk agama lain untuk membangun rumah ibadahnya
35. Saya bersedia terbuka (mengizinkan) kegiatan keagamaan lain
36. Saya bersedia mendengarkan saran dari tokoh agama lain

E. Sikap Pemerintah Kabupaten

37. Pemerintah memfasilitasi pembangunan sarana peribadatan dengan baik
38. Pemerintah melakukan sosialisasi mengenai aturan pendirian sarana peribadatan dengan baik
39. Pemerintah memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dengan baik
40. Prosedur perizinan pembangunan tempat ibadat yang sekarang berlaku sudah menjamin hak yang sama bagi setiap agama untuk membangun rumah ibadatnya
41. Prosedur perizinan pembangunan tempat ibadat yang sekarang berlaku sudah diterapkan dengan konsisten bagi setiap agama
42. Pemerintah memfasilitasi dialog antar umat agama dengan baik
43. Pemerintah sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai agama
44. Pemerintah bersikap tegas dalam menyikapi kasus penistaan agama
45. Pemerintah bersikap tegas dalam menyikapi kasus kekerasan antar umat beragama
46. Pemerintah bersikap tegas dalam menyikapi kasus penyimpangan ajaran agama
47. Pemerintah melindungi kebebasan beribadah setiap pemeluk agama

F. Harapan terhadap Pemerintah

48. Pemerintah perlu memfasilitasi pembangunan sarana peribadatan

49. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai aturan pendirian sarana peribadatan
50. Pemerintah perlu memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan
51. Prosedur perizinan pembangunan tempat ibadat perlu menjamin hak yang sama bagi setiap agama untuk membangun rumah ibadatnya
52. Prosedur perizinan pembangunan tempat ibadat perlu diterapkan dengan konsisten bagi setiap agama
53. Pemerintah perlu memfasilitasi dialog antar umat agama
54. Pemerintah perlu mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai agama
55. Pemerintah perlu tegas dalam menyikapi kasus penistaan agama
56. Pemerintah perlu tegas dalam menyikapi kasus kekerasan antar umat beragama
57. Pemerintah perlu tegas dalam menyikapi kasus penyimpangan ajaran agama
58. Pemerintah perlu membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sampai tingkat RW
59. Pemerintah perlu memasukkan muatan kerukunan umat beragama dalam kurikulum di sekolah
60. Memelihara dan meningkatkan kerukunan umat beragama agar Lahat aman dan harmonis
61. Memperhatikan agama minoritas
62. Memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan FKUB
63. Sosialisasi keberadaan FKUB

64. Penjaminan hak-hak setiap penganut agama
65. Pemerintah harus mencegah dan meredam konflik antar umat beragama
66. Sosialisasi mengenai pemahaman toleransi antarumat beragama
67. Perlu adanya layanan cepat seperti hotline untuk laporan konflik agama di Lahat

G. INDIKATOR KOTA TOLERAN (Setara Institute)

Regulasi pemerintah Kabupaten

68. Adanya rencana pembangunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
69. Adanya Kebijakan diskriminatif pemerintah pada agama tertentu

Tindakan pemerintah

70. Adanya pernyataan dari pejabat kunci terkait peristiwa intoleransi
71. Adanya tindakan nyata dari pejabat kunci terkait peristiwa intoleransi

Regulasi sosial

72. Rendahnya peristiwa intoleransi
73. Rendahnya dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi.

Demografi agama

74. Adanya heterogenitas (keberagaman) keagamaan penduduk
75. Adanya inklusi (keterbukaan) sosial keagamaan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode:

- a. Studi Pustaka, dilakukan untuk mendapatkan data terpercaya dari jurnal maupun penerbitan resmi maupun dari dinas-dinas terkait.
- b. Observasi, dilakukan untuk mendapatkan informasi dan fakta primer/langsung tentang kondisi fisik wilayah yang merupakan hasil pengamatan lapangan secara visual.
- c. Wawancara, dilakukan kepada seluruh responden yang terjaring dalam survey.

3.7. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber secara langsung. Dalam hal ini data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap masyarakat yang pernah memanfaatkan pelayanan publik pada pelayanan Perizinan di Kabupaten Lahat berdasarkan kuesioner yang telah disiapkan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung. Dalam penelitian ini data sekunder meliputi data demografi kependudukan dari BPS dan referensi lain yang relevan.

3.8. Skala Pengukuran

Rujukan skala pengukuran menggunakan skala linkert 1-5 sesuai permendagri nomor 14 Tahun 2017.

A. Responden

Penentuan jumlah responden pada masing-masing obyek survey ditentukan dengan menggunakan rumus slovin (Sevilla et. al., 1960:182).

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

dimana

n= jumlah sampel

N= jumlah responden

e = Batas toleransi kesalahan (error tolerance)

jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 500 responden. Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dengan persentase. Semakin kecil toleransi kesalahan, semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Misalnya, penelitian dengan batas kesalahan 5% berarti memiliki tingkat akurasi 95%. Untuk menghindari bias maka pemilihan responden adalah responden yang melakukan atau yang telah mendapatkan layanan selama dalam waktu reverensi Survey berlangsung. Responden yang akan didata dalam kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat di Pelayanan Publik tahun 2019 ini adalah masyarakat yang telah memperoleh pelayanan di Lahat.

B. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (CSI) dapat didefinisikan nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan di Pelayanan Publik Pemerintah. Untuk mengetahui besarnya CSI maka dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut (Aritonang, 2005) Pertama, melakukan Mean Importance Score (MIS), nilai ini berasal dari rata-rata kepentingan tiap konsumen.

$$MIS = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n}$$

Dimana

n = Jumlah Konsumen

Y_i = Nilai Kepentingan Atribut Y ke-i

Kedua, membuat Weight Factors (WF). Bobot ini merupakan Presentase nilai MIS per atribut terhadap total MIS seluruh atribut.

$$WF = \frac{MIS_i}{\sum_{i=1}^n MIS_i} \times 100\%$$

Ketiga, membuat Weight Score (WS), Bobot ini merupakan perkalian antara WF dengan rata-rata tingkat kepuasan (X), (Mean Satisfaction Score = MSS)

$$WS_i = WFi \times MSS$$

Keempat menentukan Customer Satisfaction Index (CSI)

$$CSI = \frac{\sum_{i=1}^n WS_i}{HS} \times 100\%$$

Dimana :

HS = (Highest scale) Skala Maksimum

Nilai CSI dibagi kedalam 4 kriteria dari tidak puas sampai dengan sangat puas, Sebagaimana diketahui bahwa kategori mutu pelayanan berdasarkan Keputusan Menteri Menpan nomor KEP 14/M.PAN/2/2017 adalah sebagai berikut :

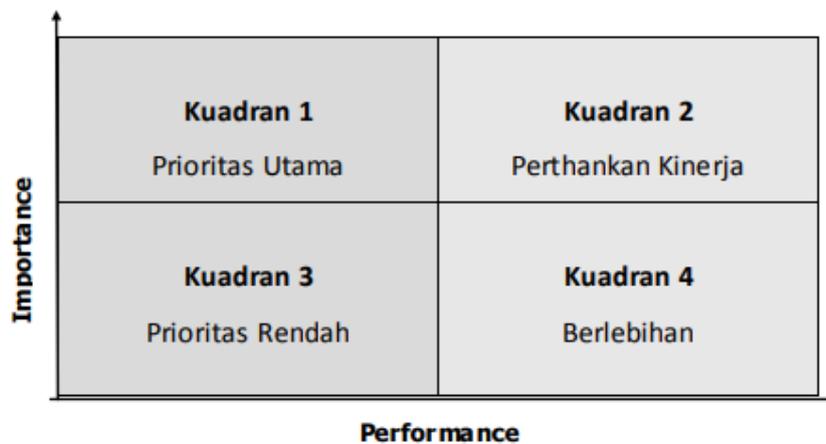
Tabel 3.1. Kriteria Nilai Customer Satisfaction Index

NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM (CSI)	KINERJA UNIT PELAYANAN
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	TIDAK PUAS
1,76 – 2,50	43,76 - 62,50	KURANG PUAS
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	PUAS
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	SANGAT PUAS

Tingkat Kepuasan hanya ditanyakan kepada responden yang pernah memiliki pengalaman merasakan atribut-atribut dalam pelayanan.

C. Persepsi

Konsep Importance dan Performance Matriks merupakan metode untuk mengetahui dimana tingkat harapan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Dari berbagai persepsi tingkat kepentingan masyarakat, kita dapat merumuskan tingkat kepentingan masyarakat yang paling dominan. Diharapkan kita juga dapat menangkap persepsi yang lebih jelas mengenai pentingnya unsur tertentu di mata masyarakat. Matriks ini dibagi menjadi 4 kuadran, dengan diagram sebagai berikut:



Gambar 3.1 Diagram Importance Performance Matrix

Kuadran 1, Atribut-atribut yang terdapat dalam kuadran ini memiliki tingkat kepentingan yang tinggi menurut responden namun kinerja/ pelayanannya masih rendah. Implikasinya, atribut-atribut yang terdapat dalam kuadran ini harus diprioritaskan untuk diperbaiki.

Kuadran 2, Atribut-atribut yang terdapat dalam kuadran ini memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dan kinerja/ pelayanannya juga dinilai baik oleh responden. Atribut-atribut yang terdapat dalam kuadran ini merupakan kekuatan atau keunggulan Instansi di mata responden sehingga perlu dipertahankan kinerja dan pelayanan atas atribut-atribut tersebut serta dijaga kualitasnya.

Kuadran 3, Atribut-atribut yang terdapat dalam kuadran ini memiliki tingkat kepentingan yang rendah dan kinerja/ pelayanannya juga dinilai

kurang baik oleh responden. Perlu dilakukan perbaikan kinerja terhadap atribut-atribut tersebut untuk mencegah atribut tersebut bergeser ke kuadran I.

Kuadran 4, Atribut-atribut yang terdapat dalam kuadran ini memiliki tingkat kepentingan yang rendah menurut responden namun memiliki kinerja/ pelayanan yang baik sehingga dianggap berlebihan oleh responden. Melalui kegiatan ini Pemerintah Kabupaten Lahat memperoleh umpan balik persepsi masyarakat tentang keberterimaan layanan publik yang diperoleh dari pemerintah, sehingga hasil ini juga berfungsi untuk perbaikan layanan tersebut.

D. Pengolahan Data dan Analisis Survey

Tahapan selanjutnya dari pekerjaan ini adalah pengolahan data dan analisis survey. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam tahapan ini adalah sebagai berikut:



1. Proses Pemeriksaan Data (Cleaning) Pada tahapan ini dilakukan proses pemeriksaan data hasil survey. Pemeriksaan data dilakukan dengan beberapa langkah , antara lain :
 - a) Memeriksa kuesioner yang masuk apakah layak untuk diproses atau didrop, bilamana jawaban tidak lengkap;
 - b) Memberi nomor pada kuesioner sebagai kendali;
 - c) Memeriksa kelengkapan dan kejelasan jawaban;
 - d) Memeriksa konsistensi antar jawaban dan relevansinya.
2. Proses Pengkodean Data Tahapan selanjutnya adalah memberi kode data. Sebagai bagian dari penelitian kuantitatif, data yang

terkumpul dalam penelitian survey biasanya berupa angka-angka yang merupakan nilai dari variabel-variabel tertentu. Untuk kuesioner dengan sistem tertutup maka kode-kode jawaban harus dibuatkan. Pemberian kode ini dengan mengacu prinsip-prinsip pengukuran atau skala pengukuran,

3. Proses Tabulasi Data Proses tabulasi data adalah proses data entry atau memasukkan seluruh data kuesioner yang terdiri Bagian A (Data Responden), bagian B (*Closed Question*) dan bagian C (*Open Question*) ke dalam *soft copy* sesuai aplikasi yang digunakan.

Dalam pengolahan data, menggunakan aplikasi sederhana yakni Program Microsoft Excell dari Microsoft Office. Setelah data dimasukkan, selanjutnya adalah membersihkan data dari salah ketik atau salah mengkode data. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memastikan kebenaran data yang kita entry, antara lain :

- a) Memproses data untuk diperiksa ulang, misalnya dengan pilihan statistik deskriptif seperti frekuensi, mean, modus dan median;
- b) Memeriksa secara teliti apakah ada penyimpangan-penyimpangan;
- c) Mencocokkan kembali data yang telah di entry dengan data yang ada pada kuesioner.

Proses Analisis Data Analisa Data dilakukan dengan perhitungan indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan pedoman dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 Tahun 2017. Selain itu juga ditambahkan dengan melakukan GAP analisis secara statistik terhadap tingkat mutu pelayanan dibandingkan dengan harapan masyarakat dengan cara memetakan unsur-unsur yang diukur dalam kuadran mutu pelayanan dengan teori service quality. Data-data yang didapatkan dari hasil survey tersebut kemudian di-entry pada kertas kerja untuk kemudian dilakukan rekapitulasi/ klasifikasi, analisa serta evaluasi sehingga didapatkan :

a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Yaitu nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang telah diberikan.

b) Deskripsi Kepuasan maupun Ketidakpuasan

Diagram Importance dan Performance Analysis (IPA Diagram) Merupakan metode untuk mengetahui dimana tingkat harapan terhadap pelayanan yang diterima. Dari berbagai persepsi tingkat kepentingan, kita dapat merumuskan tingkat kepentingan yang paling dominan. Diharapkan kita juga dapat menangkap persepsi yang lebih jelas mengenai pentingnya unsur tertentu.

BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN LAHAT

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Lahat menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.5. 4.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Pada aspek geografi Kabupaten Lahat diperoleh gambaran karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan pada aspek demografi menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten Lahat.

4.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

4.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Lahat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821). Kabupaten Lahat yang dikenal dengan sebutan Bumi Seganti Setungguan terdiri dari 24 kecamatan, 17 kelurahan, dan 360 desa, yang memiliki wilayah seluas 4.361,83 km². dengan batas-batas wilayah administrasinya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Rawas
- Sebelah Selatan : Kota Pagar Alam dan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
- Sebelah Barat : Kabupaten Empat Lawang
- Sebelah Timur : Kabupaten Muara Enim

Secara rinci luas wilayah dan jumlah desa menurut kecamatan di Kabupaten Lahat dapat dilihat pada tabel 2.1.

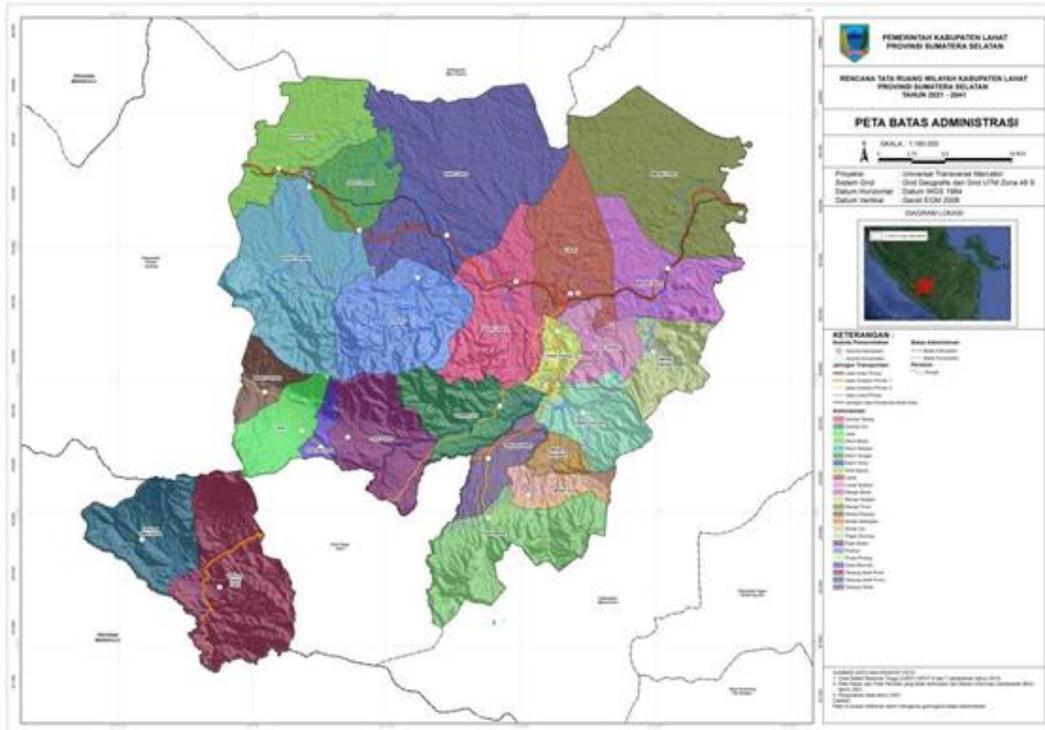
Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Lahat

No	Kecamatan	Luas (Ha)	%	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa	Jarak dari Ibukota Kabupaten
1	Tanjung Sakti PUMI	31.708,60	7,30	Pajar Bulan	18	66,35
2	Tanjung Sakti PUMU	17.815,46	4,10	Simpang III PUMU	14	66,97
3	Kota Agung	24.347,54	5,60	Kota Agung	22	32,59
4	Mulak Ulu	6.375,95	1,47	Muara Tiga	16	27,87
5	Tanjung Tebat	8.476,96	1,95	Tanjung Tebat	14	22,55
6	Mulak Sebingkai	3.885,44	0,89	Keban Agung	10	18,53
7	Pulau Pinang	5.299,55	1,22	Jati	10	3,3
8	Pagar Gunung	13.485,56	3,10	Karang Agung	20	15,86
9	Gumay Ulu	16.067,68	3,70	Tinggi Hari	10	17,13
10	Jarai	11.301,83	2,60	Pasar Jarai	21	41,53
11	Pajar Bulan	19.258,37	4,43	Sumur	20	36,60
12	Muara Payang	6.283,68	1,45	Lawang Agung	7	44,87
13	Suka Merindu	3.069,53	0,71	Suka Merindu	10	40,84
14	Kikim Barat	20.275,84	4,67	Saung Naga	19	46,14
15	Kikim Timur	52.507,20	12,08	Bungamas	32	20,57
16	Kikim Selatan	35.774,38	8,23	Pagar Jati	18	31,61
17	Kikim Tengah	12.635,59	2,91	Tanjung Aur	9	32,7
18	Lahat	20.737,51	4,77	Lahat	29	0
19	Gumay Talang	22.970,40	5,29	Sukarame	15	7,67
20	Lahat Selatan	8.672,12	2,00	Tanjung Payang	10	2,11
21	PSEKSU	25.391,40	5,84	Lubuk Mabar	11	21,69
22	Merapi Barat	18.754,23	4,32	Merapi	19	16,01
23	Merapi Timur	37.988,98	8,74	Lebuay Bandung	14	28,02
24	Merapi Selatan	11.404,29	2,62	Sukamerindu	9	14,50
Kabupaten		434.487,9	100	Lahat	377	-

Sumber: - BPS, Kabupaten Lahat Dalam Angka Tahun 2021

Letak dan Kondisi Geografis

Letak geografis berdasarkan Peta Rupabumi skala 1 : 50.000 pada garis terluar Kabupaten Lahat terletak antara 3°29'42,000"- 4°16'1,200" Lintang Selatan dan 102°54'54,000"-103°46'22,800" Bujur Timur. Dengan letak yang sangat strategis tersebut menjadikan Kabupaten Lahat sebagai kawasan yang cepat tumbuh dan merupakan jalur transportasi nasional Lintas Tengah Sumatera (Trans Jakarta – Lampung – Baturaja – Muara Enim – Lahat – Tebing Tinggi – Lubuk Linggau – Bengkulu atau Padang). Secara rinci batas administrasi Kabupaten Lahat dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Lahat

4.1.1.2 Topografi

Topografi Kabupaten Lahat bervariasi mulai dari dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan. Ketinggian wilayah Kabupaten Lahat dari atas permukaan laut bervariasi mulai dari 25 meter hingga 1.000 meter. Kecamatan yang paling rendah dari permukaan laut adalah Kecamatan Lahat, Merapi Barat, dan Merapi Timur dengan ketinggian 25 meter sampai 100 meter. Sedangkan kecamatan dengan dataran tinggi dari permukaan laut meliputi Kecamatan Kota Agung, Tanjung Sakti Pumi, Tanjung Sakti Pumu, Jarai, Pajar Bulan, dan Muara Payang. Secara rinci ketinggian wilayah Kabupaten Lahat dari atas permukaan laut menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 4.2, Tinggi Wilayah dari Permukaan Laut, dan Jarak ke Ibu Kota Menurut Kecamatan

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Tinggi Wilayah (mdpl) <i>Altitude (m a.s.l)</i>	Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota <i>Distance to the Capital of Regency/ Municipality</i>
(1)	(2)	(3)
Tanjung Sakti Pumi	500-1000	66,35
Tanjung Sakti Pumu	500-1000	66,97
Kota Agung	500-1000	32,59
Mulak Ulu	100-1000	27,87
Tanjung Tebat	100-1000	22,55
Mulak Sebingkai	-	18,53
Pulau Pinang	100-500	3,37
Pagar Gunung	100-500	15,86
Gumay Ulu	100-500	17,13
Jarai	500-1000	41,53
Pajar Bulan	500-1000	36,60
Muara Payang	500-1000	44,87
Sukamerindu	500-1000	40,84
Kikim Barat	100-500	46,14
Kikim Timur	100-500	20,57
Kikim Selatan	100-500	31,61
Kikim Tengah	100-500	32,74
Lahat	25-100	-
Gumay Talang	100-500	7,67
Lahat Selatan	-	2,11
Pseksu	100-500	21,69
Merapi Barat	25-100	16,01
Merapi Timur	25-100	28,02
Merapi Selatan	25-100	14,50
Kabupaten Lahat <i>Lahat Regency</i>	-	-

Sumber : Kabupaten Lahat Dalam Angka 2022

4.1.1.3 Geologi

Kabupaten Lahat termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang berdasarkan tatanan tektoniknya menempati cekungan belakang busur Paleogen yang dikenal sebagai Cekungan Sumatera Selatan di bagian timur, dan mendala busur vulkanik yang membentang secara regional di sepanjang Bukit Barisan bagian barat. Jenis struktur yang umum dijumpai dicekungan Sumatera Selatan terdiri dari

lipatan, sesar dan kekar. Pembentukan struktur lipatan, sesar dan kekar di cekungan Sumatera Selatan memberikan implikasi yang signifikan terhadap akumulasi sumber daya minyak bumi, gas alam, batubara dan panas bumi. Kumpulan struktur lipatan yang membentuk *antiklinorium* telah banyak dijumpai berperan sebagai perangkap hidrokarbon.

Selain struktur geologi, jenis litologi penyusun stratigrafi cekungan Sumatera Selatan telah pula mengontrol penyebaran sumberdaya energi fosil non fosil di wilayah ini. Batuan yang mendasari Cekungan Sumatera Selatan merupakan kompleks batuan berumur pra-tersier, yang terdiri dari batu gamping, andesit, granodiorit, pilit, kuarsit dan granit. Secara geologi daerah Kabupaten Lahat tersusun atas formasi Lahat terdiri dari endapan tufa, aglomerat, breksi tufan, andesit, serpih, batu lanau, batu pasir dan batubara.

Jenis tanah yang ada di wilayah Kabupaten Lahat meliputi jenis tanah aluvial, regosol, andosol, latosol, asosiasi litosol dan latosol serta komplek tanah podsolik dan litosol yang tersebar di setiap kecamatan. Jenis tanah aluvial sangat cocok untuk tanaman sawah, kebun campuran, tegalan, alang-alang/semak belukar. Sedangkan jenis tanah andosol dan latosol cocok digunakan untuk tanaman padi, jagung, kopi, karet, cokelat, tanaman buah-buahan dan umbi-umbian.

4.1.1.4 Hidrologi

Secara umum Kabupaten Lahat memiliki sumber daya air berupa sumber daya air permukaan dan sumber daya air tanah. Sumber daya air permukaan adalah sumber air yang berada di atas permukaan tanah yang memenuhi persyaratan layak untuk dikonsumsi seperti sungai, danau dan tadah hujan. Beberapa sungai besar yang ada di wilayah Kabupaten Lahat meliputi Sungai Lematang, Sungai Air Mulak, Sungai Endikat, Sungai Kikim, Sungai Lingsing, Sungai Pangi, Sungai Serelo, Sungai Air Keruh, Sungai Selangis dan Sungai Manna. Masyarakat yang tinggal sepanjang pinggiran sungai memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap keberadaan sungai tersebut dalam memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari seperti untuk mandi, mencuci dan keperluan rumah tangga lainnya. Sebagian masyarakat menggunakan air sungai sebagai sumber air bersih untuk dijadikan air minum. Pada saat musim kemarau, jumlah masyarakat yang memanfaatkan air sungai menjadi meningkat.

Sumber daya air tanah adalah sumber daya air yang terdapat di dalam

tanah. Air tanah adalah sumber air yang berada di bawah permukaan tanah yang dapat dipergunakan baik untuk keperluan sehari-hari, irigasi ataupun industri tentu saja jika memenuhi persyaratan kualitas dan debitnya memenuhi kebutuhan.

4.1.1.5 Klimatologi

Kabupaten Lahat memiliki iklim tropis atau 2 (dua) musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada tahun 2017, rata-rata jumlah curah hujan dan hari hujan setiap bulan di Kabupaten Lahat yaitu 93.36 per hari dan 266.29 mm. Jumlah curah hujan rata-rata paling sedikit terjadi di Kecamatan Merapi Timur sebanyak 183 per hari dan 69 mm, sedangkan rata-rata jumlah curah hujan yang paling banyak terjadi di Kecamatan Pulau Pinang sebanyak 396 per hari dan 82 mm.

Tabel 4.3 Curah Hujan dan Hari Hujan Per Bulan Kabupaten Lahat

No	Kecamatan	Total		Rata-Rata	
		HH	CH	HH	CH
1	Tanjung Sakti Pumi	23 7	3.29 0	119	274
2	Tanjung Sakti Pumu	25 0	4.58 3	125	382
3	Kota Agung	18 8	3.33 1	94	278
4	Mulak Ulu	19 1	3.15 3	96	263
5	Tanjung Tebat	15 5	2.95 8	78	247
6	Pulau Pinang	16 4	4.74 7	82	396
7	Pagar Gunung	21 8	3.87 5	109	323
8	Gumay Ulu	10 3	2.78 2	52	232
9	Jarai	20 7	3.34 0	104	278
10	Pajar Bulan	27 4	3.34 1	137	278
11	Muara Payang	20 5	3.12 7	103	261
12	Sukamerindu	-	-	-	-
13	Kikim Barat	17 8	2.99 9	89	250

14	Kikim Timur	18 8	3.71 8	94	310
15	Kikim Selatan	24 2	2.90 4	121	242
16	Kikim Tengah	17 2	3.22 6	86	269
17	Lahat	20 5	3.77 0	103	314
18	Gumay Talang	20 6	4.20 0	103	350
19	Pseksu	23 6	3.50 8	118	292
20	Merapi Barat	16 4	2.58 1	82	215
21	Merapi Timur	13 8	2.19 3	69	183
22	Merapi Selatan	18 7	2.67 4	94	223
23	Lahat Selatan	-	-	-	-
24	Mulak Sebingkai	-	-	-	-
	Jumlah	70. 30 0	4.10 8	5.858	2.05 4
	Rata-Rata	3.1 95, 45	186, 73	266,2 9	93,3 6

Keterangan:

- Data masih tergabung dengan kecamatan induk, CH = Curah Hujan, HH = Hari Hujan

4.1.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di Kabupaten Lahat berdasarkan fungsinya dibagi menjadi lahan pertanian dan bukan lahan pertanian. Penggunaan lahan di Kabupaten Lahat secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 4.4

Penggunaan Lahan di Kabupaten Lahat

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas	
		(Km ²)	%
1	Lahan Pertanian		

	a. Irigasi	159,42	3,65
	b. Tadah Hujan	15,70	0,36
	c. Rawa Pasang Surut	-	-
	d. Rawa Lebak	-	-
2	Bukan Lahan Pertanian		
	a. Bangunan Permukiman	464,56	10,65
	b. Tegak	202,03	4,63
	c. Ladang	36,68	0,84
	d. Perkebunan	1.567,69	35,94
	e. Hutan Rakyat	544,10	12,47
	f. Hutan Negara	288,06	6,60
	g. Padang Rumput	224,12	5,14
	h. Tidak ditanami apapun	431,22	9,89
	i. Lainnya	148,71	3,41
	j. Pertambangan	279,54	6,41
	Jumla	4.361,83	100,00
	h		

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Lahat

Dari table di atas luas wilayah terbagi menjadi beberapa kecamatan, seperti tergambar pada table berikut:

Tabel 4.5
Luas Area Kecamatan di Kabupaten Lahat

Kecamatan Subdistrict	Ibukota Kecamatan Capital of Subdistrict	Luas ¹ Total Area ¹ (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Tanjung Sakti Pumi	Pajar Bulan	271,00
Tanjung Sakti Pumu	Simpang III PUMU	229,59
Kota Agung	Kota Agung	165,59
Mulak Ulu	Muara Tiga	108,43
Tanjung Tebat	Tanjung Tebat	82,72
Mulak Sebingkai	Keban Agung	63,41
Pulau Pinang	Jati	111,67
Pagar Gunung	Karang Agung	105,51
Gumay Ulu	Tinggi Hari	87,01
Jarai	Jarai	167,52
Pajar Bulan	Sumur	146,11
Muara Payang	Lawang Agung Lama	37,50
Sukamerindu	Sukamerindu	55,23
Kikim Barat	Saung Naga	272,00
Kikim Timur	Bungamas	564,45
Kikim Selatan	Pagar Jati	124,80
Kikim Tengah	Tanjung Aur	265,60
Lahat	Lahat	107,60
Gumay Talang	Sukarame	249,61
Lahat Selatan	Tanjung Payang	183,87
Pseksu	Lubuk Mabar	269,29
Merapi Barat	Merapi	232,64
Merapi Timur	Lebuay Bandung	260,55
Merapi Selatan	Sukamerindu	200,14
Kabupaten Lahat		4 361,84

Sumber : Kabupaten Lahat dalam Angka 2021

4.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik Kabupaten Lahat maka dapat diidentifikasi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032 dan rencana perubahannya dalam Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032, bahwa kawasan lindung meliputi Hutan Lindung Bukit Dingin, Bukit Jambul Gunung Patah dan Hutan Lindung Gumai Tebing Tinggi dengan luas kurang lebih 44.528 (empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh delapan) hektar yang terletak di Kecamatan

Kikim Selatan, Kecamatan Kikim Barat, Kecamatan Jarai, Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, Kecamatan Tanjung Sakti PUMU, Kecamatan Kota Agung dan Kecamatan Mulak Ulu. Kawasan lindung terdiri dari:

- a) Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi :
 - Kawasan Hutan Lindung, meliputi Hutan Lindung Bukit Dingin, Bukit Jambul Gunung Patah dan Hutan Lindung Gumai Tebing Tinggi yang terletak di Kecamatan Kikim Selatan, Kikim Barat, Jarai, Tanjung Sakti Pumi, Tanjung Sakti Pumu, Kota Agung dan Mulak Ulu.
 - Kawasan Resapan Air, meliputi: kawasan resapan air yang terdapat hutan lindung Bukit Dingin, Bukit Jambul Gunung Patah, Gumai Tebing Tinggi, Bukit Serelo dan Hutan Lindung Bukit Napal.
- b) Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:
 - Kawasan Sempadan Sungai, meliputi Sungai Lematang, Sungai Kikim, Sungai Endikat, dan Sungai Manna dengan luas kurang lebih 7.142 hektar dan ketentuan jarak kawasan sempadan sungai selebar 100 meter kiri kanan untuk sungai besar dan 50 meter di kiri kanan untuk sungai kecil, serta 10-15 meter di kiri kanan sungai di kawasan permukiman.
 - Ruang Terbuka Hijau Kota dengan luas minimum 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau publik seluas minimum 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan dan ruang terbuka hijau privat seluas minimum 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan.
- c) Kawasan konservasi, meliputi:
 - Taman Wisata Alam Bukit Serelo dengan luas kurang lebih 210 hektar.
 - Suaka Margasatwa Gumai Pasemah dengan luas kurang lebih 46.123 hektar.
 - Suaka Margasatwa Isau Pasemah dengan luas kurang lebih 16.998 hektar.
- d) Kawasan rawan bencana alam, meliputi:

- Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Merapi Timur, Kecamatan Merapi Barat, Lahat, Tanjung Sakti Pumu, Tanjung Sakti Pumi, Kota Agung, Kecamatan Mulak Ulu, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Jarai, Kecamatan Muara Payung, Kecamatan Kikim Barat, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Pseksu, Kecamatan Gumay Talang, dan Kecamatan Merapi Selatan.
 - Kawasan rawan bencana gerakan tanah berlokasi di Kecamatan PSEKSU, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, Kecamatan Tanjung Sakti PUMU, Kecamatan Gumay Talang, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Kikim Barat, Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Mulak Ulu, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Gumay Ulu, Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Kikim Tengah, dan Kecamatan Merapi Selatan.
 - Kawasan rawan bencana letusan gunung api berlokasi di Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Jarai dan Kecamatan Tanjung Sakti PUMI.
 - Kawasan yang terletak di zona patahan aktif berlokasi di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI dan Kecamatan Tanjung Sakti PUMU.
 - Kawasan rawan gempa bumi berlokasi di Kecamatan Tanjung Sakti PUMI dan Kecamatan Tanjung Sakti PUMU.
- e) Kawasan lindung geologi yaitu berada pada Kawasan Bukit Besak di Kecamatan Merapi Selatan.

Selanjutnya untuk kawasan budidaya Kabupaten Lahat meliputi kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

- a) Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi :
- Kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 51.093 hektar terdiri atas Kecamatan Kikim Timur dengan luas kurang lebih 23.144 hektar, Kecamatan Lahat dengan luas kurang

lebih 2.064 hektar, dan Kecamatan Merapi Barat dengan luas kurang lebih 25.885 hektar.

- Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 5.458 hektar, terdiri atas Kecamatan Tanjung Sakti PUMU dengan luas kurang lebih 888 hektar, Kecamatan Pulau Pinang dengan luas kurang lebih 4.564 hektar, dan Kecamatan Lahat dengan luas kurang lebih 6 hektar.

b) Kawasan peruntukan pertanian, meliputi :

- Kawasan peruntukan tanaman pangan yang dikembangkan di semua kecamatan dengan luas kurang lebih 17.512 hektar. Kawasan peruntukan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas lebih kurang 15.942 hektar.
- Kawasan peruntukan hortikultura dengan komoditas unggulan berupa durian, duku, manggis, alpukat, kubis, sawi, cabe dan wortel yang dikembangkan di Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Gumay Ulu, Kecamatan Gumay Talang, Kecamatan Kecamatan Kikim Selatan dan Kecamatan PSEKSU dengan luas kurang lebih 2.968 hektar.
- Kawasan peruntukan perkebunan dengan komoditas utama perkebunan karet, kelapa sawit dan kopi yang dikembangkan hampir di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 145.004 hektar, terdiri atas: 1) perkebunan karet meliputi perkebunan besar dengan luas kurang lebih 4.335 hektar dan perkebunan rakyat dengan luas kurang lebih 37.907 hektar; 2) kelapa sawit meliputi perkebunan besar dengan luas kurang lebih 32.589 hektar dan perkebunan rakyat dengan luas kurang lebih 5.157 hektar; 3) perkebunan lada dengan luas kurang lebih 738 hektar; 4) perkebunan kopi dengan luas kurang lebih 61.997 hektar; 5) perkebunan kakau dengan luas kurang lebih 1.100 hektar; 6) perkebunan kelapa dengan luas kurang lebih 810 hektar; 7) kemiri dengan luas kurang lebih 89 hektar; 8) kayu manis dengan luas

kurang lebih 161 hektar; 9) cengkeh dengan luas kurang lebih 60 hektar; dan 10) pinang dengan luas kurang lebih 61 hektar.

- Kawasan peruntukan peternakan meliputi peternakan sapi, kambing dan unggas dengan skala rumah tangga yang diarahkan pada seluruh kecamatan.

c) Kawasan peruntukan perikanan, meliputi:

- Kawasan perikanan tangkap meliputi pengembangan kegiatan perikanan tangkap di perairan sungai dan pengembangan kegiatan perikanan tangkap di danau, tebat, cekdam, embung, dan/atau waduk.
- Kawasan peruntukan perikanan budidaya, terdiri dari budidaya perikanan kolam air tenang meliputi Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Mulak Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Gumay Ulu, Kecamatan Suka Merindu, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Muara Payang, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Kikim Barat, Kecamatan Gumay Talang, Kecamatan Lahat, Kecamatan Merapi Barat, Kecamatan Merapi Timur, dan Kecamatan Merapi Selatan.
- Budidaya perikanan kolam air deras meliputi Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Mulak Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Suka Merindu, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Muara Payang, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Lahat, dan Kecamatan Merapi Selatan.
- Budidaya perikanan sawah meliputi Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Mulak Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Suka Merindu, Kecamatan Jarai, Kecamatan Pajar Bulan, Kecamatan Muara Payang, Kecamatan Kikim Selatan, Kecamatan Lahat, dan

Kecamatan Merapi Selatan.

- d) Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi, kawasan peruntukan pertambangan mineral, kawasan peruntukan perambangan batubara, dan kawasan peruntukan pertambangan panas bumi.
- Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi terdapat di Kecamatan Merapi Timur, Kecamatan Merapi Barat, Kecamatan Lahat, Kecamatan Kikim Timur, Kecamatan Kikim Barat, Kecamatan Kikim Tengah, Kecamatan Gumay Talang dan Kecamatan Pulau Pinang.
 - Kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi kawasan pertambangan bukan logam dan batuan yang terdapat di Kecamatan Pagar Gunung, Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Merapi, Kecamatan Pagun, Kecamatan Merapi Barat, dan Kecamatan Merapi Timur, Kecamatan Kota Agung.
 - Kawasan peruntukan pertambangan batubara terdapat di Kecamatan Merapi Timur, Kecamatan Merapi Barat, Kecamatan Merapi Selatan dan Kecamatan Lahat.
 - Rencana kawasan peruntukan pertambangan panas bumi berlokasi di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi.
- e) Kawasan peruntukan industri terdiri dari kawasan peruntukan industri sedang dan kawasan peruntukan industri kecil.
- Kawasan peruntukan industri sedang meliputi industri pengolahan batu kali dan krikil yang terletak di Kecamatan Lahat, Kecamatan Merapi Barat dan Kecamatan Pulau Pinang.
 - Kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga meliputi industri pengolahan anyaman bambu, tahu, tempe, kerupuk, rotan dan ukiran kayu terletak di Kecamatan Kikim Barat dan Kecamatan Lahat.
- f) Kawasan peruntukan pariwisata meliputi kawasan wisata budaya dan wisata alam.

- Kawasan peruntukan pariwisata budaya berlokasi :1) Kecamatan Lahat yang memiliki objek wisata budaya batu kepala putri, batunaga, batu orang roboh, batu kodok, batu gajah tidur, batu tapak orang belobang, batu lesung, meja batu dan rumah batu; 2) Kecamatan Merapi Barat, Merapi Timur dan Merapi Selatan yang memiliki objek wisata budaya putri menjemur padi, makam serunting sakti, perahu kuno, batu kursi, makam dayang rindu, batu kambing, makam jaga lawang, makam hulu baling dan makam intan permata; 3) Kecamatan Kota Agung dan Kecamatan Tanjung Tebat yang memiliki objek wisata budaya batu ngeri celeng, lobang tiga orang, puri menangis, batu behambing dan batu kerbau; 4) Kecamatan Tanjung Sakti PUMI dan Kecamatan Tanjung Sakti PUMU yang memiliki objek wisata budaya batu tiang enam, ngarai, suaka alam, Makam Puyang Batu, dan perkebunan kopi bukit timur; 5) Kecamatan Jarai dan Kecamatan Pajar Bulan yang memiliki objek wisata budaya batu lumping gajah, pemandian putri, rumah batu hanebat dan batu langgar; 6) Kecamatan Kikim Timur yang memiliki objek wisata budaya makam puyang raden gede dan makam Syekh Salman; 7) Kecamatan Gumay Ulu yang memiliki objek wisata budaya Megalith Kuhut Majapahit, Megalith Parajutri, Megalith Tinjak Banyak; dan 8) Kecamatan Pagar Gunung yang memiliki objek wisata budaya Rumah Bahi dan Candi Dayang Rindu.
- Kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri atas 1) Kecamatan Lahat yang memiliki objek wisata alam taman rekreasi ribang kemambang, gua sarang walet dan air terjun; 2) Kecamatan Merapi Barat dan Kecamatan Merapi Selatan yang memiliki objek wisata alam bukit serelo, pusat pelatihan gajah, Bukit Besar, Air Terjun Hujan Panas, Air Terjun Berdarah, Air Terjun Uhang, Air Terjun Mata Putri, Air Sumur; 3) Kecamatan Kota Agung yang memiliki objek wisata alam bukit rancing, Curup Nelindang, Curup Air Kerinjing, Tebat Bukit, Curup Air Tupai, danau batu dan tebat besar; 4) Kecamatan Tanjung Sakti PUMI dan Kecamatan Tanjung Sakti Pumu yang memiliki objek wisata alam

air panas, tebat besar, Curup Kabuhan, Curup Merundingan, Curup Perampangan, Curup Air Anak, dan Air Terjun Singgah Kudai;

5) Kecamatan Jarai dan Kecamatan Muara Payang yang memiliki objek wisata alam Air Terjun Cambai, ngarai, suaka alam, Batu Megalit dan perkebunan kopi bukit timur; 6) Kecamatan Kikim Selatan yang memiliki objek wisata alam bukit seping tiang; 7) Kecamatan Gumay Ulu yang memiliki objek wisata alam Taman Tinggi Hari I, II, dan III, Taman Nik Kambing, Curup Lintang, Curup Maung, Curup Buluh, dan Curup Pasemah; 8) Kecamatan Pseksu yang memiliki objek wisata alam Curup 9 Panggung, Goa Suruman, Curup Tinggi Suban, dan Goa Bukit Semping Tiang; 9) Kecamatan Muara Payang yang memiliki objek wisata alam Curup Lawang Agung dan Lubuk Buntak; 10) Kecamatan Mulak Ulu yang memiliki objek wisata alam Air Terjun Penengan, Air Terjun Dayang Rindu, Air Terjun Air Bais, Air Terjun Napalan, Megalith Batu Kerbau, Goa Suhuman, Tebat Besar, dan Tebat Bengkuang;

- Kecamatan Pulau Pinang yang memiliki objek wisata alam Air Terjun Air Salak, Curup Pemandian 7 Bidadari, Curup Gunung Nyawe, Curup Kunduran, Megalitik, dan Air Panas.

- Kecamatan Pagar Gunung yang memiliki objek wisata alam Marung Batu, Curup Bemban, Air Pans, Curup Laye dan Gua Laye, Curup Air Ugul Besak, Curup Air Ugul Kecil, Batu macan, Ribang Gayau, Gua Masanap Masaris, Tunggul Bute, dan Air Panas Kembuhak; 13) Kecamatan Tanjung Tebat yang memiliki objek wisata alam Curup Cadas Pelangi, Air Terjun Tiga Tingkat, Danau Batu, Wahana Wisata Water Park.

- g) Kawasan peruntukan permukiman seluas 18.549 hektar meliputi kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan berada di setiap pusat ibukota kecamatan dan kawasan permukiman perdesaan menyebar di setiap kecamatan.
- h) Kawasan peruntukan lainnya adalah kawasan latihan militer terletak di Kecamatan Lahat dan kawasan peruntukan untuk Polres dan Polsek yang berada di jalan lintas Sumatera Desa Manggul Kecamatan Lahat

serta Kawasan Pemerintahan di Kecamatan Lahat dan Merapi Barat.

4.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Bencana alam yang terjadi tidak hanya disebabkan karena faktor alam melainkan juga disebabkan karena faktor ulah tangan manusia tanpa memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan, karena dampak dari bencana itu sendiri akan kembali ke manusia dan merugikan dari berbagai aspek baik ekonomi, sosial maupun budaya.

Kabupaten Lahat merupakan daerah yang memiliki ketinggian yang relatif bervariasi yaitu berkisar antara 0->300 meter di atas permukaan laut dan juga memiliki gunung berapi aktif dan juga berapa sehingga menjadikan Kabupaten Lahat berpotensi rawan bencana alam banjir, karhutla, letusan gunung berapi, longsor dan gempa bumi. Sementara itu wilayah yang berpotensi rawan bencana banjir seluas 175.929,12 hektar, rawan bencana karhutla seluas 128.150,19 hektar, rawan bencana letusan gunung berapi seluas 1.044,11 hektar, rawan bencana longsor seluas 123.278,30 hektar dan rawan bencana gempa bumi seluas 4.248,26 hektar.

Tabel 4.6. Luas Kawasan Bahaya Bencana di Kabupaten Lahat

No	Bahaya Bencana	Luas Ha
1	Banjir	175.929,12
2	Longsor	123.278,30
3	Karhutla	128.150,19
4	Letusan Gunung Berapi	1.044,11
5	Gempa Bumi	4.248,26

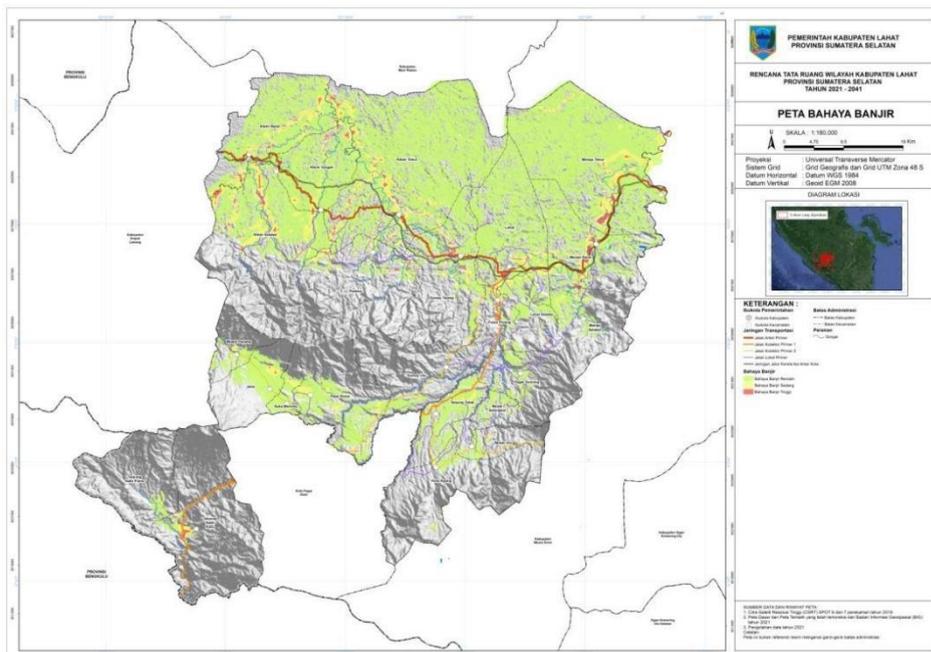
Sumber: Inasrisk, Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam KLHS Lahat 2019-2023

4.1.1.9 Kejadian Bencana Kabupaten Lahat dan Sekitarnya

Provinsi Sumatera Selatan juga mengalami mengalami bencana banjir pada tahun 2020 dan 2021. Sedangkan wilayah sekitar Kabupaten Lahat salah

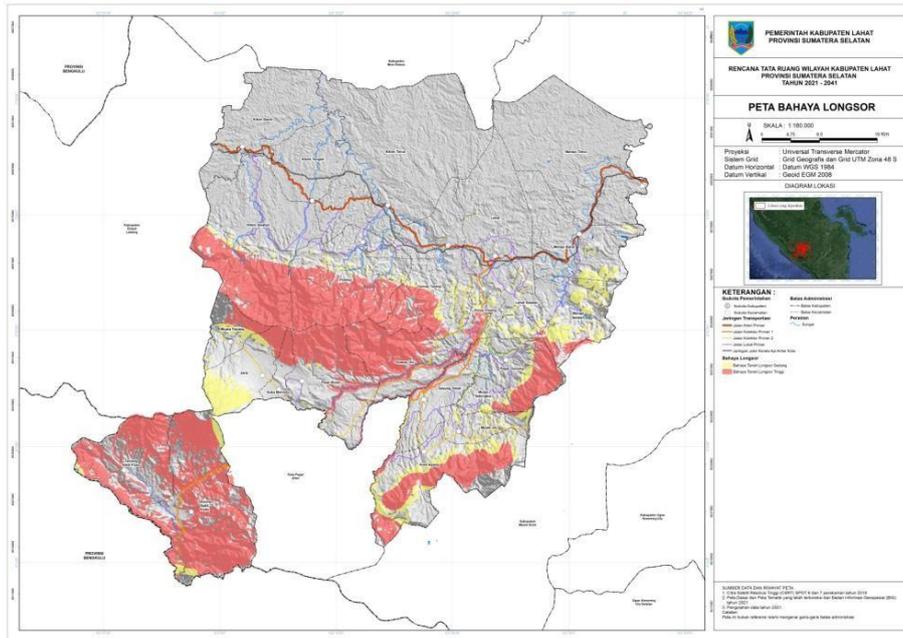
satunya Propinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan dimana bencana alam yang sering terjadi adalah bencana alam Gempa Bumi yang terjadi pada tahun 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2020 yang berdampak terjadinya kerusakan bangunan rumah warga.

Berdasarkan data BNPB sepanjang tahun 2019-2020 wilayah Kabupaten Lahat mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Salah satunya yaitu bencana banjir bandang yang terjadi pada pukul 05.00 WIB, tanggal 30 Desember 2019 yang melanda 3 (tiga) desa diantaranya Desa Keban Agung, Desa Lesung Batu dan Desa Pengantaan. Kemudian bencana banjir bandang yang terjadi pada pukul 04.00 WIB, Tanggal 09 Januari 2020 yang melanda 4 (empat) kecamatan diantaranya Kecamatan Pulau Pinang, Kecamatan PSEKSU, Kecamatan Gumay Talang dan Kecamatan Kikim Timur. Selanjutnya terjadi banjir bandang dan tanah longsor pada pukul 10.00 WIB, Tanggal 7 Februari 2020 yang melanda Desa Batay, Desa Ngalam Baru, Desa Mandi Angin, Desa Gunung Kembang dan Desa Jati.



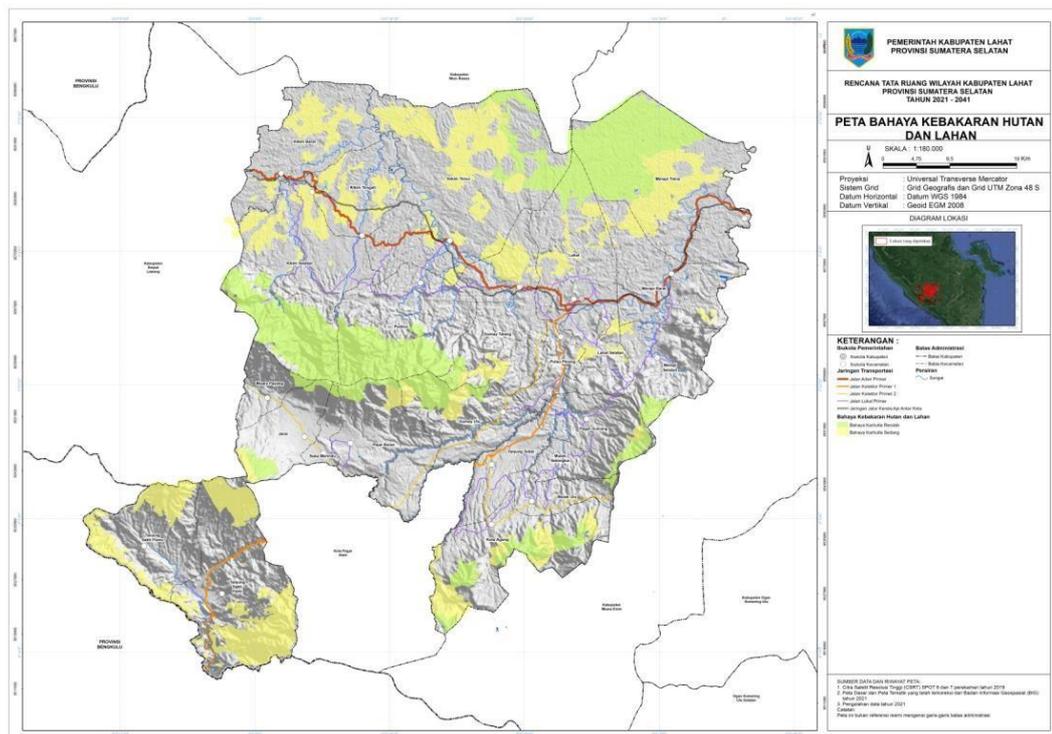
Gambar 4.2. Peta Daerah Banjir

Sumber : KLHS Kab. Lahat 2019-2023



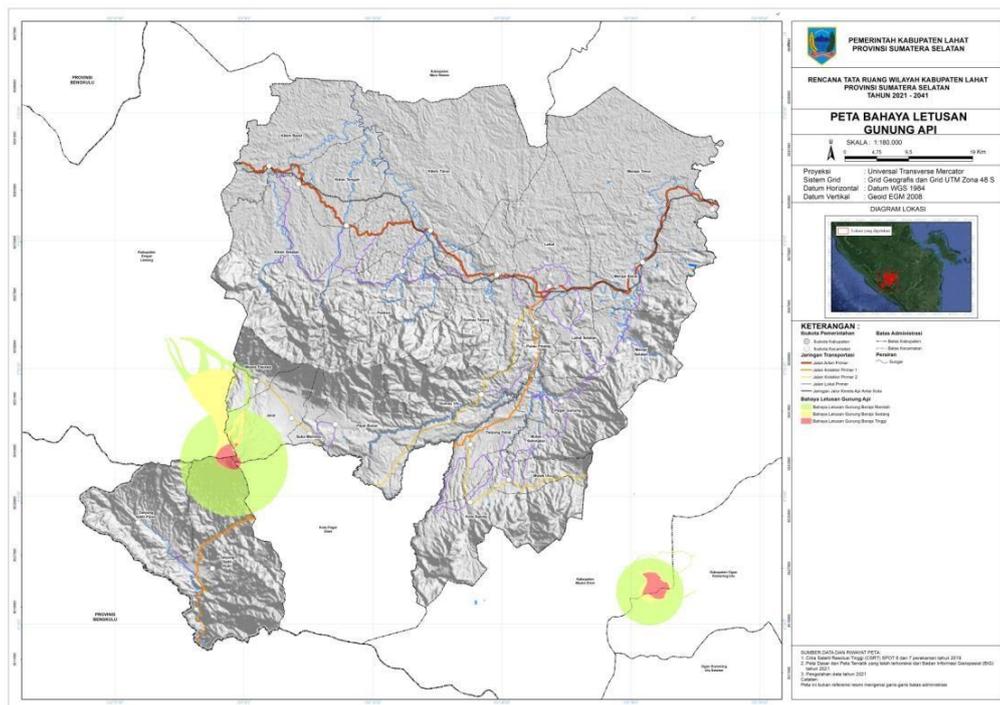
Gambar 4.3. Peta Bahaya Longsor

Sumber : KLHS Kab. Lahat 2019-2023

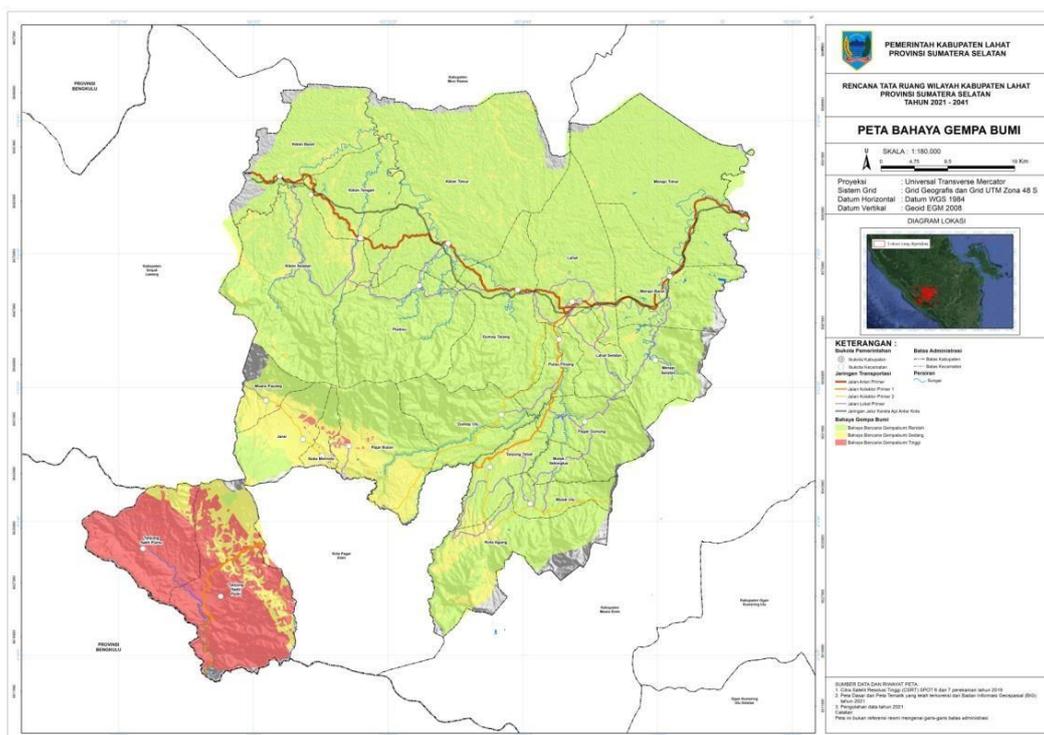


Gambar 4.4. Peta Rawan Karhutla

Sumber : KLHS Kab. Lahat 2019-2023



Gambar 4.5. Peta Gunung Berapi
 Sumber : KLHS Kab. Lahat 2019-2023



Gambar 4.6 Peta Rawan Gempa Bumi
 Sumber : KLHS Kab. Lahat 2019-2023

2.6. 4.2 Demografi

Kondisi dan perkembangan demografi berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Secara umum jumlah penduduk Kabupaten Lahat pada kurun waktu Tahun 2014-2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Lahat mencapai 439.567 jiwa yang terdiri atas 224.884 jiwa penduduk laki-laki dan 214.683 jiwa penduduk perempuan.



Gambar 4.7 Persentase Penduduk di Kabupaten Lahat

Sumber : Kabupaten Lahat Dalam Angka 2022

Untuk mengetahui jumlah penduduk serta laju pertumbuhan, digambarkan dalam grafis berikut:

Tabel 4.6
Laju Populasi Penduduk per Tahun

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanjung Sakti Pumi	16,82	16,94	1,09	0,96
Tanjung Sakti Pumu	14,52	14,60	0,89	0,69
Kota Agung	13,62	13,74	1,23	1,15
Mulak Ulu	12,57	12,66	1,05	0,90
Tanjung Tebat	8,82	8,90	1,28	1,21
Mulak Sebingkai	5,71	5,73	0,81	0,58
Pulau Pinang	9,87	10,04	2,17	2,40
Pagar Gunung	12,95	13,04	1,10	0,97
Gumay Ulu	5,58	5,62	1,09	0,96
Jarai	20,51	20,56	0,63	0,34
Pajar Bulan	12,85	12,94	1,03	0,88
Muara Payang	8,90	8,93	0,64	0,36
Sukamerindu	8,05	8,08	0,84	0,63
Kikim Barat	17,90	18,18	1,92	2,07
Kikim Timur	31,99	32,52	2,02	2,20
Kikim Selatan	17,34	17,54	1,54	1,56
Kikim Tengah	10,05	10,21	1,99	2,16
Lahat	107,51	108,13	0,95	0,78
Gumay Talang	12,94	13,24	2,72	3,13
Pseksu	9,04	9,12	5,00	1,18
Lahat Selatan	13,21	13,82	1,25	6,19
Merapi Barat	25,70	26,27	2,57	2,93
Merapi Timur	25,23	25,66	2,07	2,27
Merapi Selatan	8,39	8,47	1,32	1,26
Kabupaten Lahat/ Lahat Regency	430,07	434,94	1,47	1,51

Sumber: Lahat Dalam Angka, 2022

Bertambahnya jumlah penduduk per tahun di Kabupaten Lahat menyebabkan bertambahnya masalah kependudukan terutama dalam penyediaan pelayanan dasar, perumahan dan permukiman, penyediaan prasarana dan penyediaan lapangan pekerjaan.

4.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan

olahraga. Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lahat dapat dilihat dari capaian kinerja indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lahat.

4.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

4.3.1.1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

4.3.1.2 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah kumulatif nilai tambah bruto dari seluruh lapangan usaha. Namun dari hitungan – hitungan tersebut PDRB dapat diartikan sebagai kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan barang dan jasa dari seluruh kegiatan ekonomi yang ada, karenanya PDRB merupakan cerminan perekonomian suatu wilayah. Dimana PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat struktur ekonomi sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi.

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Lahat akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada kurun waktu 2014 s.d 2021, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Berdasarkan data BPS, PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas Kabupaten Lahat tahun 2021 terhitung sebesar 118.613,33 trilyun rupiah atau tumbuh sebesar 7.4 persen dari tahun sebelumnya (2020). Angka tersebut menggambarkan besarnya nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga di tahun 2021. Sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan sebesar 13.002,37 trilyun rupiah dengan pertumbuhan 3.6 persen.

Persentase distribusi PDRB atas harga berlaku yang paling terbesar adalah di lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan nilai 35,74 persen. Sedangkan, sektor yang paling sedikit adalah disektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu sebesar 0.03 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lahat tahun 2021 mencapai 4,63 persen.\

Grafik 4.1

Perkembangan PDRB Kabupaten Lahat Tahun 2016-2021



Sumber : Kabupaten Lahat Dalam Angka 2022

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Lahat atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2021 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 PDRB Kab Lahat atas harga berlaku tercatat sebesar 15,035 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai

18,613 juta rupiah

4.3.1.3 Laju Inflasi

Laju inflasi atau naik turunnya tingkat harga barang dan jasa digunakan untuk melihat stabilitas perekonomian yang terjadi di daerah. Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Secara teori pada dasarnya berkaitan dengan fenomena interaksi antara penawaran dan permintaan. Namun pada kenyataannya tidak terlepas dari faktor-faktor lainnya, seperti tata niaga dan kelancaran dalam arus lalu lintas barang serta peranan kebijaksanaan pemerintah antara lain tidak stabilnya harga BBM dan gas, tarif dasar listrik dan adanya krisis ekonomi global yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempercepat laju inflasi semua sektor di Kabupaten Lahat.

Secara umum tingkat inflasi dihitung untuk melihat perubahan harga-harga konsumen pada berbagai komoditas. Komoditas tersebut dikelompokkan menjadi 7 kelompok yaitu: kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kelompok perumahan, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, dan kelompok transportasi.

Untuk mengukur laju inflasi diperlukan survey biaya hidup dan juga survey kebutuhan pasar untuk mengetahui harga konsumen. Di Kabupaten Lahat tidak melaksanakan survey tersebut, sehingga untuk mengetahui laju inflasi di Kabupaten Lahat, digunakanlah data dari Kota Lubuk Linggau sebagai kota terdekat dari Lahat sebagaimana berikut :

Tabel 4.7
Laju Inflasi Bulanan Kabupaten Lahat

Bulan Month	Makanan, Minuman dan Tembakau Food, Beverages and Tobacco	Pakaian dan Alas Kaki Clothing and Footwear	dan Bahan Bakar Rumah Tangga Housing, Water, Electricity, and Household Fuels
(1)	(2)	(3)	(4)
Januari/January	1,00	-0,04	-0,24
Februari/February	-0,49	0,05	-0,12
Maret/March	-0,03	0,00	0,08
April/April	0,56	0,39	0,29
Mei/May	0,05	1,00	0,21
Juni/June	-0,41	0,01	-0,01
Juli/July	-0,49	0,00	0,10
Agustus/August	-0,87	0,12	0,26
September/September	0,19	0,01	0,53
Oktober/October	0,28	0,02	0,95
November/November	0,86	0,08	-0,12
Desember/December	1,03	0,00	0,00
2021	0,54	0,10	0,36

Sumber: Kabupaten Lahat Dalam Angka 2022

4.3.1.4 PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB dan PDRB perkapita Kabupaten Lahat tahun 2017-2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 4.8

PDRB Kabupaten Lahat menurut lapangan usaha

Lapangan Usaha/Industry	2017	2018	2019	2020 *	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	2 677,44	2 740,91	2 784,01	2 813,21	2 921,36
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	4 049,51	4 247,58	4 629,03	4 702,86	5 068,88
C Industri Pengolahan/Manufacturing	482,26	508,57	532,18	540,53	549,90
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	43,31	51,35	59,49	68,96	74,08
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	3,04	3,26	3,54	3,74	3,78
F Konstruksi/Construction	908,82	929,18	953,53	970,15	976,93
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	1 177,45	1 251,24	1 362,14	1 263,97	1 310,02
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	117,39	119,40	122,43	114,57	116,32
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	112,69	122,49	134,83	125,35	131,37
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	112,62	114,93	120,40	130,32	135,28

Lapangan Usaha/Industry	2017	2018	2019	2020 *	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	185,33	187,75	189,96	191,38	193,28
L Real Estat/Real Estate Activities	289,49	299,20	308,60	306,35	313,91
M,N Jasa Perusahaan/Business Activities	4,69	4,95	5,23	5,08	5,21
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	616,42	639,11	650,55	662,69	665,01
P Jasa Pendidikan/Education	335,89	348,23	362,89	355,99	360,96
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	93,40	95,87	99,95	105,98	109,06
R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Services Activities	55,55	59,68	63,60	66,31	67,04
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	11 265,29	11 723,72	12 382,33	12 427,42	13 002,37

Sumber: Kabupaten Lahat Dalam Angka 2022

4.3.1.5 Indeks Gini

Koefisien gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Dimana, ketimpangan pembangunan atau disparitas dapat menggambarkan perbedaan pembangunan antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidakmerataan pembangunan.

Kabupaten Lahat tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga berupaya menekan kesenjangan dan meningkatkan pemerataan ekonomi. Gini rasio menggambarkan kesenjangan ekonomi di suatu wilayah. Semakin kecil angka gini rasio berarti pemerataan ekonomi semakin baik. Perkembangan gini rasio Kabupaten Lahat dalam kurun waktu 2019-2021 mendorong Pemerintah untuk pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan, maka aktivitas pembangunan ekonomi daerah termasuk daerah terbelakang atau terisolir akan dapat lebih digerakkan karena adanya wewenang yang ada pada pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Pada tahun 2019 – 2020 Gini rasio Kabupaten Lahat stagnan di angka 0,33 dan mulai membaik pada tahun 2021 dengan Gini rasio sebesar 0,30. Gini Rasio Kabupaten Lahat pada tiga tahun terakhir lebih baik dari Provinsi Sumsel dan Nasional.

Tabel 4.9 Indeks Gini Kabupaten Lahat Tahun 2019-2021

Indeks Gini	2019	2020	2021
Kabupaten Lahat	0,33	0,33	0,30
Provinsi Sumsel	0,33	0,34	0,34
Nasional	0,38	0,38	0,38

Sumber : Badan Pusat Statistik 2022

4.3.1.5 Kemiskinan

Penduduk miskin Kabupaten Lahat pada kurun waktu 2014-2021 mengalami penurunan dari 18,02% di tahun 2014 menurun menjadi 16,46% pada tahun 2021. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan presentasi penduduk miskin mencapai 15,92 dan angka tersebut naik sampai mencapai angka 16,46% pada tahun 2021. Kenaikan tersebut salah satunya diakibatkan oleh pandemi covid-19 yang membuat perekonomian dunia anjlok termasuk naiknya angka kemiskinan daerah dan juga nasional. Belum signifikannya penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Lahat antara lain disebabkan karena program-program penanggulangan kemiskinan belum berorientasi pada pembangunan kapasitas masyarakat dan pengembangan modal sosial pada masyarakat miskin serta bantuan sosial yang belum tepat sasaran.

4.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial dapat dievaluasi dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini ditunjukkan melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

4.3.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang umum digunakan untuk menilai kualitas hidup manusia. ada 3 aspek yang menjadi dimensi pengukuran IPM yaitu : umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Secara umum IPM di Kabupaten Lahat masih kalah dibandingkan dengan IPM Provinsi Sumsel dan IPM Nasional. Begitu juga dengan IPM Kab. Lahat tahun 2019-2021 yang mengalami penurunan dari 67,62 pada tahun 2019, menurun 67,44 tahun 2020, dan meningkat sedikit pada tahun 2021 sebesar 67,58.

**Tabel 4.10 Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Lahat Tahun 2019-2021**

IPM	2019	2020	2021
Kabupaten Lahat	67,62	67,4 4	67,58
Provinsi Sumsel	70,02	70,0 1	70,24
Nasional	71,92	71,9 4	72,29

Sumber : Badan Pusat Statistik 2022

Berikut adalah perbandingan IPM kabupaten /kota di Provinsi Sumatera Selatan.

**Grafik 4.3
IPM Kabupaten Lahat 2022**



Sumber : BPS 2022

Untuk memperbaiki IPM suatu daerah, diperlukan penanganan serius khususnya pada 3 dimensi pengukuran IPM. IPM sendiri terdiri dari tiga unsur yaitu pendidikan yang diukur dengan tingkat partisipasi pendidikan, kesehatan yang diukur dengan tingkat kematian ibu dan juga daya beli. Pemerintah daerah harus terus meningkatkan pelayanan dasar baik bidang pendidikan dan juga bidang kesehatan. Selain itu, dukungan infrastruktur juga sangat berpengaruh untuk mendukung pembangunan daerah. Perlu adanya pemetaan secara serius untuk melihat dimensi mana yang masih kurang dan strategi apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas baik dibidang pendidikan, kesehatan maupun daya beli masyarakat.

4.3.2.2 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu fokus kesejahteraan sosial. Pendidikan merupakan kunci utama dalam perkembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas merupakan hak setiap warga negara sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Selain itu, pendidikan juga merupakan kebutuhan mendasar untuk berkembangnya suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, peningkatan serta penyempurnaan pendidikan perlu dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, beriman, bertaqwa, dan bertanggungjawab.

Dukungan pemerintah daerah juga sangat besar dalam rangka memajukan pendidikan, yaitu melalui program pendidikan gratis mulai dari tingkat SD sampai SLTA dengan harapan tingkat pendidikan penduduk akan semakin baik. Kesemuanya itu berangkat dari kesadaran akan pentingnya pendidikan baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Bagi pemerintah keuntungan yang akan diperoleh dari investasi di bidang pendidikan antara lain bahwa pendidikan merupakan salah satu cara dalam rangka memerangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan bagi masyarakat, pendidikan yang semakin baik merupakan modal dalam memperebutkan kesempatan kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan mereka.

4.3.2.2.1 Fasilitas Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan partisipasi sekolah penduduk, harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Selain fasilitas berupa gedung sekolah, ketersediaan tenaga pengajar/guru, merupakan faktor penting dalam kegiatan belajar mengajar. Jumlah sekolah dikatakan memadai apabila dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah yang akan melanjutkan pendidikan, demikian juga dengan jumlah guru dianggap memadai apabila mencapai tingkat perbandingan tertentu

terhadap murid sedemikian sehingga proses belajar mengajar berjalan efektif. Untuk itu indikator yang sering digunakan untuk melihat tingkat kecukupan sekolah adalah rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah. Daya tampung sekolah SD, SLTP, dan SMA Sederajat dikatakan sudah semakin baik, jika ditandai dengan rasio murid-sekolah yang semakin kecil. Hal ini dikarenakan jumlah murid yang sekolah bertambah lebih sedikit atau sejalan dengan peningkatan jumlah gedung sekolah yang ada. Begitu juga dengan Rasio murid-guru menggambarkan rata-rata jumlah murid yang diajar oleh seorang guru. Semakin besar rasio, berarti secara rata-rata semakin banyak murid yang diajar oleh seorang guru. Angka rasio semakin kecil maka akan semakin baik pula.

Pada tahun 2018, angka rasio murid-sekolah Kabupaten Lahat untuk SD sederajat sebesar 148,128; SMP sederajat sebesar 249,772 dan SMA sederajat 353,339 siswa persekolah. Sedangkan rasio murid-guru untuk SD sederajat sebesar 1:09; SMP sederajat sebesar 1:12 dan SMA sederajat 1:12 siswa per guru. Jika dibandingkan dengan angka rasio murid-sekolah Kabupaten Lahat tahun 2014, maka capaian rasio murid-sekolah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2014, rasio murid-sekolah untuk SD sederajat sebesar 158,06 yang artinya ketersediaan sekolah menampung murid sekolah SD pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Begitu pula halnya dengan ketersediaan gedung SMP sederajat dan SMA sederajat. Dimana perkembangan rasio murid-sekolah SMP sederajat dan SMA sederajat pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan dari tahun 2014. Sedangkan untuk perkembangan rasio murid-guru kurun waktu 2014-2018 pada SD sederajat, SMP sederajat dan SMA sederajat mengalami penurunan dan masih perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Rasio murid-guru pada tahun 2018 lebih besar daripada rasio murid-guru pada tahun-tahun sebelumnya. Artinya jumlah murid yang sekolah lebih banyak dari pada ketersediaan guru yang ada saat ini. Dengan demikian, seiring bertambahnya masyarakat yang bersekolah saat ini harus diiringi dengan ketersediaan gedung sekolah dan ketersediaan tenaga

pengajar/guru karena merupakan faktor sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Secara rinci jumlah sekolah, guru, dan murid yang sekolah pada SD, SMP dan SMA sederajat.

4.3.2.2.2 Angka Partisipasi Sekolah

Pembangunan di bidang pendidikan memerlukan peran serta yang aktif tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat. Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada dapat dilihat dari persentase penduduk yang masih bersekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan angka partisipasi sekolah. Meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

a) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar menurut jenjang pendidikan mengukur banyaknya penduduk yang bersekolah dalam suatu jenjang pendidikan dari setiap 100 penduduk usia sekolah. APK untuk Sekolah Dasar tahun 2021 mencapai lebih dari 100 persen yaitu 109,75 persen. Hal ini dikarenakan adanya anak usia kurang dari 7 tahun telah duduk di bangku SD sederajat atau penduduk usia lebih dari 12 tahun yang masih bersekolah di SD sederajat, sehingga jumlah murid SD sederajat lebih banyak dibanding jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Sedangkan untuk tingkat SMP sederajat pada tahun 2021 APK sebesar 94,48 persen dan APK SMA sederajat sebesar 82,34 persen.

b) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan merupakan perbandingan antara banyaknya murid pada masing-masing jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok umur untuk jenjang pendidikan yang bersangkutan (7-12 untuk SD, 13-15 untuk SMP dan 16-18 untuk SLTA). Karena itu, APM untuk tiap jenjang pendidikan pada umumnya lebih rendah bila dibandingkan dengan angka partisipasi kasar (APK). Angka Partisipasi Murni (APM) bermanfaat untuk mengukur

proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Pada tahun 2021 APM Sekolah Dasar sebesar 98,83 persen. Hal ini menunjukkan banyaknya anak usia 12 tahun yang telah duduk di bangku SD. Sedangkan untuk jenjang SMP dan SMA angkanya masing-masing sebesar 86,98 persen dan 67,85 persen. Rendahnya APM juga menunjukkan banyaknya murid yang duduk di jenjang pendidikan yang tidak sesuai dengan kelompok usianya.

4.3.2.2.3 Angka Melek Huruf

Berdasarkan data BPS Kab. Lahat, angka melek huruf mencapai 98,85%. Dari segi kelompok umur, pada usia 15-24 tahun angka melek huruf mencapai 100%. Pada usia 45 ke atas angka melek huruf mencapai 97,23.

4.3.2.3 Kesehatan

4.3.2.3.1 Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Standar UNDP besarnya adalah $25 < x > 85$ (minimal 25 tahun dan maksimal 85 tahun). Angka harapan hidup menunjukkan peluang lamanya hidup seseorang dari lahir sampai mati, dinyatakan dalam satuan tahun hidup. merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Untuk itu diperlukan akselerasi peningkatan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan lain sebagainya.

Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Lahat kurun waktu 2018-2021 menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya. Tahun 2019, Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Lahat sebesar 65,76 tahun meningkat menjadi sebesar 66,04 tahun di tahun 2020, dan pada tahun 2021 sebesar 66,16.

4.3.2.3.2 Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah kondisi tubuh terparah yang mengalami kekurangan gizi dalam kurun waktu yang lama (menahun). Hal ini umumnya terjadi pada anak-anak, gizi buruk pada anak seringkali disebabkan oleh kurangnya asupan makanan bergizi seimbang, di samping itu bisa juga disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan terganggunya proses pencernaan makanan ataupun terganggunya penyerapan zat gizi penting yang diperlukan oleh tubuh. Persentase balita gizi buruk Kabupaten Lahat pada tahun 2018 sebesar 0,13 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 0,001 persen (target ≤ 1).

Kondisi gizi sangat menentukan status kesehatannya, karena status gizi merupakan keadaan dari struktur tubuh dan metabolisme yang dipengaruhi oleh zat gizi dalam makanan yang dikonsumsi. Status gizi buruk diharapkan akan terus mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pemerintah Kabupaten Lahat akan terus berupaya menurunkan status gizi buruk melalui program perilaku sehat dan pemberdayaan penduduk, program upaya kesehatan dan perbaikan gizi penduduk. Salah satu penyebab anak kurang gizi adalah penyakit infeksi, meskipun besaran dan pola penyakit untuk setiap daerah bervariasi, tergantung dari lingkungan dan perilaku kebiasaan masyarakat dalam hidup sehat. Sedangkan penyebab tidak langsung adalah rendahnya daya beli dan keterbatasan pengetahuan tentang pangan yang bergizi. Karena itu, diharapkan juga dengan adanya program pemerintah tentang pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau diharapkan dapat mengatasi jumlah balita gizi buruk.

4.3.2.4 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan perekonomian daerah. Data dan indikator ketenagakerjaan menggambarkan bagaimana kemampuan perekonomian suatu daerah dalam menyediakan lapangan kerja bagi penduduknya yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan penurunan angka kemiskinan. Selain itu, dari data ketenagakerjaan juga dapat menunjukkan struktur perekonomian daerah, dimana hal tersebut

merupakan salah satu indikator kemajuan perekonomian daerah tersebut.

Beberapa indikator ketenagakerjaan untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Lahat seperti Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK), angka pengangguran dan distribusi sektoral tenaga kerja. Dalam analisis ini digunakan batasan umur penduduk usia kerja adalah penduduk 15 tahun ke atas, sesuai dengan Konvensi ILO No. 138 yang membatasi usia minimum yang diperbolehkan untuk bekerja adalah 15 tahun ke atas.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan proporsi penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja, yakni mereka yang bekerja dan menganggur. Ukuran ini secara kasar dapat menerangkan kecenderungan tenaga kerja untuk aktif bekerja atau mencari kerja yang sifatnya mendatangkan kesempatan berpenghasilan baik berupa uang atau barang. Makin besar angka TPAK mengindikasikan peningkatan kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk memasuki angkatan kerja atau melakukan kegiatan ekonomi. Jumlah penduduk usia kerja, kebutuhan penduduk untuk bekerja, dan berbagai faktor sosial, ekonomi dan demografis merupakan faktor utama yang mempengaruhi angka TPAK.

Jika dilihat dari jumlah angkatan kerja di Kabupaten Lahat pada kurun waktu tahun 2014-2017 berdasarkan penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan utama menunjukkan peningkatan yaitu dari tahun 2014 berjumlah 184.770 orang meningkat menjadi 201.240 orang pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan penduduk usia ekonomi aktif yang mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi jauh lebih banyak.

Perkembangan TPAK Kabupaten Lahat kurun waktu 2014- 2017 yaitu pada tahun 2014 mencapai 70,66% meningkat menjadi 72,74% di tahun 2017. Peningkatan TPAK dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti peningkatan partisipasi sekolah penduduk. Di daerah-daerah dengan struktur perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian, angka TPAK juga erat hubungannya dengan fluktuatifnya kegiatan di bidang pertanian. Bila referensi waktu survei bertepatan dengan pekerjaan yang membutuhkan keterlibatan banyak tenaga kerja seperti pada saat tanam atau panen, maka kecenderungan TPAK menjadi tinggi.

Sebaliknya bila referensi waktu survei bertepatan dengan saat menunggu panen misalnya, maka TPAK akan cenderung rendah.

Menelaah masalah TPAK, yang menarik adalah melihat TPAK penduduk perempuan, sedangkan TPAK laki-laki bersifat universal karena setiap laki-laki dewasa dituntut untuk mencari nafkah baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Sedangkan TPAK perempuan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya pendidikan perempuan, terbukanya kesempatan kerja bagi perempuan, meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat, seperti pandangan terhadap perempuan yang bekerja di luar rumah dan sebagainya. TPAK penduduk perempuan di Kabupaten Lahat pada tahun 2017 sebesar 59,47 persen. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang angkanya sebesar 60,26 persen. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah angkatan kerja wanita yang sedang mencari pekerjaan.

Salah satu isu dalam ketenagakerjaan, disamping keadaan angkatan kerja dan struktur ketenagakerjaan adalah pengangguran. Pengangguran dari sisi ekonomi merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relative terbatas tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Angka pengangguran yang tinggi tidak hanya menimbulkan berbagai masalah di bidang ekonomi saja melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Lahat berfluktuasi, pada tahun 2017 sebesar 4,33 persen, angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang angkanya sebesar 5,62 persen. Pengangguran terbuka (*open unemployment*) adalah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja (15 tahun keatas) yang sedang mencari pekerjaan (belum bekerja), penduduk sedang mempersiapkan usaha (tidak bekerja), penduduk yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, serta penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa).

Penurunan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Lahat tersebut terutama disebabkan oleh angka pengangguran penduduk laki-

laki, yaitu dari 5,98 persen tahun 2014 menjadi 4,43 persen tahun 2017. Demikian juga dengan angka pengangguran pada penduduk perempuan turun dari 5,07 persen tahun 2014 menjadi 4,16 persen tahun 2017. Penurunan ini terjadi disinyalir karena banyaknya perusahaan pertambangan dan angkutan batu bara yang baru berdiri di Kabupaten Lahat sehingga menyerap cukup banyak tenaga kerja dari masyarakat sekitar.

Selain pengangguran terbuka, juga dikenal istilah setengah pengangguran (*under unemployment*), yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal, atau mereka yang sudah bekerja tetapi jam kerjanya kurang dari 35 jam selama seminggu. Indikator ini menggambarkan tingkat pemanfaatan tenaga kerja yang rendah sekaligus juga menggambarkan rendahnya produktifitas pekerja. Karena meskipun mereka bekerja tetapi belum menggunakan seluruh kapasitas sumber daya yang ada seperti tingkat pendidikan, skill dan keterampilan yang dimiliki atau tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang diharapkan sehingga mereka masih berusaha mendapatkan pekerjaan lain.

Dalam rangka mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat dapat menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja secara berkesinambungan yang meliputi perencanaan tenaga kerja makro dan perencanaan tenaga kerja mikro serta disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lapangan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja serta jaminan sosial tenaga kerja. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik didalam maupun di luar hubungan kerja yang diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja dan dapat dilakukan secara berjenjang.

Selain itu, penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.

Penempatan tenaga kerja ini diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan sesuai dengan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum yang dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah. Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan cara bersama-sama dengan masyarakat mengupayakan perluasan kesempatan kerja melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi tepat guna yang dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan lain-lain. Pemerintah juga harus memperhatikan kebutuhan hidup layak dan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi dalam menetapkan upah minimum masyarakat di Kabupaten Lahat.

2.7. 4.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Lahat ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Namun, disisi lain upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Lahat seperti solidaritas sosial, kekeluargaan, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar. Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga.

Kabupaten Lahat mempunyai kekayaan seni budaya yang beragam, hal tersebut menjadi modal dasar untuk pengembangan pariwisata. Kabupaten Lahat dikenal dengan "Bumi Seribu Megalit" karena pada tahun 2012 dikukuhkan oleh MURI (Museum Rekor Indonesia), yaitu Kabupaten Lahat sebagai pemilik situs megalit terbanyak se-Indonesia. Sebaran situs megalit berada di beberapa kecamatan seperti: Merapi

Barat, Kota Lahat, Pulau Pinang, Gumay Ulu, Pagar Gunung, Tanjung Tebat, Kota Agung, Mulak Ulu, Jarai, Pajar Bulan, Muara Payang, Suka Merindu dan Tanjung Sakti. Peninggalan megalit di Kabupaten Lahat berupa: arca, arca menhir, lesung batu, lumpang batu, batu tegak, batu datar, dolmen, batu gelang, batu bergores, tetralith, bilik batu, lukisan bilik batu dan tempayan kubur. Jenis temuan megalit sebanyak 13 jenis hanya di temukan di Kabupaten Lahat.

Selain itu, letak geografis Kabupaten Lahat yang berbukit sehingga terdapat banyak air terjun, sungai, danau dan sumber air panas. Saat ini telah terdata di Kabupaten Lahat terdapat lebih kurang 126 air terjun dengan ketinggian dan keindahan yang berbeda. Pesona air terjun Kabupaten Lahat tersebar di beberapa kecamatan seperti: air terjun Milang di Kecamatan Merapi Barat. Air terjun Deras, air terjun Renalap di Kecamatan Merapi Selatan. Air terjun Ganya dan Serame di Kecamatan Kota Lahat. Air terjun Ketapang, Salak, Sumbing, Bidadari, Pandak, Pegadungan, Terlantang, Ujan Panas, Panjang, Kunduran, Gunung Nyawe, Gegas di Kecamatan Pulau Pinang. Air terjun Lintang Kecil, Lintang Besar, Buluh 7 Tingkat, Maung di Kecamatan Gumay Ulu. Air terjun Kesik, Jambat Akar, Kijeng di Kecamatan Tanjung Tebat. Air terjun Bale, Kerinjing, Nelindang, Semindang Rindu di Kecamatan Kota Agung. Air terjun Jernih, Suruman, Dayang Rindu, Penenangan, Tinggi, Napalan di Kecamatan Mulak Ulu, air terjun Ughul Kecil, Ughul Besar, Bemban, Laye di Kecamatan Pagar Gunung, air terjun Lawang Agung di Kecamatan Muara Payang, air terjun 9 Panggung di Kecamatan Pseksu, air terjun Bukit Timur, Pama Salak, Gimo, Embun di Jarai, air terjun Pemandian Ratu di Kecamatan Tanjung Sakti. Sedangkan sumber air panas di Kabupaten Lahat terdapat di Kecamatan Pagar Gunung dan Kecamatan Tanjung Sakti. Sumber air panas yang berada di Kecamatan Pagar Gunung terletak di Desa Padang dan Danau di hutan lindung Bukit Barisan pada ketinggian 850 mdpl. Sumber air panas di Kecamatan Tanjung Sakti berada di tengah Desa Pajar Bulan, sehingga mudah di jangkau. Sumber air panas ini terletak tepat di bawah jembatan desa Pajar Bulan. Berpotensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata yang terintegrasi dengan wisata arung jeram di sungai Manna. Kabupaten Lahat memiliki arena arung jeram di 3 (tiga) sungai yaitu Sungai Lematang, Sungai Selangis dan

Sungai Manna. Ketika berarung jeram selain menyusuri sungai juga akan melihat dan singgah di air terjun. Untuk arung jeram di sungai Lematang akan singgah di air terjun Salak dan arung jeram di Sungai Selangis Kecamatan Gumay Ulu akan melihat 6 air terjun dan singgah di air terjun Buluh (7 tingkat). Sedang arung jeram di Sungai Manna Kecamatan Tanjung Sakti akan dibawa menikmati jernihnya air sungai dan indahnya pemandangan sepanjang sungai Manna.

Selain sebagai sarana olahraga arung jeram, saat ini juga merupakan salah satu potensi pariwisata unggulan yang sedang dikembangkan di Kabupaten Lahat. Masyarakat dan wisatawan yang datang ke Kabupaten Lahat selain berolahraga juga dapat menikmati suasana keindahan alam yang dimiliki Kabupaten Lahat. Kabupaten Lahat memiliki Bukit Serelo atau Gunung Jempol merupakan sebuah bukit yang sangat unik dan tiada duanya di dunia. Letak bukit ini di desa Padang Kecamatan Merapi Selatan atau berjarak 27 km dari pusat Kota Lahat. Bukit dengan ketinggian 900 mdpl menjadi simbol Kabupaten Lahat. Di sini juga terdapat pelatihan gajah Sumatera dan dapat dijadikan sarana untuk rock climbing. Keberhasilan berbagai seni dan budaya serta olah raga mendorong berkembangnya kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

2.8. 4.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum ditandai di antaranya dengan meningkatnya taraf pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah, perumahan, lingkungan hidup yang dilaksanakan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

4.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Fokus layanan urusan pemerintah wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan Sosial. Sedangkan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari Bidang Urusan Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, dan Kearsipan.

4.4.2 Urusan Pendidikan

4.4.2.1 Angka Partisipasi Sekolah

Upaya Pemerintah Kabupaten Lahat di bidang pendidikan antara lain menerapkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah melalui kerjasama dengan berbagai pihak yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam sosialisasi berbagai program yang tujuan utamanya untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat. Angka partisipasi sekolah merupakan proporsi penduduk usia tertentu yang masih sekolah terhadap total jumlah penduduk pada usia tersebut. Semakin tinggi angka partisipasi penduduk menunjukkan tingkat kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan semakin baik. Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Lahat pada tahun 2018 dilihat dari golongan usia 7-12 tahun sebesar 104,15 persen yang artinya terdapat 104 penduduk yang bersekolah pada usia 7-12 tahun. Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada golongan usia 13-15 tahun sebesar 84,9 persen yang artinya penduduk usia 13-15 tahun ditemui 84 orang yang bersekolah. Selanjutnya, Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk golongan usia 16-18 tahun sebesar 82,46 persen yang artinya pada tahun 2018, terdapat 82 penduduk yang bersekolah pada usia 16-18 tahun.

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi angka partisipasi sekolah adalah faktor biaya pendidikan yang cenderung semakin mahal pada jenjang pendidikan lebih tinggi mengakibatkan sebagian siswa yang telah menamatkan suatu jenjang pendidikan terpaksa tidak dapat

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kondisi ini akhirnya mempengaruhi pola angka partisipasi sekolah secara umum yang cenderung semakin menurun pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Angka Partisipasi Sekolah dalam kurun waktu 2014-2018 memperlihatkan angka yang fluktuatif untuk setiap kategori kelompok umur. Angka Partisipasi Sekolah tertinggi tahun 2018 pada kelompok umur 7-12 tahun dan yang terendah pada kelompok umur 16-18 tahun.

4.4.2.2 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Ketersediaan fasilitas pendidikan seperti sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga pengajar sangat mempengaruhi kondisi pendidikan di setiap daerah. Keberhasilan di bidang pendidikan ditandai dengan adanya peningkatan angka partisipasi sekolah, perluasan daya tampung ruang kelas dan penyediaan fasilitas belajar siswa. Perluasan daya tampung dilakukan dengan pembangunan gedung kelas baru, rehabilitasi gedung SD, SLTP dan SLTA yang rusak berat dan penempatan guru di sekolah yang kekurangan guru.

4.4.2.3 Rasio Murid - Sekolah dan Rasio Murid - Guru

Rasio murid terhadap sekolah adalah angka rata-rata kemampuan sekolah dalam menampung muridnya. Semakin kecil rasio antara murid dan sekolah maka semakin baik indikator pendidikan mengenai daya tampung sekolah. Daya tampung sekolah yang semakin kecil tentunya menunjukkan bahwa sekolah lebih intensif dalam memberikan pelayanan pendidikan sehingga diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang cerdas. Semakin rendah nilai rasio menunjukkan kemampuan sekolah dalam menampung murid semakin membaik. Rasio murid terhadap sekolah lebih disebabkan oleh jumlah murid yang menurun tidak diimbangi dengan jumlah sekolah yang semakin bertambah.

Rasio murid terhadap sekolah pada tahun 2018 pada setiap tingkat pendidikan memiliki nilai yang relative lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika dilihat per tingkat pendidikan, tingkat SD memiliki nilai rasio yang lebih kecil dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya yaitu sebesar 148,128. Selanjutnya adalah tingkat SLTP sebesar 249, 772 dan SLTA sebesar 353,339. Nilai rasio murid

terhadap sekolah yang menunjukkan nilai yang lebih rendah menunjukkan kemampuan sekolah dalam menampung murid semakin baik. Namun perlu diketahui bahwa penyebab nilai rasio yang menurun ini terjadi karena peningkatan fasilitas jumlah sekolah di Kabupaten Lahat.

Jumlah sekolah pada tahun 2018 bahkan meningkat pada berbagai tingkat pendidikan. Rasio murid terhadap sekolah ini lebih disebabkan oleh jumlah murid yang bertambah diimbangi dengan peningkatan jumlah sekolah. Hal ini tentunya menjadi tugas bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan yang kemudian diikuti dengan upaya peningkatan jumlah fasilitas pendidikan berupa sekolah.

Selanjutnya, angka rasio murid terhadap guru adalah rata-rata jumlah murid yang diajar oleh seorang guru dalam suatu tahun tertentu. Semakin kecil rasio murid terhadap guru tentunya menunjukkan semakin baiknya pendidikan yang bisa diberikan guru terhadap muridnya. Rasio murid terhadap guru pada tahun 2014- 2018 yang disajikan pada tabel diatas menunjukkan nilai fluktuatif. Rasio murid terhadap guru pada tahun 2018 yang disajikan pada tabel diatas menunjukkan nilai yang semakin besar bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat diartikan bahwa kualitas pengajaran guru mengalami penurunan karena beban murid yang harus diajar lebih banyak pada tahun 2018 sedangkan jumlah guru berkurang sehingga menyebabkan guru menjadi kurang intens memperhatikan muridnya.

Pada jenjang SD, 1 orang guru mengawasi secara rata-rata 9 orang murid, sedangkan pada jenjang SLTP rata-rata seorang guru mengawasi 12 orang murid dan pada jenjang SLTA seorang guru mengawasi rata-rata 12 orang murid. Fenomena tingkat pendidikan di Kabupaten Lahat menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Daerah setempat, khususnya dalam rangka peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah dimana indikator kesejahteraan taraf pendidikan yang baik diterima pada setiap masyarakat akan menghasilkan SDM yang berkualitas pula.

4.4.3 Urusan Kesehatan

Gambaran umum kesehatan di Kabupaten Lahat menunjukan

derajat atau status kesehatan yang meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, morbiditas, imunisasi, dan angka harapan hidup. Pembangunan bidang kesehatan juga merupakan aspek penting dalam rangka mewujudkan masyarakat Lahat yang berkualitas. Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama.

4.4.3.1 Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pembangunan kesehatan harus didukung ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan penduduk dapat diselenggarakan baik oleh institusi pemerintah maupun swasta seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah bersalin dan lain-lain. Selain itu juga mencakup sarana pendukung kesehatan seperti tempat praktek dokter, bidan, poliklinik dan posyandu. Perkembangan fasilitas kesehatan di Kabupaten Lahat kurun waktu tahun 2014-2018 cenderung menunjukkan peningkatan, begitu pula halnya dengan jumlah tenaga kesehatan.

Pada tahun 2018 di Kabupaten Lahat terdapat 2 unit rumah sakit, 33 unit puskesmas, 56 unit puskesmas pembantu, 1 unit rumah bersalin. Sementara itu jumlah apotik 19 buah, klinik/balai pengobatan sebanyak 13 buah dan optikal sebanyak 4 buah yang tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Lahat. Sedangkan untuk tenaga kesehatan yang berada di Kabupaten Lahat pada tahun 2018 terdiri dari dokter sebanyak 28 orang, perawat sebanyak 167 orang, bidan sebanyak 297 orang, dan tenaga farmasi sebanyak 11 orang. Hal tersebut dapat menunjukkan pembangunan di bidang kesehatan, khususnya kesadaran pentingnya pelayanan kesehatan oleh tenaga medis serta partisipasi aktif masyarakat untuk melahirkan dengan tenaga medis yang semakin tinggi. Akses masyarakat terhadap bidan desa yang semakin mudah akan mengurangi angka kematian bayi sekaligus juga meningkatkan angka harapan hidup.

4.4.3.2 Morbiditas

Morbiditas atau angka kesakitan dapat dijadikan alat ukur tingkat kesehatan masyarakat. Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit

akut, penyakit kronis, kecelakaan, kriminal, atau hal lain. Angka kesakitan dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

4.4.4 TATA RUANG

4.4.4.1 Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah satu kesatuan saluran dan bangunan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Sebagai salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian, maka jaringan irigasi tersebut haruslah dalam kondisi baik sehingga kebutuhan air irigasi bagi pertanian dapat terpenuhi.

Kondisi baik untuk jaringan irigasi dikategorikan memiliki kerusakan saluran irigasi < 10% dari total panjang saluran irigasi, demikian sebaliknya kondisi rusak untuk jaringan irigasi dikategorikan memiliki kerusakan saluran irigasi > 10% dari total panjang saluran irigasi. Saluran irigasi di Kabupaten Lahat seluas

13.348 ha, yang terdiri dari saluran primer, sekunder, tersier dan saluran pembuang. Pada awal tahun 2017 memiliki kondisi jaringan irigasi dengan tingkat kerusakan 9,10% yang merupakan angka kritis menuju ke kondisi tidak baik.

Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik Kabupaten Lahat kurun waktu 2014-2017 terlihat meningkat dan menunjukkan perkembangan yang baik. Pada tahun 2014 rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 61,84 meningkat menjadi 72,88 atau seluas 9.729 hektar. Tantangan yang dihadapi Kabupaten Lahat kedepan yaitu perlu menjaga dan mempertahankan luasan daerah irigasi agar tidak terjadi penyusutan dan

alih fungsi lahan yang dapat mengancam ketahanan pangan yang berdampak pada perekonomian masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasarkan kewenangannya, jumlah Daerah Irigasi di Kabupaten Lahat sebanyak 214 Daerah Irigasi dengan Luas 13.348 hektar, sedangkan untuk kewenangan Provinsi Sumsel sebanyak 8 Daerah Irigasi dengan luas 10.443 hektar.

4.4.4.2 Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Lahat masih mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032 dan saat ini sedang dilakukan peninjauan kembali dan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lahat agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Peninjauan kembali Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032 dilaksanakan melalui tahapan pengkajian, evaluasi dan penilaian oleh Tim PK RTRW Kabupaten Lahat yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Lahat.

Hasil dari Peninjauan Kembali tersebut berdasarkan hasil penilaian per aspek yang meliputi aspek kualitas RTRW, aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan aspek pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan masing-masing aspek maka RTRW Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032 perlu direvisi. Selain itu, penilaian terhadap perubahan RTRW berdasarkan beberapa kajian didapat hasil total perubahan sebesar 18%, yang artinya tidak perlu dilakukan pencabutan peraturan Daerah tetapi hanya perlu perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032.

Beberapa rekomendasi dalam revisi RTRW berdasarkan hasil pengkajian, evaluasi dan penilaian terhadap RTRW Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032 sebagai berikut:

a. Revisi Peraturan Daerah

Perubahan peraturan daerah disebabkan antara lain adanya perubahan wilayah akibat pemekaran wilayah kecamatan. Selain itu perubahan peraturan daerah dilakukan untuk mengakomodir beberapa

kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang belum dimasukkan dalam RTRW Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032.

b. Revisi terhadap Materi Teknis

Revisi terhadap materi teknis akan disesuaikan dengan perubahan pada Peraturan Daerah serta mengakomodir beberapa kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang belum dimasukkan dalam RTRW Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032.

c. Revisi terhadap peta

Revisi terhadap peta-peta juga diperlukan untuk memberikan gambaran data spasial terhadap RTRW Kabupaten Lahat Tahun 2012-2032 yang mengalami revisi. Revisi peta meliputi perubahan batas administrasi, perubahan data-data spasial yang dipersyaratkan dalam dokumen RTRW, perubahan peta-peta rencana yang meliputi peta struktur ruang, peta pola ruang dan peta kawasan strategis.

2.9. 4.5 FOKUS URUSAN DASAR

4.5.1 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah digunakan sebagai tempat berlindung dari gangguan luar dan sebagai tempat tinggal untuk tumbuh, hidup, berinteraksi dan fungsi lainnya. Untuk itu, rumah diharapkan bisa memberikan rasa nyaman dan memenuhi syarat-syarat kesehatan. Saat ini rumah merupakan kebutuhan yang sangat pokok. Dengan adanya data perumahan dapat menggambarkan sampai sejauh mana kesejahteraan rumah tangga. Beberapa aspek yang dapat digambarkan dari data fasilitas perumahan antara lain akses rumah tangga dengan akses air minum, akses sanitasi yang layak, akses terhadap sumber listrik dan beberapa indikator lainnya. Permasalahan air minum, sanitasi dan sumber listrik perlu menjadi perhatian, karena merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Selain itu akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang nantinya akan berpengaruh pada indeks pembangunan manusia di Kabupaten Lahat.

4.5.2 Rumah Tangga dengan Akses Air Minum

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari

program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah. Besar kecilnya persentase penduduk yang menggunakan air bersih dipengaruhi oleh dua faktor yaitu kesadaran penduduk tentang kesehatan dan sanitasi lingkungan serta tersedianya fasilitas air bersih bagi penduduk. Dalam rangka mencapai akses universal yang telah dicanangkan secara nasional yaitu 100% akses air minum, 0 % Kawasan Kumuh dan 100% akses sanitasi (100-0-100) diperlukan dorongan dan strategi percepatan dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mencapai hal dimaksud. Begitu pula dengan Pemerintah Kabupaten Lahat, dimana permasalahan akses air minum, kawasan kumuh dan sanitasi yang layak sudah menjadi prioritas nasional merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan.

Capaian rata-rata Kabupaten Lahat untuk akses air bersih tahun 2018 sebesar 43,70% masih dibawah rata-rata capaian nasional yaitu 72,99% dan capaian Provinsi Sumatera Selatan sebesar 62,84%. Angka capaian akses air minum layak Kabupaten Lahat pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2017 sebesar 45,83%. Hal ini menggambarkan kinerja pengelolaan akses air minum layak di Kabupaten Lahat semakin rendah. Komitmen Pemerintah Kabupaten Lahat sangat diperlukan untuk mendorong peningkatan capaian akses universal dengan memanfaatkan sumber-sumber pendanaan baik melalui hibah, CSR, APBN, APBD dan lain-lain.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Lahat dalam upaya mendorong capaian akses universal yang telah dicanangkan secara nasional (100-0-100) pada tahun kedepan untuk akses air minum antara lain: memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana air minum yang berkelanjutan melalui pendanaan yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN, merencanakan proyeksi kebutuhan penyediaan sarana air minum agar dapat berkelanjutan, membangun partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana air minum yang berkelanjutan, meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum yang berkelanjutan.

Dalam rangka pemenuhan pelayanan air bersih, Pemerintah

Kabupaten Lahat melalui PDAM terus berusaha untuk meningkatkan penyediaan air minum. Penyediaan air minum disalurkan ke seluruh konsumen, diantaranya sosial (umum; khusus), non niaga (rumah tangga; instansi pemerintah), niaga (kecil; besar) dan khusus (pelabuhan; lainnya). Pada tahun 2017, banyaknya pelanggan PDAM menurut jenis konsumen di Kabupaten Lahat mencapai 6.644 pelanggan yang terdiri dari jenis konsumen sosial, konsumen niaga, non niaga, industri dan khusus. Secara rinci perkembangan banyaknya pelanggan PDAM menurut jenis konsumen di Kabupaten Lahat.

4.5.3 Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat Kabupaten Lahat, pada tahun 2018 telah melaksanakan peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) seperti halnya juga yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Banyaknya pengaruh budaya luar yang langsung ditiru oleh masyarakat tanpa dilakukan upaya penyaringan. Munculnya sikap seperti ini lebih banyak menimpa masyarakat yang menganggap bahwa semua pengaruh dari luar berarti mengarah pada kemajuan dan modernisasi. Akibatnya, upaya penyaringan tidak secara tepat dilakukan bahkan bisa terjadi perilaku yang selama ini telah mengakar dalam masyarakat akan mudah digantikan dengan perilaku yang baru. Kondisi ini akan semakin mudah terjadi manakala pengaruh teknologi informasi sudah merambah ke pelosok daerah.

Masyarakat sebagai salah satu mitra aparat keamanan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang aman dan tertib serta bebas dari penyakit masyarakat diharapkan mampu mengungkapkan berbagai pesan moral dalam perwujudannya. Pelanggaran Peraturan Daerah yang dapat diselesaikan sesuai yang ditargetkan sebanyak 10 pelanggaran. Selain itu Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai pelaksana Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat bekerjasama dengan aparat hukum lainnya dalam penegakkan Peraturan Daerah yaitu kegiatan penertiban tempat hiburan, penertiban penjualan minuman beralkohol,

penertiban penginapan, hotel, losmen dan penertiban KTP. Disisi lain dilakukan juga kerjasama dengan aparat hukum lainnya dalam rangka pengembangan kapasitas aparat.

4.5.4 Urusan Sosial

Tujuan utama pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lahat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lahat selaras dengan tujuan pembangunan di Indonesia yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil merata sehingga dapat mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial terus dilaksanakan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meliputi anak balita terlantar, anak terlantar (Usia 6-18 tahun), anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas (ADK) kelainan fisik/mental belum berusia 18 tahun, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif lainnya).

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan seseorang atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, sosial) secara memadai/wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keturunan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendidik) yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana. Sedangkan yang dimaksud Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Beberapa hambatan di bidang sosial antara lain masih rendahnya penyerapan informasi kesejahteraan sosial oleh masyarakat, peningkatan PMKS yang masih tinggi setiap tahunnya. Pelaksanaan Pembangunan Bidang Sosial meliputi berbagai jangkauan pelayanan pemberdayaan sosial bagi anak terlantar, anak jalanan dan santunan bagi lansia terlantar, selain itu juga telah dilakukan peningkatan pemberdayaan peran keluarga miskin dan bantuan bagi keluarga fakir miskin dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial termasuk Penyempurnaan Sarana Prasarana Pusat Rehabilitasi dan Panti Asuhan, Bantuan Tanggap Darurat kepada para korban bencana.

Hal penting lainnya yang telah dilaksanakan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) melalui pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mencakup upaya-upaya integrasi sosial, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan lingkungan, pemberdayaan KAT bukan hanya dilihat sebatas upaya untuk memathkan isolasi/keterasingan secara fisik dari kelompok- kelompok masyarakat lain di Lingkungannya tetapi lebih penting lagi adalah isu sosial, sehingga mereka dapat hidup sejajar dengan masyarakat sekitarnya.

Saat ini, permasalahan Urusan Sosial Kabupaten Lahat adalah masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga persentase angka kemiskinan di Kabupaten Lahat masih relatif tinggi oleh karena itu penanganan PMKS harus lebih di Optimalkan dan Pembinaan terhadap Potensi Sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penanganan PMKS perlu ditingkatkan. Dalam rangka mengentaskan permasalahan tersebut diatas maka Dinas Sosial Kabupaten Lahat memerlukan target kinerja dan tambahan sumber dana untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial pada masyarakat Kabupaten Lahat khususnya melalui program yang telah direncanakan untuk menunjang keberhasilan pembangunan lima tahun mendatang yaitu melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan Indikator Kinerja Persentase Jumlah Keluarga sangat Miskin (KSM) yang Memperoleh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan Indikator Kinerja

Persentase KMS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Program Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan Indikator Kinerja Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan, Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) dengan Indikator Kinerja Persentase eks Penyandang Penyakit Sosial yang Tertangani, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan Indikator Kinerja Jumlah Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana dengan Indikator Kinerja Jumlah Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat, Program Pembinaan Anak Terlantar dengan Indikator Kinerja Persentase Anak Terlantar yang dilatih Keterampilannya.

4.5.5 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian persentase penurunan kasus perempuan dan anak dari tindakan kekerasan pada tahun 2018 lebih baik jika dibandingkan capaian pada tahun 2014. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk meminta bantuan penyelesaian kasus kekerasan kepada Pemerintah. Pada tahun 2014, persentase penurunan kasus perempuan dan anak dari tindakan kekerasan sebesar 10% menurun menjadi 7,2% di tahun 2018. Pencapaian keberhasilan tersebut didukung oleh Program Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Perkembangan angka partisipasi perempuan di lembaga legislatif dan lembaga pemerintah pada kurun waktu 2014-2018 mengalami peningkatan dari semula pada tahun 2014 untuk persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif sebesar 7,5% meningkat menjadi 10% di tahun 2018. Sedangkan untuk persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2014 sebesar 3,1%, meningkat menjadi 4,98% di tahun 2018. Beberapa program yang dilaksanakan dalam mendukung peningkatan partisipasi perempuan di Kabupaten Lahat antara lain melalui Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan.

4.5.6 Urusan Pangan

Kebutuhan pangan di Kabupaten Lahat saat ini jauh lebih kecil dari pada produksi dan ketersediaan pangan di kabupaten Lahat. Selisih antara kebutuhan dan ketersediaan pangan mencapai 152.914.570.500 ton/tahun. Ketersediaan pangan terdiri dari indikator kebutuhan konsumsi normatif terhadap ketersediaan sereal.

Analisis daya dukung lingkungan untuk bahan pangan dapat diperoleh dari perhitungan selisih antara ketersediaan dan kebutuhan yang menunjukkan bahwa Kecamatan Lahat dan Kecamatan Gumay Talang memiliki nilai selisih negatif (minus) yang berarti memiliki defisit bahan pangan. Namun dengan masuknya produk tanaman pangan dari kecamatan lain di dalam Kabupaten Lahat serta dari luar Kabupaten Lahat sehingga defisit bahan pangan di dua Kecamatan tersebut dapat di abaikan. Kekurangan bahan pangan di dua Kecamatan tersebut di sebabkan oleh luas lahan sawah yang dimiliki oleh kecamatan tersebut semakin sedikit.

4.5.7 Urusan Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup merupakan input penting dalam proses kegiatan pembangunan. Dukungan sumber daya alam berupa air, pangan dan lahan yang merupakan dasar penting dalam proses produksi untuk mencapai tujuan pembangunan. Ketersediaan dan pencadangan sumber daya alam pendukung kegiatan pembangunan harus dipastikan mampu mencukupi kegiatan pembangunan saat ini dan generasi yang akan datang.

4.5.7.1 Daya Dukung Air Permukaan

Kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung penyediaan air dihitung dengan membandingkan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air layak bagi penduduk. Ketersediaan air merupakan jumlah air yang dapat digunakan, yang berupa jumlah air larian dan air tanah yang berlebih (*overflow*). Kelebihan air tanah dimaksud adalah mata air atau sumber air lainnya. Jumlah air larian dihitung dengan mempertimbangkan curah hujan dan kemampuan tanah

dalam meresapkan air. Koefisien air larian sesuai dengan kelas tutupan tanah berdasarkan standar Permen LH No.17 Tahun 2009. Jumlah air dari mata air dihitung dari rata-rata debit kemudian diperhitungkan dalam setahun. Sementara itu kebutuhan air dihitung dengan dua pendekatan yakni (1) kebutuhan layak yang mencakupi tidak hanya untuk kebutuhan dasar namun meliputi kebutuhan sosial, pertanian dan industri, dan (2) kebutuhan dasar untuk hidup (*basicneed*). Standar kebutuhan layak mengacu pada WHO adalah 1.000 m³/kapita/tahun sedangkan kebutuhan dasar mengacu pada Standard National Indonesia (SNI) sebesar 120 l/orang/hari atau 43,8m³/kapita/tahun. Dari perhitungan air permukaan yang tersedia di kabupaten Lahat sebesar 17.079.897.600 m³/tahun. Kebutuhan air yang diperhitungkan terdiri dari kebutuhan air domestik, kebutuhan air untuk pengairan pertanian, kebutuhan air untuk peternakan dan kebutuhan air untuk industri. Kebutuhan air domestik dihitung dari jumlah penduduk dikalikan dengan kebutuhan air untuk hidup layak per kapita.

Penggunaan air untuk kebutuhan irigasi lahan pertanian, kebutuhan domestik, kebutuhan peternakan dan kebutuhan industri relatif lebih aman karena dapat dipenuhi dari air permukaan. Kabupaten Lahat masih mengalami surplus air sebesar 16.876.210.052,59 m³/tahun. Kebutuhan air domestik lebih dititik beratkan ke konsumsi air bersih yang berasal dari air permukaan dan di tangani oleh PDAM.

Konsumsi air yang dapat dilayani oleh PDAM hanya sebesar 23,16 persen dari total kebutuhan. Layanan air bersih melalui PDAM untuk rumah tangga hanya sebesar 23,16 % dari total kebutuhan air domestik. Menurut data PDAM kabupaten Lahat tahun 2017, kebutuhan air untuk rumah tangga terhadap konsumen dilayani PDAM sebesar 2.589.135,822 m³/tahun dari total kebutuhan domestik. Tabel diatas menunjukkan rekapitulasi kebutuhan air bersih domestik yang diperoleh dari hasil model dan kebutuhan air rumah tangga yang dilayani PDAM. Terdapat perbedaan signifikan, dikarenakan tidak semua sumber air rumah tangga di kabupaten Lahat menggunakan jasa layanan PDAM.

Dengan demikian daya dukung lingkungan hidup dalam menyediakan air bagi kebutuhan hidup layak penduduk kabupaten

Lihat sebagai berikut:

- Jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak 1.000 m³/kapita/tahun menurut standar WHO maka kebutuhan air sebesar 11.096.656,90 m³ atau 5% dari kebutuhan. Sehingga daya dukungnya mencapai 0,95
- Jika dibandingkan dengan kebutuhan air dirinci menurut kebutuhan sosial, pertanian dan industri maka kebutuhan air sebesar 192.591.890 m³/tahun atau 94 % dari kebutuhan. Sehingga daya dukungnya hanya mencapai 0,06.

4.5.7.2 Kualitas Air Sungai

Lima (5) sungai yang ada di Kabupaten Lahat telah mengalami pencemaran dengan kandungan BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand) yang telah melampaui daya tampung sungai. Sumber BOD dan COD tersebut berasal dari beban pencemar dari limbah domestik (COD 500.000 kg/hari dan BOD 220.000 kg/hari), beban pencemar dari limbah pertanian dan penggunaan lahan (COD 7.685 kg/hari dan BOD 1.750 kg/hari), beban pencemar dari limbah peternakan (COD sebesar 9.000 Kg/hari dan BOD 1.790 kg/hari), beban pencemar dari limbah UMKM (COD 7.950 kg/hari dan BOD 1.755 kg/hari), dan beban pencemar dari limbah Industri. Sumber pencemar air sungai di kabupaten Lahat meliputi limbah domestik, limbah pertanian, limbah peternakan, limbah UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), dan limbah industri.

1) Beban pencemar dari limbah domestik

Sungai Lematang dan sungai Selangis merupakan wilayah paling tinggi beban pencemar dari limbah domestik COD sebesar 500.000 kg/hari dan BOD 220.000 kg/hari.

2) Beban pencemar dari limbah pertanian dan penggunaan lahan (non-titik)

Sungai Lim merupakan wilayah paling tinggi beban pencemar dari limbah pertanian dan penggunaan COD sebesar 7.685 kg/hari dan BOD sebesar 1.750 kg/hari.

3) Beban pencemar dari limbah peternakan

Beban pencemar dari limbah peternakan terbesar berasal hewan sapi dan kerbau dengan kandungan COD sebesar 9.000 Kg/hari dan BOD 1.790 kg/hari

4) Beban pencemar dari limbah UMKM

Sungai Endikat paling tinggi beban pencemar dari limbah UMKM dengan jumlah COD sebesar 7.950 kg/hari dan BOD sebesar 1.755 kg/hari.

5) Beban pencemar dari limbah Industri

Sungai Lematang merupakan sungai dengan jumlah industri terbanyak yang membuang limbah sebanyak 18 industri.

Pada bidang persampahan, saat ini volume sampah di Kabupaten Lahat sebesar 120.922,53 ton/tahun dan penyumbang timbulan sampah terbesar berada di kecamatan Lahat. Pelayanan sampah di kabupaten Lahat masih terpusat di daerah perkotaan.. Berbagai alternatif pengelolaan sampah dapat diarahkan kepada program atau kegiatan daur ulang sampah serta pembangunan teknologi pengolahan limbah/sampah, sehingga volume sampah dapat dikurangi.

Timbulan sampah di Kabupaten Lahat telah melampaui dari kapasitas yang ada. Dalam pengelolaan sampah dapat melalui kegiatan 3R (*reduce, reuse, recycle*) di berbagai sumber timbulan sampah seperti permukiman, industri, pasar, perkantoran, dan lain- lain. Sistem yang diterapkan dalam pengolahan sampah secara ramah lingkungan seperti sanitary landfill dan semi sanitary landfill sudah diterapkan oleh TPA yang berada di Kabupaten Lahat tetapi masih kekurangan Fasilitas dalam pengolahan dan penampungan sampah. Saat ini fasilitas pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Lahat.

4.5.8 Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

Penyelenggaraan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Lahat merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Capaian persentase penduduk yang belum memiliki KK meningkat pada Tahun 2018 sebesar 25,5%. Dalam pemenuhan penduduk wajib KTP yang sudah memiliki KTP pada

tahun 2018 telah mencapai 85%, sedangkan untuk penerbitan Akta Kelahiran sebesar 20% dan Akta Kematian sebesar 14%. Hal tersebut didukung oleh pelaksanaan Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan yang baik dan sesuai prosedur.

4.5.9 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada tahun 2017, dalam rangka meningkatkan pasar desa yang modern, Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa bidang ekonomi sosial budaya dan usaha ekonomi masyarakat mengadakan pembinaan pengelolaan pasar desa yang difokuskan pada 25 pasar desa di Kabupaten Lahat. Dengan harapan pasar desa tersebut akan menjadi pasar yang sehat, nyaman, aman, bersih dan memiliki manajemen pengelolaan yang profesional sehingga kesejahteraan pedagang meningkat. Selain itu Pemerintah Kabupaten Lahat juga melaksanakan pemilihan kepala desa serentak pada 58 desa di wilayah Kabupaten Lahat.

Sebagai salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menuju desa swasembada, masyarakat Desa Muara Tiga Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat berperan secara aktif dalam menyukseskan program Bulan Bakti Gotong-Royong Masyarakat (BBGRM). Kegiatan ini merupakan salah satu program unggulan Pemerintah dalam menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong-Royong Masyarakat. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran peran serta masyarakat dalam pembangunan terutama dalam bidang kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

4.5.10 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif (target SPM 65%) kurun waktu 2014-2018 menunjukkan angka yang fluktuatif yaitu pada tahun 2014 adalah 73,04% meningkat menjadi 76,09% di tahun 2017, akan tetapi pada tahun 2018 menurun menjadi 73,28%. Realisasi cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif telah melebihi target SPM sebesar 65%. Tercapainya

indikator ini didukung oleh Program Keluarga Berencana seperti penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, pelayanan KIE, peningkatan perlindungan hak reproduksi individu, promosi pelayanan KHIBA, pembinaan keluarga berencana, dan Program Pelayanan Kontrasepsi melalui pelayanan konseling KB, pelayanan pemasangan kontrasepsi dan pelayanan KB Medis Operasi. Beberapa kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah mencapai target yang telah ditetapkan seperti cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif (target SPM 65%), cakupan PUS yg istrinya dibawah usia 20 tahun, cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB, Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang berKB dan Rasio PPKBD setiap desa/kelurahan. Sedangkan kinerja yang belum memenuhi target SPM antara lain cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi/ unmeet need dan Rasio PLKB/PKB (petugas/desa).

4.5.11 Urusan Perhubungan

Sejalan dengan peningkatan jumlah arus penumpang angkutan umum di Kabupaten Lahat, Pemerintah Kabupaten Lahat telah melaksanakan beberapa program seperti Peningkatan Pelayanan Angkutan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. Saat ini transportasi Darat yang ada di Kabupaten Lahat tahun 2017 berupa angkutan darat umum yang berjumlah 210 angkutan darat dengan jumlah penumpang 16.618 orang dengan menggunakan angkutan desa.

4.5.12 Urusan Komunikasi dan Informatika

Pada tahun 2018, capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lahat yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo antara lain: pengembangan komunikasi, informasi dan media massa melalui kegiatan Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi, Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi, Pengkajian

dan pengembangan sistem informasi, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi, Pembuatan Website Humas Pemerintah Kabupaten. Selain itu, dilaksanakan juga Program kerja sama informasi dengan massa media, melalui kegiatan penyebaran informasi pembangunan daerah dan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lahat terlihat lebih baik. Hal tersebut, ditandai dengan semakin meningkatnya implementasi penggunaan jaringan komunikasi dan informasi di Kabupaten Lahat. Saat ini Dinas Komunikasi dan informasi menerapkan publikasi berbasis online pada seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat melalui website www.lahatkab.go.id dengan harapan data dan informasi Kabupaten Lahat dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan lengkap.

4.5.13 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan jumlah koperasi menurut jenis koperasi di Kabupaten Lahat kurun waktu 2014-2018 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2014 jumlah koperasi di Kabupaten Lahat sebanyak 358 koperasi menurun menjadi 168 koperasi di tahun 2018. Kurangnya kemampuan anggota koperasi dalam mengelola koperasi sangat berpengaruh pada jalannya usaha koperasi tersebut.

Persentase koperasi yang berprestasi pada tahun 2018 sebesar 22,14% sedangkan untuk Persentase pertumbuhan Usaha Mikro Kecil sebesar 61,20%. Strategi Pemerintah Kabupaten Lahat dalam mendukung upaya pencapaian target tersebut adalah melalui peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yang ada di Kabupaten Lahat dan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM, dan Penciptaan Iklim Usaha yang kondusif.

4.5.14 Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Pemerintah Kabupaten Lahat dalam meningkatkan promosi dan kerjasama investasi melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah dan dunia usaha guna meningkatkan kerjasama di bidang penanaman

modal antara instansi pemerintah baik tingkat propinsi maupun lembaga pusat. Selain itu juga dilaksanakan temu usaha antara pemerintah dengan dunia usaha yang ada di Kabupaten Lahat dengan pengusaha PMDN, dan Instransi terkait yang bertujuan untuk terwujudnya konsep kemitraan dan pengembangan di bidang investasi serta terjalin kerjasama yang harmonis antara pemerintah dan dunia usaha.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat telah memberikan kemudahan pelayanan perizinan di Kabupaten Lahat. Bagi pemohon yang akan membayar pajak dan retribusi atas izin yang dimohonkan cukup di Kantor DPM dan PTSP Kabupaten Lahat, selain itu pula bagi perusahaan-perusahaan yang akan mendaftarkan tenaga kerjanya di BPJS Kesehatan juga telah tersedia di Kantor Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat.

4.5.15 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Lahat dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga yang mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga. Pada kurun waktu 2014-2018, sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga adalah meningkatnya prestasi generasi muda dan meningkatnya prestasi olahraga. Pembangunan di bidang kepemudaan dilakukan melalui peningkatan kualitas dari kegiatan yang melibatkan pemuda dan organisasi kepemudaan di Kabupaten Lahat. Kegiatan difokuskan pada pembekalan bagi pemuda dengan pelatihan keterampilan dan wawasan tentang kewirausahaan dengan harapan mampu mencetak pemuda produktif yang memiliki kompetensi dan mampu berperan aktif ditengah-tengah masyarakat. Selain itu juga dilakukan pembibitan dan pembinaan atlit berprestasi di berbagai cabang olahraga agar mampu bersaing dan berprestasi pada pertandingan olahraga ditingkat regional maupun nasional.

4.5.16 Urusan Perpustakaan

Perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan kurun waktu 2014-2018 menunjukkan tren meningkat, seiring dengan meningkatnya

persentase minat baca masyarakat Kabupaten Lahat. Capaian kinerja Jumlah pengunjung, peminjam dan koleksi buku pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Dalam menunjang kegiatan dan Pelayanan di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat perlu adanya pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan khususnya meubelair dan sarana penunjang lainnya, antara lain pengadaan buku-buku perpustakaan untuk menambah koleksi bahan-bahan pustaka. Untuk menjangkau masyarakat pengguna perpustakaan di wilayah-wilayah terpencil di seluruh Kabupaten Lahat, perlu adanya Perpustakaan Keliling. Selain itu, untuk menunjang minat baca pada anak-anak, perlu didirikan ruang baca khusus anak-anak. Ruangan ini rencananya akan dibuat menarik dengan dihiasi gambar-gambar warna-warni sesuai dunia anak-anak. Diharapkan dengan ruangan yang demikian, anak-anak lebih suka berkunjung dan memanfaatkan sarana perpustakaan yang ada. Bagi pengguna perpustakaan yang ingin mendapatkan informasi lewat internet disediakan sarana komputer untuk akses internet secara gratis. Begitu juga bagi mereka yang membawa sendiri komputer laptop atau PDA, disediakan juga fasilitas jaringan internet wireless.

Dinas Perpustakaan telah menggunakan kartu keanggotaan perpustakaan elektronik untuk tertibnya administrasi. Dengan sarana ini pengunjung perpustakaan cukup menggunakan kartu elektronik ini untuk peminjaman dan pengembalian buku. Secara otomatis komputer akan meng-update ke data base komputer. Sedangkan untuk menunjang pelayanan perpustakaan yang prima, maka perpustakaan perlu menyediakan informasi-informasi bagi masyarakat luas mengenai koleksi buku-buku di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat. Beberapa program dan kegiatan yang akan dilakukan Dinas Perpustakaan kedepan untuk meningkatkan pelayanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat kepada masyarakat antara lain peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, pemenuhan erpenuhinya sarana dan prasarana Dinas Perpustakaan yang lengkap dan modern, meningkatnya sumber daya manusia yang profesional dan mandiri, meningkatkan pengembangan budaya baca dengan meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan/pemustaka,

meningkatkan pembinaan Perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat, meningkatkan jangkauan pelayanan perpustakaan ke desa-desa, membangun gedung perpustakaan yang representatif, mewujudkan perpustakaan desa yang mandiri, mewujudkan perpustakaan berbasis digital secara nasional dan adanya ruang baca anak.

2.10. 4.6 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

4.6.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

Lahan potensi untuk pengembangan perikanan budidaya dan tangkap di Kabupaten Lahat seluas 15.400 km² yang terdiri dari perairan umum, kolam, tebat dan sawah. Lahan tersebut masih belum dimanfaatkan secara optimal. Jumlah produksi perikanan budidaya dan tangkap Kabupaten Lahat sebesar 10.974 ton dengan jenis ikan yaitu nila, gurame, lele, patin, mas dan ikan lokal perairan umum.

Pada umumnya pelaku usaha di bidang perikanan budidaya dan tangkap di Kabupaten Lahat masih bersifat tradisional, untuk dikonsumsi pribadi dan belum dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan di Kabupaten Lahat. Ada beberapa jenis kelompok perikanan di Kabupaten Lahat yaitu Kelompok Budidaya Perikanan sebanyak 89 kelompok, Kelompok Usaha Bersama sebanyak 12 kelompok dan Kelompok Pengolah dan Pemasar Perikanan sebanyak 2 kelompok. Selanjutnya, untuk pengembangan pembangunan di sektor perikanan didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang ditempatkan di beberapa kawasan potensi untuk pengembangan usaha perikanan. Sarana dan prasarana pengembangan usaha budidaya perikanan di Kabupaten Lahat terdiri dari BBI Kota Agung seluas 6.202 m², BBI Tanjung Sakti seluas 6.000 m², KAD Tanjung Sirih sebanyak 1 unit, Pasar Benih Ikan sebanyak 1 unit, Pasar Ikan Jarai sebanyak 1 unit, Laboratorium Kesehatan Ikan sebanyak 1 unit, dan Kantor UPTD PBI Kecamatan Lahat.

Berdasarkan data potensi dan permasalahan yang ada, maka dibuat rencana pengembangan usaha perikanan di Kabupaten Lahat dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah produksi perikanan di Kabupaten Lahat, pemenuhan tingkat konsumsi ikan, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat melalui kegiatan usaha

perikanan. Beberapa rencana pembangunan di bidang perikanan yaitu meningkatkan luas area lokasi 2 (dua) unit Balai Benih Ikan yang terdapat di Kecamatan Kota Agung dan Kecamatan Tanjung Sakti.

4.6.2 Urusan Pariwisata

Sejalan dengan perkembangan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Lahat dalam kurun waktu 2014-2018, Pemerintah Kabupaten Lahat terus menggali potensi wisata dan melakukan promosi kepada wisatawan dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Lahat melalui Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja urusan pariwisata seperti meningkatkan promosi budaya dan pariwisata baik skala nasional maupun internasional, mengembangkan objek-objek wisata unggulan, pembangunan infrastruktur pada objek wisata dan sebagainya.

Dalam memberikan pelayanan terhadap wisatawan yang datang ke Kabupaten Lahat, diperlukan tersedianya sarana akomodasi yang memadai. Saat ini Kabupaten Lahat telah memiliki 5 (lima) hotel kelas bintang dan 7 (tujuh) hotel bukan kelas bintang. Sedangkan untuk rumah makan tercatat ada 151 rumah makan di Kabupaten Lahat. Pada tahun 2018 Kabupaten Lahat memiliki 86 tempat objek wisata alam, 4 objek wisata buatan dan 11 tempat objek wisata budaya yang tersebar di 16 kecamatan. Pada tahun 2018, jumlah kamar akomodasi yang tersedia di hotel dan losmen yang ada di Kabupaten Lahat ada sebanyak 520 kamar dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 273 orang. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan ketersediaan fasilitas akomodasi hotel dan tenaga kerja pada tahun 2017. Peningkatan ini menunjukkan tingginya penggunaan kamar sehingga hotel harus menambah tenaga kerja dan kamar huni setiap tahunnya.

4.6.3 Urusan Pertanian

Kabupaten Lahat merupakan salah satu daerah pertanian di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki lahan sawah seluas 17.158 hektar dan lahan bukan sawah sawah seluas 342.213 hektar. Salah satu

sektor unggulan dalam pertanian adalah tanaman pangan yang mencakup padi, jagung, kedele, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Tahun 2018, produksi padi (padi sawah dan Padi ladang) sebanyak 229.776 ton, produktivitas 54,30 kuintal per hektar dengan luas panen 42.029 hektar padi sawah dan 1.384 hektar padi ladang.

Selanjutnya untuk jenis tanaman palawija mencakup jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Pada tahun 2018, produksi palawija yang paling banyak adalah produksi jagung yaitu sebesar 7.876 ton, disusul ubi kayu sebesar 2.125 ton, ubi Jalar sebesar 2.068 ton, Kedelai sebesar 422 ton, kacang tanah sebesar 198 ton, dan yang terkecil adalah produksi kacang hijau sebesar 160,5 ton. Selain tanaman palawija di Kabupaten Lahat juga terdapat tanaman buah-buahan.

Selanjutnya untuk jenis tanaman sayur-sayuran yang ada di Kabupaten Lahat meliputi bawang merah, bawang putih, bawang daun, kentang, kubis, kembang kol, petsai/sawi, wortel, lobak, kacang merah, kacang panjang, cabe, cabe rawit, paprika, jamur, tomat, terung, buncis, ketimun, labu siam, kangkung, bayam dan sebagainya.

Selain tanaman pangan terdapat banyak jenis tanaman yang diusahakan oleh perkebunan rakyat, baik tanaman perkebunan berumur pendek seperti nilam maupun perkebunan berumur panjang seperti karet, kelapa, kopi, lada, kakao dan lainnya. Hanya saja yang cukup menonjol adalah kopi dan karet, sementara kelapa sawit diusahakan oleh perkebunan besar. Pada tahun 2018, luas tanaman perkebunan kopi paling luas sebesar 54.441 ha jika dibandingkan dengan luas tanaman perkebunan lainnya yaitu karet sebesar 43.232 hektar, kelapa sawit sebesar 13.636 hektar, dan kakao sebesar 4.366 hektar.

Selain Urusan Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Lahat juga melaksanakan Urusan Peternakan di Kabupaten Lahat. Adapun hasil peternakan terdiri dari daging, telur dan susu. Produksi daging Kabupaten Lahat dalam kurun waktu 2014-2018 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, produksi daging sebesar 2.353 ton meningkat menjadi 4.810 ton di tahun 2018. Demikian juga halnya dengan produksi telur, dimana pada tahun 2014 produksi telur

mencapai 2.232 ton meningkat menjadi sebesar 2.443 ton di tahun 2018.

Hasil peternakan selain dari produksi daging dan telur, juga bisa dihitung dari populasi ternak. Perkembangan populasi ternak di Kabupaten Lahat terbagi menjadi populasi ternak besar dan populasi ternak kecil/unggas. Adapun yang termasuk populasi ternak besar adalah sapi (termasuk sapi perah), kerbau dan kuda, sedangkan yang termasuk populasi ternak kecil/unggas adalah kambing, domba, babi, ayam kampung, ayam petelur dan itik. Pada tahun 2018, populasi ternak besar yang paling banyak adalah populasi sapi sebanyak 11.382 ekor dibandingkan populasi ternak besar lainnya seperti kerbau sebanyak 1.668 ekor. Sedangkan untuk populasi ternak kecil dan unggas yang paling banyak adalah populasi ternak kambing sebanyak 13.920 ekor dan populasi ternak ayam pedaging sebanyak 2.282.566 ekor.

4.6.4 Urusan Perdagangan

Pada tahun 2018, sarana perdagangan di Kabupaten Lahat dilihat dari jenisnya berjumlah 1.833 fasilitas. Jenis sarana kios dan rumah makan merupakan jenis sarana perdagangan dengan persentase tertinggi yaitu 35,46 persen atau masing-masing sebanyak 650 kios, sedangkan fasilitas pasar umum di Kabupaten Lahat berjumlah 9 pasar.

4.7 FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG

4.7.1 Urusan Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Lahat menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat tahun 2016 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Adapun muatan laporan tersebut menjelaskan tentang arah kebijakan umum pemerintahan, pengelolaan keuangan secara makro termasuk pendapatan dan belanja

daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Elemen data yang dihimpun berasal dari seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Tim Penyusun, dan hasil penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah Kabupaten Lahat dilanjutkan dengan *self-asessment* oleh Tim Evaluasi Daerah dan Setelah dilakukan penyempurnaan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lahat untuk dilakukan pembahasan dan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna tentang Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah Kabupaten Lahat.

4.7.2 Urusan Pengawasan

Capaian tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) untuk Kabupaten Lahat pada tahun 2018 memperoleh nilai 64,1 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Lahat sudah menunjukkan hasil yang baik. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka capaian tahun 2018 adalah mengalami peningkatan. Pemerintah Kabupaten Lahat berharap dapat mempertahankan nilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban dengan baik atau predikat B.

4.7.3 Urusan Perencanaan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membantu pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJP) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Pada periode 2014-2018, Bappeda Kabupaten Lahat telah menyusun dokumen-dokumen perencanaan daerah yang meliputi RPJMD dan RKPD dengan tepat waktu dan melibatkan partisipasi seluruh pelaku pembangunan dan menampung aspirasi masyarakat mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, Bappeda Kabupaten Lahat akan menerapkan perencanaan berbasis *e_planning*.

4.7.4 Urusan Keuangan

Badan Keuangan Daerah merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan keuangan. Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1.917.046.551.222,32 atau 105% dari target pendapatan tahun anggaran 2018. Penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp112.549.070.975,37 atau 90,94% dari yang ditargetkan. Realisasi pendapatan transfer tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1.377.663.737.906,00 atau 106,20% dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 426.833.742.340,95 atau 105,47%. Sedangkan realisasi belanja pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1.834.893.019.295,00 atau 95,21% dari target belanja tahun anggaran 2018 yang terdiri dari realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.119.633.141.296,00 dan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 715.259.877.999,00.

Realisasi pembiayaan tahun anggaran 2018, yaitu penerimaan pembiayaan berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan penerimaan piutang daerah dan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal (investasi). Penerimaan pembiayaan pada tahun 2018 berasal dari SILPA sebesar Rp 1.942.278.544,69. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan

kelembagaan dan keuangan daerah ditandai dengan penerimaan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) bagi Kabupaten Lahat.

4.7.5 Urusan Kepegawaian

Aparatur Sipil Negara/ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat berdasarkan data tahun 2018 berjumlah 6.761 orang dengan komposisi Eselon II.B sebanyak 31 orang, Eselon III.A sebanyak 75 orang, Eselon III.B sebanyak 137 orang, Eselon IV. A sebanyak 720 orang, Eselon IV.B sebanyak 233 orang, Eselon V.A sebanyak 17 orang, Jabatan Fungsional tertentu Ahli dan Terampil sebanyak 3.548 orang dan Jabatan Fungsional Umum sebanyak 2000 orang.

Persentase ASN di lingkungan Pemkab Lahat berdasarkan golongan pada tahun 2018 meliputi golongan IV.C sebanyak 32 orang, golongan IV.B sebanyak 318 orang, golongan IV.A sebanyak 1.093 orang, golongan III.D sebanyak 1.219 orang, golongan III.C sebanyak 826 orang, golongan III.B sebanyak 1114 orang, golongan III.A sebanyak 936 orang, golongan II.D sebanyak 187 orang, golongan II.C sebanyak 561 orang, golongan II.B sebanyak 286 orang, golongan II.A sebanyak 139 orang, golongan I.D sebanyak 19 orang, golongan I.C sebanyak 18 orang, golongan I.B sebanyak 9 orang dan golongan I.A sebanyak 4 orang.

4.7.6 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat melaksanakan Urusan Penelitian dan Pengembangan melalui pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lahat. Badan ini merupakan pelaksana kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian (kelitbangan) di bidang pemerintahan, ekonomi dan keuangan serta pembangunan. Oleh karena itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah memberikan rekomendasi dan inovasi dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten

Lahat karena minimnya publikasi hasil penelitian terkait bidang pemerintahan, ekonomi dan keuangan, bidang pembangunan serta kemasyarakatan dan masih rendahnya kehadiran inovasi (produk, proses, organisasi, pasar dan perilaku) untuk percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kabupaten Lahat.

BAB V HASIL KEGIATAN

5.1 Sebaran Responden

5.1.1 Sebaran Responden Menurut Kecamatan

Tabel 5.1 Sebaran Responden Menurut Kecamatan

kecamatan	Jumlah Responden	Percent
Tj Sakti PUMU	15	3,9
Sukamerindu	6	1,6
Pulau Pinang	9	2,4
Pseksu	9	2,4
Pajar Bulan	15	3,9
Pagar Gunung	14	3,6
Mulak Ulu	8	2,0
Mulak Sebingkai	7	1,8
Muara Payang	10	2,6
Merapi Timur	24	6,3
Merapi Selatan	10	2,6
Merapi Barat	22	5,8
Lahat Selatan	11	2,8
Lahat	75	19,6
Kota Agung	15	3,9
Kikim Timur	20	5,2
Kikim Tengah	10	2,6
Kikim Selatan	17	4,4
Kikim Barat	20	5,2
Jarai	21	5,5
Gumay Ulu	6	1,6
Gumay Talang	12	3,1
Tj Sakti PUMI	17	4,6

Tj Tebat	10	2,6
Total	382	100,0

Berdasar tabel di atas diketahui bahwa sebaran responden menurut Kecamatan di Kabupaten Lahat, berdasar Teknik sampling yang digunakan dapat diambil simpulan telah memberikan gambaran secara representatif tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasar tabel tersebut diketahui responden berasal dari seluruh kecamatan di Kabupaten Lahat. Kegiatan ini telah selaras dengan jumlah penduduk yang tinggal di masing-masing kecamatan serta jumlah masyarakat yang menggunakan akses layanan yang dilihat dalam kegiatan ini.

Tabel 5.2 Nama kecamatan dan jumlah desa/kelurahan

No	Kecamatan Subdistrict	2016	2017	2018	2019	2020
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tanjung Sakti Pumi	18	18	18	18	18
2	Tanjung Sakti Pumu	14	14	14	14	14
3	Kota Agung	22	22	22	22	22
4	Mulak Ulu	26	16	16	16	16
5	Tanjung Tebat	14	14	14	14	14
6	Mulak Sebingkai	-	10	10	10	10
7	Pulau Pinang	14	10	10	10	10
8	Pagar Gunung	20	20	20	20	20
9	Gumay Ulu	10	10	10	10	10
10	Jarai	21	21	21	21	21
11	Pajar Bulan	20	20	20	20	20
12	Muara Payang	7	7	7	7	7
13	Sukamerindu	10	10	10	10	10
14	Kikim Barat	19	19	19	19	19
15	Kikim Timur	32	32	32	32	32
16	Kikim Selatan	17	18	18	18	18
17	Kikim Tengah	9	9	9	9	9

18	Lahat	35	29	29	29	29
19	Gumay Talang	15	15	15	15	15
20	Lahat Selatan	-	10	10	10	10
21	Pseksu	11	11	11	11	11
22	Merapi Barat	19	19	19	19	19
23	Merapi Timur	14	14	14	14	14
24	Merapi Selatan	9	9	9	9	9
	Kabupaten Lahat	367	377	377	377	377

Sumber. Lahat Dalam Angka, BPS Tahun 2021

Tabel 5.3 jumlah penduduk serta laju pertumbuhan menurut Kecamatan

Kecamatan	Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010–2020
(1)	(2)	(3)
Tanjung Sakti Pumi	16.820	1.09
Tanjung Sakti Pumu	14.520	0.89
Kota Agung	13.623	1.23
Mulak Ulu	12.572	1.05
Tanjung Tebat	8.820	1.28
Mulak Sebingkai	5.706	0.81
Pulau Pinang	9.867	2.17
Pagar Gunung	12.949	1.10
Gumay Ulu	5.583	1.09
Jarai	20.512	0.63
Pajar Bulan	12.853	1.03
Muara Payang	8.904	0.64
Sukamerindu	8.046	0.84
Kikim Barat	17.898	1.92
Kikim Timur	31.994	2.02
Kikim Selatan	17.340	1.54
Kikim Tengah	10.046	1.99
Lahat	107.506	0.95
Gumay Talang	12.938	2.72

Lahat Selatan	13.208	5.00
Pseksu	9.042	1.25
Merapi Barat	25.703	2.57
Merapi Timur	25.232	2.07
Merapi Selatan	8.389	1.32
Kabupaten Lahat	430.071	1.47
Hasil Registrasi	430.071	1.47
Hasil Proyeksi	412,957	0.87

Sumber. Lahat Dalam Angka, BPS Tahun 2021

Perbedaan kepadatan jumlah penduduk per kilometer, luas wilayah, serta jumlah desa/kelurahan tentu akan berpengaruh besar terhadap optimalisasi pelayanan sosial, ekonomi, maupun pemerintahan kepada masyarakat. Supaya semua fasilitas-fasilitas yang telah tersedia dapat dinikmati secara optimal dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat maka sangat perlu untuk memperhatikan dimana kecamatan – kecamatan yang menjadi pusat “pertumbuhan. Apabila suatu kecamatan memiliki kemampuan untuk menjadi pusat pertumbuhan tentu akan memberikan dampak positif bagi daerahnya bahkan lebih jauh berdampak bagi kecamatan-kecamatan lain yang ada di sekitarnya. Untuk dapat menjadi daerah pusat pertumbuhan tentu memiliki fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan yang memadai. Namun di samping itu, pengembangan potensi daerah dengan memperlihatkan komoditas-komoditas unggulan sangat perlu untuk dilakukan.

Berdasarkan data tersebut juga terlihat bahwa konsentrasi jumlah penduduk yang menyebar secara tidak merata. Hal ini dapat kita ketahui dengan mudah dengan melihat perbedaan rata-rata jumlah penduduk per kilometer di masing-masing kecamatan. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah oleh karena faktor luas wilayah kecamatan yang juga tidak merata. Perbedaan kepadatan jumlah penduduk per kilometer, luas wilayah, serta jumlah desa/kelurahan tentu akan berpengaruh besar terhadap optimalisasi pelayanan sosial, ekonomi, maupun pemerintahan kepada masyarakat. Supaya semua fasilitas-fasilitas yang telah

tersedia dapat dinikmati secara optimal dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat maka sangat perlu untuk memperhatikan dimana kecamatan – kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan. Apabila suatu kecamatan memiliki kemampuan untuk menjadi pusat pertumbuhan tentu akan memberikan dampak positif bagi daerahnya bahkan lebih jauh berdampak bagi kecamatan-kecamatan lain yang ada di sekitarnya. Untuk dapat menjadi daerah pusat pertumbuhan tentu memiliki fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan yang memadai.

Tabel 5.4 Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
(1)	(2)	(3)
Tanjung Sakti Pumi	3.91	62.07
Tanjung Sakti Pumu	3.38	63.24
Kota Agung	3.17	82.27
Mulak Ulu	2.92	115.95
Tanjung Tebat	2.05	106.62
Mulak Sebingkai	1.33	89.99
Pulau Pinang	2.29	88.36
Pagar Gunung	3.01	122.73
Gumay Ulu	1.30	64.17
Jarai	4.77	122.45
Pajar Bulan	2.99	87.97
Muara Payang	2.07	237.44
Sukamerindu	1.87	145.68
Kikim Barat	4.16	65.80
Kikim Timur	7.44	56.68
Kikim Selatan	4.03	138.94
Kikim Tengah	2.34	37.82
Lahat	25.00	999.13
Gumay Talang	3.01	51.83
Lahat Selatan	3.07	71.83
Pseksu	2.10	33.58
Merapi Barat	5.98	110.48

Merapi Timur	5.87	96.84
Merapi Selatan	1.95	41.92
Kabupaten Lahat	100.00	98.60
Hasil Registrasi	100.00	98.60
Hasil Proyeksi	100.00	94.67

Sumber. Lahat Dalam Angka, BPS Tahun 2021

5.1.2 Sebaran Responden Menurut Kelompok Umur

Tabel 5.5 Sebaran Responden Menurut Kelompok Umur

Usia	Frequency	Percent
< 20 Tahun	5	1,3
20 - 29 Tahun	80	20,9
30 - 39 Tahun	97	25,5
40 - 49 Tahun	98	25,6
> 50 Tahun	102	26,7
Total	382	100,0

Berdasar tabel di atas diketahui bahwa sebaran responden menurut kelompok usia di Kabupaten Lahat, berdasar Teknik sampling yang digunakan dapat diambil simpulan telah memberikan gambaran secara representatif tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasar tabel tersebut diketahui sebanyak 25,5% responden berusia 30-39 tahun, disusul 26,7% penduduk berusia 40-49 tahun, kemudian 20,9% penduduk berusia 20-29 tahun, lalu sebesar 17,4% penduduk berusia lebih dari 50 tahun, dan terakhir kelompok usia di bawah 20 tahun sebesar 1,3%. responden dalam kegiatan ini telah selaras dengan jumlah penduduk yang tinggal di masing-masing kecamatan serta jumlah masyarakat yang menggunakan akses layanan yang dilihat dalam kegiatan ini.

5.1.3 Sebaran Responden Menurut Jenis Kelamin

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasar tabel di atas diketahui bahwa sebaran responden menurut jenis kelamin di Kabupaten Lahat, berdasar Teknik sampling yang digunakan dapat diambil simpulan telah memberikan gambaran secara representatif tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasar tabel tersebut diketahui sebanyak 48,4% berjenis kelamin laki-laki sedangkan 51,6% diantaranya responden berjenis kelamin perempuan, responden dalam kegiatan ini telah selaras dengan jumlah penduduk yang tinggal di masing-masing kecamatan serta jumlah masyarakat yang menggunakan akses layanan yang dilihat dalam kegiatan ini. Sejalan dengan rasio jenis kelamin laki-laki terhadap perempuan di Kabupaten Lahat menurut kecamatan sebagai berikut:

Tabel 5.6 Rasio jenis kelamin menurut kecamatan,
laki-laki terhadap perempuan

Kecamatan (1)	Rasio Jenis Kelamin (2)
Tanjung Sakti Pumi	105.90
Tanjung Sakti Pumu	107.90
Kota Agung	107.86
Mulak Ulu	104.66
Tanjung Tebat	104.40
Mulak Sebingkai	109.24
Pulau Pinang	104.46

Pagar Gunung	107.28
Gumay Ulu	112.44
Jarai	105.30
Pajar Bulan	107.98
Muara Payang	110.15
Sukamerindu	104.73
Kikim Barat	104.01
Kikim Timur	104.77
Kikim Selatan	104.55
Kikim Tengah	102.58
Lahat	101.60
Gumay Talang	106.22
Lahat Selatan	104.11
Pseksu	106.39
Merapi Barat	104.07
Merapi Timur	107.45
Merapi Selatan	105.56
Kabupaten Lahat	104.74
Hasil Registrasi	104.74
Proyeksi	104.74

Potensi pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang umumnya terjadi di negara yang sedang berkembang akan meningkatkan jumlah tenaga kerja. Hal ini akan semakin memperberat persoalan kelangkaan modal karena untuk menampung pertumbuhan tenaga kerja yang terjadi pada setiap tahunnya maka perlu dilakukan investasi secara besar-besaran (Jhingan,1992: 26-27). Laju pertumbuhan penduduk yang beragam, dimana pertumbuhan penduduk yang cepat diiringi dengan tingkat pendapatan yang rendah dan nihilnya tingkat pemupukan modal merupakan kesulitan bagi negara berkembang. Output yang meningkat karena teknologi akan tertekan oleh pertumbuhan tersebut, akibatnya tidak ada perbaikan taraf hidup.

Pengangguran di kota membengkak seiring dengan urbanisasi dan meningkatnya pendidikan dan sektor industri yang

tidak berkembang seiring dengan pertumbuhan tenaga kerja. Navarrete (dalam Jhingan, 1992: 29) mengatakan: pengangguran dapat dilukiskan sebagai suatu keadaan, dimana pengalihan sejumlah tertentu faktor tenaga kerja ke bidang lain tidak akan mengurangi output keseluruhan sektor asal. Hal ini sama dengan mengatakan bahwa produktivitas marjinal unit-unit faktor tenaga kerja tempat asal mereka kerja adalah nol atau menduduki nol atau bahkan negatif. Ahli ekonomi berpendapat bahwa dengan berpenduduk padat pengangguran tersembunyi diperkirakan 25-30 persen dari tenaga kerja (di dalam pertanian). Dalam menentukan betapa penting arti pendidikan di masa pembangunan ekonomi, suatu negara tidak dapat mengaku dirinya maju, tanpa menyelenggarakan pendidikan di bidang peradaban industri (Cairncross dalam Jhingan, 1992: 70). Petani harus di bawah menuju perekonomian moneter dan tidak dibiarkan saja bergerak pada usaha tani pangan. Para pekerja harus dibiasakan bekerja pada jam kerja yang ditentukan di pabrik-pabrik untuk mendapat bayaran. Kota-kota harus tumbuh, begitu juga bank dan usaha bisnis. Hasil ilmu pengetahuan harus diterapkan di seluruh perekonomian, dimana harus muncul kelompok pemuda bisnis, administrasi dan politik, sebagai nyawa kehidupan bangsa yang dapat menjadi tumpuan dalam mempertahankan momentum pembangunan. Faktor manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi yang menekankan pada efisiensi. Para ahli ilmu ekonomi modern 32 menyebutkan pembentukan modal insani, yaitu proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seluruh penduduk negara yang bersangkutan. Dalam mengetahui perkembangan suatu wilayah dari aspek sosial, kemiskinan (poverty) merupakan indikator yang digunakan dalam menilai perkembangan suatu wilayah (Hill dan Williams, 1989: 195).

5.1.4 Sebaran Responden Menurut Suku

Tabel 5.7 Sebaran Responden Menurut Suku

Suku	Jumlah Responden	Prosentase
Lematang	89	23,3
Kikim	76	19,9
Pasemah	115	30,0
Lintang	4	1,0
Jawa	70	18,4
Sunda	4	1,0
Komerling	2	0,4
Lampung	2	0,6
Lainnya	21	5,5
Total	382	100,0

Berdasar tabel di atas diketahui bahwa sebaran responden menurut sebaran suku di Kabupaten Lahat, berdasar Teknik sampling yang digunakan dapat diambil simpulan telah memberikan gambaran secara representatif tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasar tabel tersebut diketahui sebanyak 30% dari suku Pasemah sekaligus yang paling banyak, sedangkan suku komering hanya 0,4% sekaligus menjadi yang berjumlah paling sedikit. responden dalam kegiatan ini telah selaras dengan jumlah penduduk yang tinggal di masing-masing kecamatan serta jumlah masyarakat yang menggunakan akses layanan yang dilihat dalam kegiatan ini. Lahat dikenal di Sumatera Selatan dengan 4 suku yang ada di sana sehingga disebut Lekipali.

Wilayah tempat tinggal orang Lahat sebagian besar bergunung-gunung dan berbukit-bukit. Di bagian barat dan selatan terdapat gugusan Pegunungan Bukit Barisan dengan puncaknya yang tertinggi Gunung Dempo (3.159 meter di atas permukaan laut). Di tanah yang relatif subur ini orang Lahat umumnya hidup dari bertani.

Kelompok-kelompok masyarakat yang masih tergolong ke dalam kelompok Lahat tersebut adalah orang Lematang, Kikim, Pasemah, dan Lintang, sehingga dulu mereka sering juga disebut kelompok Lekipali. Bahasa Lahat termasuk rumpun bahasa Melayu dengan dialek sendiri. Di antara kelompok-kelompok khusus yang disebut Lekipali tersebut juga berkembang dialek-dialek tersendiri yang berbeda satu sama lain. Dari perbedaan dialek tersebut mereka saling mengetahui asal lawan bicaranya.

Orang Lahat tersebar di beberapa kecamatan dan di sini mereka hidup berbaur dengan suku bangsa pendatang lainnya. Hal ini dimungkinkan, karena kota kabupatennya, yaitu Kota Lahat, merupakan daerah lintas provinsi di Sumatera Selatan. Selain itu, Kabupaten Lahat juga merupakan daerah penerima transmigrasi. Pada tahun 2021 penduduk Kabupaten ini berjumlah 430.071 jiwa. Di dalam jumlah tersebut sudah termasuk anggota suku bangsa pendatang lainnya. Penduduk pendatang yang terbanyak adalah suku bangsa Jawa, yang terutama tersebar di lokasi Transmigrasi Tanjung Air, Tebing Tinggi, Tanjung Ning, Pirsus Sungai Berau, dan Pirsus Senabing. Penduduk pendatang lainnya adalah orang Semendo yang berasal dari Kabupaten Muara Enim. Menurut cerita rakyat setempat, orang Semendo ini pada masa lampau merupakan keturunan orang Lahat yang merantau ke daerahnya yang sekarang. Di daerah kota Lahat juga banyak bermukim pendatang keturunan China.

Bahasa Lahat termasuk rumpun bahasa Melayu dengan dialek sendiri. Diantara kelompok-kelompok khusus yang disebut Lekipali tersebut juga berkembang dialek-dialek tersendiri yang berbeda satu sama lain. Dari perbedaan dialek tersebut mereka saling mengetahui asal lawan bicaranya. Di Kabupaten Lahat orang Lahat tersebar di beberapa kecamatan dan disini mereka hidup berbaur dengan suku bangsa pendatang lainnya. Hal ini dimungkinkan, antara lain karena kota kabupatennya yakni Kota Lahat, merupakan daerah lintas antar provinsi di Sumatera Selatan. Selain itu, Kabupaten Lahat juga merupakan daerah penerima transmigrasi. Penduduk pendatang yang terbanyak ialah suku

bangsa Jawa, yang terutama tersebar di lokasi Transmigrasi Tanjung Air, Tebing Tinggi, Tanjung Ning, Pirsus Sungai Berau dan Pirsus Senabing.

Prinsip keturunan orang Lahat bersifat patrilineal, artinya garis keturunan dihitung melalui kerabat laki-laki “pihak ayah”, sehubungan dengan prinsip keturunan ini dalam masyarakat dikenal sistem pewarisan gelar-gelar yang diturunkan juga melalui garis laki-laki. Pada masyarakat dusun Tanjung Payang yang termasuk salah satu dusun di kecamatan Kota Lahat orang-orang yang berasal dari keturunan laki-laki dari nenek moyang yang pertama kali membuka areal persawahan dan dusun disebut Jurai Tue.

Jurai Tue di dusun ini ada dua orang yakni yang berasal dari keturunan nenek moyang dari Demak dan keturunan dari Majapahit. Kedudukan Jurai Tue dalam masyarakat dipandang sangat tinggi. Setiap kali masyarakat hendak memulai usaha yang menyangkut persawahan, mereka harus meminta ijin kepada jurai tue terlebih dahulu.

Desa atau dusun di Lahat di pimpin oleh kepala desa “rie”, selain berbagai kepada pemerintahan, seorang rie sekaligus bertindak sebagai kepala adat di desanya. Dalam melaksanakan tugasnya ia dibantu oleh tua-tua dusun yakni orang yang dituakan dalam kampung. Untuk memimpin dan mengawasi soal-soal yang menyangkut keagamaan terdapat penghulu atau khatib. Khusus untuk mengatur soal persawahan masyarakat diangkat seorang Ketua Ataran yang bertugas mengawaso kegiatan masyarakat kampung dari masa penanaman, pemakaian air hingga panen.

Seperti halnya masyarakat modern, Masyarakat Adat Suku Lahat juga memiliki sistem pemerintahan yang menjalankan tradisi suku tersebut. Dusun-dusun orang Suku Lahat dipimpin oleh Rie sebagai kepala pemerintahan setempat. Rie juga sekaligus menjadi kepala adat. Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala adat, Rie dibantu oleh tua-tua, atau yang dianggap sesepuh (orang yang dituakan) di dusun tersebut. Lalu ada Penghulu atau disebut juga dengan Khatib. keduanya memiliki tugas memimpin hal-hal yang

terkait dengan ritual-ritual keagamaan atau adat. Ada juga yang bertugas khusus mengatur soal persawahan, mulai dari menanam, pemakaian air hingga saat masa panen tiba. Jabatan ini disebut sebagai Ketua Ataran.

Di samping mempunyai sejumlah megalitik (batu besar/monumen kuno) berusianya ribuan tahun, Kabupaten Lahat pun mempunyai sejumlah lokasi tinggal tradisional yang berusia ratusan tahun. Rumah yang dinamakan sebagai ghumah baghi atau lokasi tinggal baghi (rumah tua) berada di beberapa kecamatan. Dahulunya delapan kecamatan ini dikenal dengan nama Besemah Padang Libagh dan secara kultur adat istiadat sama dengan masyarakat Pagaralam yang dinamakan Besemah, yang dahulunya unsur dari Lahat.

Keberadaan lokasi tinggal baghi di delapan kecamatan ini tersebar di desa-desa laksana di Kecamatan Kota Agung, tampak ada di Desa Bangke, Mulak Ulu dan salah satunya ada di Desa Gramat. Beberapa rumah, kondisinya menyedihkan tergambar pada sebanyak bangunan. Sebagian lokasi tinggal yang rata rata usianya di atas ratusan tahun ini, tidak sedikit yang telah lapuk. Bahkan sejumlah diantaranya tak terurus dan terpinggirkan diantara rumah-rumah penduduk dengan desain yang lebih modern. Tak laksana rumah canggih saat ini, lokasi tinggal baghi makin terpinggirkan. Maklum saja, desainnya yang klasik tidak unik warga guna mencontohnya ketika membangun. Jika merenovasi, tanpa sadar kemurnian rumah itu hilang. Tak ayal, keberadaannya sekarang terancam punah dan bermukim jadi kenangan.

5.1.5 Sebaran Responden Menurut Pendidikan Terakhir

Tabel 5.8 Sebaran Responden Menurut Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan terakhir	Jumlah Responden	Prosentase Responden
1.	Tidak sekolah	11	2,8
2.	SD/Sederajat	96	25,2
3.	SLTP/Sederajat	92	24,0
4.	SLTA/Sederajat	151	39,6

5.	PT dan Sederajat	28	7,3
6.	Sekolah Nonformal (Ponpes dsb)	5	1,2
	Total	382	100,0

Berdasar tabel di atas diketahui bahwa sebaran responden menurut sebaran tingkat Pendidikan responden di Kabupaten Lahat, berdasar Teknik sampling yang digunakan dapat diambil simpulan telah memberikan gambaran secara representatif tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasar tabel tersebut diketahui sebanyak 47% berpendidikan SMA sederajat, kemudian peringkat kedua sebesar 26% berpendidikan SD/Sederajat, lalu 19% berpendidikan SMP/Sederajat, untuk pendidikan tinggi sebesar 7,2%, dan masyarakat yang tidak sekolah sebesar 0,8% sekaligus menjadi yang berjumlah paling sedikit. responden dalam kegiatan ini telah selaras dengan jumlah penduduk yang tinggal di masing-masing kecamatan serta jumlah masyarakat yang menggunakan akses layanan yang dilihat dalam kegiatan ini.

Tabel 5.9 tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan Educational Level	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Sampai dengan SD Up to Primary School	15	5	20
SMP/Sederajat General Vocational Junior High School	31	13	44
SMA/Sederajat General/Vocational Senior High School	592	466	1 058
Diploma I, II/Akta I, II Diploma I, II/Akta I, II	71	163	234
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda Diploma III/Akta III/Bachelor	98	577	675
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D University Graduates	1 531	2 521	4 052
Jumlah/Total	2 338	3 745	6 083

Sumber: BPS, Lahat dalam Angka

Angka partisipasi Pendidikan tersebut didukung dengan jumlah Lembaga

Tabel 5.10 sekolah yang ada di Kabupaten Lahat seperti pada table berikut:

No.	KECAMATAN	SD Sederajat			SMP Sederajat			SMA Sederajat			SMK			TOTAL
		N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	
	TOTAL	286	35	321	64	26	90	31	18	49	8	4	12	472
1	Kec. Kota Agung	13	0	13	5	1	6	1	0	1	0	0	0	20
2	Kec. Pulau Pinang	9	0	9	1	0	1	1	0	1	0	0	0	11
3	Kec. Jarai	10	2	12	1	1	2	1	1	2	1	0	1	17
4	Kec. Kikim Timur	27	5	32	6	3	9	3	1	4	0	1	1	46
5	Kec. Lahat	33	15	48	10	11	21	6	13	19	3	3	6	94

6	Kec. Mulak Ulu	10	2	12	2	0	2	1	0	1	1	0	1	16
7	Kec. Pajar Bulan	13	0	13	1	0	1	1	0	1	0	0	0	15
8	Kec. Kikim Selatan	14	1	15	4	0	4	2	0	2	0	0	0	21
9	Kec. Kikim Barat	17	2	19	4	2	6	1	1	2	0	0	0	27
10	Kec. Kikim Tengah	6	1	7	2	0	2	2	0	2	1	0	1	12
11	Kec. Tanjung Sakti Pumi	12	4	16	4	2	6	1	1	2	1	0	1	25
12	Kec. Tanjung Sakti Pumu	12	2	14	2	1	3	1	0	1	0	0	0	18
13	Kec. Merapi Barat	13	0	13	3	1	4	1	0	1	0	0	0	18
14	Kec. Pseksu	9	0	9	3	0	3	1	0	1	0	0	0	13
15	Kec. Gumay Talang	6	0	6	1	1	2	1	1	2	0	0	0	10
16	Kec. Pagar Gunung	16	0	16	2	1	3	1	0	1	0	0	0	20
17	Kec. Merapi Timur	16	1	17	2	1	3	2	0	2	1	0	1	23
18	Kec. Gumay Ulu	7	0	7	2	0	2	1	0	1	0	0	0	10
19	Kec. Merapi Selatan	5	0	5	1	0	1	1	0	1	0	0	0	7
20	Kec. Tanjung Tebat	11	0	11	2	0	2	1	0	1	0	0	0	14
21	Kec. Muara Payang	8	0	8	1	1	2	1	0	1	0	0	0	11
22	Kec. Sukamerindu	6	0	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	7
23	Kec. Mulak Sebingkai	5	0	5	2	0	2	0	0	0	0	0	0	7
24	Kec. Lahat Selatan	8	0	8	2	0	2	0	0	0	0	0	0	10

Sumber: Kemendikbud, 2021

Pembangunan ekonomi tidaklah mungkin tanpa pendidikan. Melalui pendidikan umum pemerintah dapat meningkatkan persediaan buruh efektif dan kapasitas produktif bangsa, serta lembaga latihan yang diperlukan untuk memberikan pengajaran kepada ahli mesin, montir listrik, tukang, perawat, guru, penyuluh pertanian dan lain-lain. Pendidikan tinggi dan lembaga penelitian didirikan untuk mencetak dan meningkatkan jumlah dokter, administrator, insinyur dan semua jenis personil terlatih. Program pendidikan pada usaha menjalin kesatuan bangsa pada umumnya, memanfaatkan energi rakyat dan membangun bangsa dan sumber daya manusia di seluruh negeri, investasi dalam mendidik massa

sama juga produktifnya. Galbraith (dalam Jhingan,1992: 550) berpendapat” Menolong petani dan pekerja dari kebutuhurufan mungkin merupakan suatu tujuan tersendiri, tetap juga merupakan langkah pertama yang sangat diperlukan bagi setiap bentuk kemajuan pertanian. Dipandang secara demikian, pendidikan menjadi suatu bentuk investasi yang sangat produktif”. Dalam melihat perkembangan suatu wilayah dari segi pendidikan, alternatif yang digunakan untuk mengukur perkembangan adalah rasio banyaknya 33 pelajar pada jenjang SLTP, yaitu banyaknya pelajar grup usia (13-15 tahun) sebagai indikator pendidikan(Hill dan Williams, 1985: 191-195).

5.1.6 Sebaran Responden Menurut Agama

Tabel Sebaran Responden Menurut Agama

No	Agama	Jumlah Responden	Prosentase Responden
1.	Islam	370	96,86
2.	Katolik	3	0,79
3.	Budha	4	1,05
4.	Khong Hu Chu	5	1,31
	Total	382	100,0

Berdasar tabel di atas diketahui bahwa sebaran responden menurut agama responden di Kabupaten Lahat, berdasar Teknik sampling yang digunakan dapat diambil simpulan telah memberikan gambaran secara representatif tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasar tabel tersebut diketahui sebanyak 96,86% beragama Islam, kemudian 1,05% beragama Budha, lalu 1,31% beragama Khong Hu CU, dan masyarakat yang beragama Katolik sebesar 0,7%. responden dalam kegiatan ini telah selaras dengan jumlah penduduk yang tinggal di masing-masing kecamatan serta jumlah masyarakat yang menggunakan akses layanan yang dilihat dalam kegiatan ini.

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tanjung Sakti Pumi	35 927	-	200	-	-

Tanjung Sakti Pumu	14 600	-	100	-	-
Kota Agung	13 669	-	-	-	-
Mulak Ulu	17 050	-	-	-	-
Tanjung Tebat	9 680	-	-	-	-
Mulak Sebingkai
Pulau Pinang	12 867	-	-	-	-
Pagar Gunung	12 426	-	-	-	-
Gumay Ulu	9 923	-	-	-	-
Jarai	22 870	-	-	-	-
Pajar Bulan	24 985	-	-	-	-
Muara Payang	8 763	-	-	-	-
Sukamerindu	8 062	-	-	-	-
Kikim Barat	17 794	326	183	6	4
Kikim Timur	31 485	100	301	-	-
Kikim Selatan	24 895	-	-	-	-
Kikim Tengah	15 500	95	-	-	-
Lahat	113 756	1 345	2 720	1 560	2 178
Gumay Talang	12 371	-	-	-	-
Lahat Selatan
Pseksu	9 531	-	-	-	-
Merapi Barat	25 800	70	-	-	-
Merapi Timur	21 192	218	-	6	-
Merapi Selatan	8 543	-	-	-	-
Kabupaten Lahat	471 689	2 154	3 504	1 572	2 182

Sumber: BPS, Lahat dalam Angka

Masyarakat Lahat kini paling banyak pemeluk Agama Islam, walaupun demikian sisa-sisa kepercayaan lama masih terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mereka sampai sekarang masih menjalankan berbagai upacara adat. Dalam menjalankan berbagai upacara mereka selalu menggunakan cara-cara Islam yang tercampur dengan kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus, misalnya menyediakan sesajen atau membacakan mantera-mantera tertentu.

Di antara upacara adat yang terpenting ialah yang berkaitan dengan pengerjaan sawah, yang disebut Sedekah Rame. Tujuannya ialah agar padi yang ditanam selalu dilindungi oleh Tuhan YME dan banyak hasilnya. Dalam upacara ini terdapat tahapan-tahapan penting yang harus dilakukan, diantaranya meminta ijin kepada Jurai Tue, mengadakan pertemuan antara rie dan tua-tua kampung memberikan sesajen berupa pembakaran kemenyan, pembacaan kisah puyang pertama yang membuka areal persawahan, pembacaan doa, makan bersama serta menyelenggarakan upacara mubuh babak, yakni mengeringkan dan membersihkan saluran air serta menangkap ikan.

5.1.7 Sebaran Responden Menurut Pekerjaan



Gambar 5.1 : Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasar Gambar di atas diketahui bahwa sebaran responden menurut pekerjaan responden di Kabupaten Lahat, berdasar Teknik sampling yang digunakan dapat diambil simpulan telah memberikan gambaran secara representatif tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasar tabel tersebut diketahui sebanyak 38,3% sebagai petani, kemudian peringkat terendah sebagai karyawan swasta. responden dalam kegiatan ini telah selaras dengan jumlah penduduk yang tinggal di masing-masing

kecamatan serta jumlah masyarakat yang menggunakan akses layanan yang dilihat dalam kegiatan ini.

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	29 919	13 365	43 284
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	34 854	8 564	43 418
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	1 048	0	1 048
Buruh/Karyawan/Pegawai	34 521	20 504	55 025
Pekerja bebas	15 547	6 622	22 169
Pekerja keluarga/tak dibayar	11 397	32 770	44 167
Jumlah/Total	127 286	81 825	209 111

Sumber: BPS, Lahat dalam Angka

Variabel perekonomian yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah diukur berdasarkan produktivitas, perubahan struktur ekonomi dan perubahan taraf hidup masyarakat yang akan mendorong terjadinya transformasi pada lapangan kerja, terutama perubahan mata pencaharian penduduk dari sektor primer, ke sektor sekunder dan tersier. Adanya peningkatan produksi komoditas wilayah tersebut mampu untuk meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat wilayah itu sendiri. Struktur ekonomi merupakan indikator perkembangan ekonomi suatu wilayah, dimana beralihnya mata pencaharian masyarakat suatu daerah dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Hal ini mencerminkan terjadinya perubahan struktur ekonomi yang secara langsung berpengaruh terhadap pendapatan keluarga dan pola konsumsi masyarakat, baik meningkat ataupun menurun.

Kabupaten Lahat sebagai daerah berbasis pertanian, lapangan kerja utama penduduknya adalah sektor primer (pertanian). Perkembangan perekonomian setiap kecamatan di Kabupaten Lahat diindikasikan dengan terjadinya transformasi bidang

pekerjaan dari primer ke sekunder dan sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat, antara lain terjadinya alih lapangan pekerjaan dari sektor primer ke sektor sekunder. Sebelum pemekaran wilayah, sebagian besar masyarakat (80%) bekerja pada sektor primer (pertanian), yaitu antara tahun 1990–1998, namun setelah tahun 2021 komposisi pekerja yang berada di kecamatan mengalami peralihan ke sektor sekunder. Hal ini terlihat dengan meningkatnya persentase pekerja sektor sekunder sebesar 50%. Pergeseran ini didorong oleh adanya peningkatan jumlah tenaga kerja yang ada di setiap kecamatan. Hal ini pula mencerminkan adanya peningkatan pada sektor pembangunan serta mencerminkan adanya peningkatan modal, terutama dari alokasi anggaran pembangunan infrastruktur.

Sebelum pemekaran wilayah kabupaten, hasil pertanian berupa beras relatif lebih besar, akan tetapi setelah pemekaran wilayah produksi hasil pertanian padi cenderung menurun. Pada akhirnya, hal tersebut mempengaruhi pendapatan dan tingkat konsumsi keluarga pada sebagian besar kecamatan, antara lain: Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Muara Pinang, Kecamatan Pendopo dan Ulu Musi. Adapun untuk kecamatan lainnya cenderung mendatar, yang berarti kesejahteraan akibat adanya faktor nonekonomi, seperti penambahan penduduk akan mendorong demand, sehingga harga pasar meningkat. Produksi kedua yang dominan di kecamatan dalam Kabupaten Lahat adalah produksi hasil perkebunan berupa biji kopi yang merupakan komoditas unggulan bagi Kabupaten Lahat. Dalam memenuhi permintaan pasar, biji kopi mempunyai harga yang cukup baik, sehingga hasil perdagangan kopi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi kecamatan di Kabupaten Lahat.

masyarakat Lahat mayoritas tetap sebagai petani sebagai penopang ekonomi masyarakat. Hal ini senada dengan analisis unsur kegiatan sosial ekonomi tidak pelak lagi sebagai faktor sangat penting didalam memacu proses pertumbuhan kota, karena banyak dari pesatnya pembangunan suatu daerah bertolak dari

jumlah dan intensitas kegiatan sosial ekonomi yang dimiliki daerah tersebut. Kegiatan sosial ekonomi secara fisik dapat dikenali melalui struktur penggunaan lahan. Setiap kawasan yang dicirikan oleh kegiatan sosial ekonomi relatif besar akan terlihat dari intensitas guna lahan yang tinggi. Pertumbuhan Kota Lahat yang diawali sekitar pusat kota, tampaknya tidak memiliki struktur yang jelas dari perkembangan kota, akibat kegiatan sosial-ekonomi kota selalu mengacu kepada konsep efisiensi ruang, yaitu memanfaatkan keuntungan dari kondisi ruang yang ada.

Kecenderungan berkonsentrasi (berkelompok) ini menunjukkan gejala yang akan terus berlangsung, hal tersebut terlihat dari adanya perembetan dan perluasan kegiatan ke daerah-daerah permukiman atau mengikuti jaringan jalan utama, sepanjang masih dapat diperoleh keuntungan aksesibilitas. Sebagai contoh, meluasnya kegiatan komersial di sepanjang jalan Jl. Mayor Ruslan, Jl. K.Komar, Jl. Pasar Bawah, Jl. Inspektur Yazid, Jl. Kaptein Zein Ali, Jl. Amir Hamzah, Jl. RE. Martadinata dan Jl. Prof. Asrul Salim. Apabila kegiatan komersial ini dibiarkan berkembang mengikuti kecenderungan, maka pada masa yang akan datang kondisinya sungguh mengkhawatirkan. Kekhawatiran ini dikarenakan pada suatu saat akan tercapai batas optimal (optimum size). Brian Goodall (1972) mendefinisikan batas optimal sebagai proses pertumbuhan yang stagnan dan tidak layak untuk kehidupan dan kegiatan ekonomi.

Perkembangan wilayah merupakan integral dari pertumbuhan ekonomi yang secara kontinu merupakan suatu faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah. Perkembangan ekonomi yang dapat diukur dan obyektif, adanya perluasan tenaga kerja, modal, serta volume perdagangan dan konsumsi, perkembangan ekonomi dapat dipergunakan untuk menggambarkan faktor-faktor penentu yang mendasari pertumbuhan ekonomi, seperti perubahan dalam teknik produksi, sikap masyarakat dan lembaga lembaga. (Jhingan, 1983). Kutnets (dalam Jhingan, 1983: 72-84) menunjukkan enam ciri pertumbuhan ekonomi modern yang muncul dalam analisis yang didasari pada

produk nasional dan komponennya, penduduk, tenaga kerja dan sebagainya: (1) Laju pertumbuhan penduduk dan produk perkapita; laju kenaikan perkapita yang tinggi diiringi dengan laju pertumbuhan penduduk; (2) Peningkatan produktivitas; pertumbuhan yang ditandai dengan semakin meningkatnya laju produk perkapita sebagai akibat adanya perbaikan kualitas; (3) Laju perubahan struktural yang tinggi; ditandai dengan peralihan dari kegiatan pertanian ke nonpertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produktif, dan peralihan dari perusahaan perorangan menjadi perusahaan berbadan hukum, serta perubahan status kerja buruh; (4) Urbanisasi: pertumbuhan yang ditandai dengan semakin banyaknya penduduk di negara maju yang pindah dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan; (5) Ekspansi negara maju; pertumbuhan ini ditandai dengan revolusi teknologi di bidang transportasi dan komunikasi; dan (6) Arus barang, modal, dan orang antarbangsa; pertumbuhan yang ditandai dengan peningkatan migran akibat mudahnya angkutan antarbenua.

Ekonomi Makro dalam Perkembangan Wilayah Ruang lingkup ekonomi makro meliputi tingkat harga secara umum (indeks harga), serta yang berkenaan dengan pendapatan nasional, investasi dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Perkembangan pembangunan yang terjadi digerakkan oleh adanya investasi (Syamsudin, Ahmad dan Marzuki, 2007: 1-4). Investasi sebagai pendayagunaan diartikan sumber daya hari ini untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Pertumbuhan investasi yang terjadi serta keuntungan yang berpengaruh secara luas merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah.

Ekonomi Mikro dalam Perkembangan Wilayah Perkembangan wilayah ekonomi mikro menitikberatkan secara individual pada pelaku ekonomi, rumah tangga, perusahaan dan faktor-faktor produksi; tenaga kerja dan modal sampai pada keseimbangan umum dan ekonomi kesejahteraan masyarakat yang terkait dengan mata rantai perkembangan ekonomi wilayah. Aktivitas perekonomian masyarakat pada sektor riil akan

meningkatkan pendapatan keluarga, terutama ekonomi basis (Ricardson dalam Tarigan, 2005: 55-56). Hal ini merupakan aktivitas ekonomi mikro yang dapat mempengaruhi perkembangan suatu wilayah.

5.1.8 Sebaran Responden Menurut Penghasilan Perbulan

Tabel 5.10 Sebaran Responden Menurut Penghasilan Perbulan

No	Penghasilan perbulan	Jumlah Responden	Prosentase Responden
1.	Tidak Berpenghasilan tetap	54	14,1
2.	<Rp.1.000.000	31	8,2
3.	Rp.1.000.000 - Rp.2.000.000	159	41,6
4.	Rp.2.000.000 - Rp.3.000.000	93	24,3
5.	> Rp.3.000.000	43	11,4
	Total	382	100,0

Berdasar tabel di atas diketahui bahwa sebaran responden menurut pendapatan responden di Kabupaten Lahat, berdasar Teknik sampling yang digunakan dapat diambil simpulan telah memberikan gambaran secara representatif tentang kondisi masyarakat di Kabupaten Lahat. Berdasar tabel tersebut diketahui sebanyak 41,6% berpenghasilan Rp. 1.000.000 – Rp 2.000.000. sedangkan 24,3% berpenghasilan Rp. 2.000.000 – Rp. 3.000.000. sebanyak 11,4% berpenghasilan lebih dari Rp. 3.000.000. serta sebanyak 8,2% berpenghasilan kurang dari Rp. 1.000.000. dan sebanyak 14,1% masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap. Data responden di atas bisa diselaraskan dengan tabel pengeluaran masyarakat di bawah ini.

Tabel 5.1 1 perkapita masyarakat di Kabupaten Lahat

Golongan Pengeluaran (Rp)	2019	2020
(1)	(2)	(3)
< 150 000	0.00	-
150 000–199 999	0.24	-
200 000–299 999	1.35	0.82

300 000–499 999	21.01	15.50
500 000–749 999	26.97	32.65
750 000–999 999	13.76	14.98
1 000 000–1 499 999	19.93	19.42
> 1 500 000	16.72	16.64
Jumlah/Total	100,00	100

Sumber: BPS, Lahat dalam Angka

5.2 Indeks Toleransi Antarumat Beragama

5.2.1 Indeks Persepsi Responden tentang Toleransi Antarumat Beragama

Persepsi tentang Toleransi

Persepsi adalah penilaian yang dalam hal ini terhadap kelompok agama lain, baik mengenai gambaran umumnya, masyarakatnya ataupun apa yang dilakukan oleh masyarakat agama lain bersangkutan. Konflik-konflik yang muncul antara pemeluk suatu agama dengan pemeluk agama lainnya bisa berasal dari adanya persepsi yang keliru atau pandangan jelek terhadap agama lain dan pemeluknya. Persepsi ini muncul setelah mereka melihat dan memberikan penilaian terhadap kelompok agama lain tersebut yang dianggapnya merugikan agama atau kelompok mereka. Dengan demikian pemahaman terhadap variabel ini menjadi penting mengingat hal ini akan memberikan gambaran kenapa hubungan sosial antarpemeluk agama memanas dan kenapa suatu konflik terjadi. Dalam tindakan sosial atau sikap yang muncul, persepsi atau penilaian biasanya mendahului tindakan tersebut. Dengan kata lain, persepsi biasanya mendorong lahirnya sikap atau bahkan tindakan. Persepsi terhadap pemeluk agama lain juga dipengaruhi oleh norma atau *world view* yang dimiliki oleh para pemeluk agama bersangkutan. Persepsi ini diukur dari sejumlah hal, antara lain: pemenuhan akhlak keberagamaan, pemenuhan kewajiban dalam hubungan antarumat beragama, penilaian terhadap keberagaman, penilaian terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemeluk agama yang berbeda, serta konflik yang berpeluang terjadi atau pernah dialami oleh responden dalam

interaksinya dengan pemeluk agama lain. Berdasarkan data yang diperoleh, diperoleh temuan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi positif terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan terkait dengan toleransi antarumat beragama. Hal ini tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel Persepsi Responden tentang Toleransi Antarumat Beragama

No	Variabel	Sangat Tidak Setuju	tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1	Bagi saya memeluk agama merupakan bagian dari hak asasi manusia	0	1,4	82,2	16,4
2	Bagi saya menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing merupakan bagian dari hak asasi manusia	0	1,4	81,5	17,1
3	Bagi saya setiap pemeluk agama wajib menjamin kebebasan pemeluk agama lainnya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing	0	1,4	81,3	17,4
4	Bagi saya setiap pemeluk agama wajib menjamin kebebasan pemeluk agama lainnya untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing	0	0	84,3	15,7
5	Bagi saya perbedaan agama merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat	0	0	85,5	14,5
6	Bagi saya agama yang saya anut mengajarkan saya untuk bersikap toleran atau menghargai agama lain	0	0	83,6	16,4
7	Bagi saya penyebaran agama kepada penganut agama lain tidak diperbolehkan	8	10	82	0
8	Saya berpendapat pemeluk agama yang baik tidak akan melakukan kekerasan secara fisik terhadap pemeluk agama lainnya	3,5	0	77,2	19,3
9	Saya berpendapat pemeluk agama yang baik tidak akan melakukan	3,5	0	78,9	17,5

	kekerasan secara verbal terhadap pemeluk agama lainnya				
10	Saya berpendapat kegiatan radikalisme (kekerasan) dilarang dalam agama yang saya anut	0	0	80,7	19,3
11	di lingkungan tempat tinggal saya pernah terjadi konflik antar umat bergama	45,6	12,7	39,2	2,5
12	Saya berpendapat konflik antar umat beragama disebabkan karena kepentingan politik	0	6,3	93,8	0
13	Saya berpendapat konflik antar umat beragama disebabkan karena kepentingan ekonomi	2,4	9,6	88	0
14	Saya berpendapat konflik antar umat beragama disebabkan karena egoisme masing-masing pemeluk agama	0	2,3	93,2	4,5
15	Saya berpendapat kerjasama antar umat beragama sudah terjalin dengan baik	0	0	90,6	9,4
16	Saya berpendapat para tokoh agama sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga kerukunan umat beragama	0	0	92,6	7,4
17	Saya berpendapat organisasi keagamaan sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga kerukunan umat beragama	0	0	94,4	5,6
18	Saya berpendapat pemerintah sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga kerukunan hidup umat beragama	0	0	94,4	5,6
	Rerata	3,50	2,51	83,52	10,48
	Responden	18	13	418	52
	Indeks Persepsi	3,80			

Dari jawaban di atas semua indikator direspon baik dan setuju oleh responden, termasuk ketidakadanya konflik antar agama di lingkungan tempat tinggal responden. Hal ini menjadikan indek untuk aspek ini masuk dalam kategori “baik”.

1. Indeks Sikap terhadap Toleransi

Sikap, yakni pendirian yang diperlihatkan oleh para pemeluk agama yang berupa respon terhadap pemeluk agama lainnya. Aspek ini akan menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh pemeluk agama sehubungan dengan hadirnya fakta sosial di hadapan mereka. Dalam penelitian ini, sikap mayoritas responden menunjukkan bahwa mereka relatif terbuka dalam berinteraksi sosial dengan umat yang berbeda agama. Hal ini tampak dari data berikut ini yang menggambarkan sikap responden dalam relasi sosial dengan umat beragama lain.

Tabel Sikap terhadap Toleransi

No	Variabel	Sangat Tidak Setuju	tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1	Saya bersedia bertetangga dengan pemeluk agama lain	0	0	89,8	10,2
2	Saya bersedia bergaul (menyapa, mengobrol dll) dengan pemeluk agama lain	0	0	89,8	10,2
3	Saya bersedia bersahabat dengan pemeluk agama lain	0	0	90,6	9,4
4	Saya bersedia menikah dengan pemeluk agama lain	48,4	29,5	22,1	0
5	Dalam melakukan hubungan sosial, saya tidak pernah membeda-bedakan seseorang berdasarkan agamanya	0	0	96,2	3,8
6	Saya tidak keberatan apabila pemeluk agama lain membangun tempat peribadatnya di lingkungan tempat tinggal saya	0	3,9	92,2	3,9
7	Saya tidak keberatan apabila pemeluk agama lain mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggal saya	0	1,9	96,3	1,9
8	Saya pernah berselisih paham dengan pemeluk agama lain	31,2	13	53,2	2,6
9	Saya bersedia untuk bermusyawarah/berdamai dengan	0	0	91,6	8,4

	pemeluk agama lain jika terjadi perselisihan.				
10	Saya berpendapat keberadaan ajaran-ajaran agama lain di luar yang sudah ditetapkan oleh negara meresahkan	4,9	2,5	92,6	0
	Rerata	8,45	5,08	81,44	5,04
	Responden	42	25	407	25
	Indeks Sikap toleransi	3,53			

Dari jawaban di atas semua indikator direspon baik dan setuju oleh responden, kecuali tentang kesediaan menikah beda agama yang direspon ketidaksetujuan responden. Hal ini menjadikan indeks untuk aspek ini masuk dalam kategori “baik”.

2. Indeks Kerjasama/Hubungan Sosial di antara Umat Beragama

Salah satu variabel yang digunakan untuk mengukur indeks kerukunan di Lahat adalah kerjasama antar umat beragama/hubungan sosial. Data pada tabel di bawah ini menunjukkan secara keseluruhan sub variabel yang diukur berada pada posisi baik dan sangat baik. Namun demikian, terdapat kecenderungan fluktuasi sikap dan perilaku pada subvariabel tertentu. Misalnya subvariabel bersedia mengundang pemeluk agama lain dalam kegiatan (misalnya kegiatan syukuran, pesta, dan lain sebagainya).

Kerjasama/Hubungan Sosial di antara Umat Beragama

No	Variabel	Sangat Tidak Setuju	tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1	Saya bersedia mengundang pemeluk agama lain dalam kegiatan (misalnya kegiatan syukuran, pesta, dan lain	0	2,2	91,4	6,5
2	sebagainya) yang saya lakukan	3,5	3,5	89,5	3,5
3	Saya bersedia menghadiri undangan dari pemeluk agama lain	2	13,9	78,2	5,9

4	Saya bersedia memberikan sumbangan kepada pemeluk agama lain yang memerlukannya	0	4,1	91,8	4,1
5	Saya bersedia melakukan hubungan kerja dengan pemeluk agama lain	0	0	92,4	7,6
6	Saya bersedia membantu pemeluk agama lain untuk membangun rumah ibadahnya	4,2	16,8	76,8	2,1
7	Saya bersedia terbuka (mengizinkan) kegiatan keagamaan lain	0	3,9	96,1	0
8	Saya bersedia mendengarkan saran dari tokoh agama lain	8,6	21,5	69,9	0
	Rerata	2,29	8,24	85,76	3,71
	Responden	11	41	429	19
	Indeks Kerjasama	3,64			

Dari jawaban di atas semua indikator direspon baik dan setuju oleh responden. Hal ini menjadikan indek untuk aspek ini masuk dalam kategori “baik”.

3. Indeks Sikap Pemerintah Dalam Hubungan Antarumat Beragama

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006, pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dengan demikian pemerintah memiliki peran strategis dalam memelihara toleransi dalam umat beragama. Sub bahasan ini membahas bagaimana peran pemerintah memelihara kerukunan antarumat beragama melalui 11 indikator. Adapun rekapitulasinya adalah sebagai berikut:

Sikap Pemerintah Dalam Hubungan Antarumat Beragama

No	Variabel	Sangat Tidak Setuju	tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1	Saya menilai Pemerintah memfasilitasi pembangunan sarana peribadatan dengan baik	0	0	98,1	1,9

2	Saya menilai Pemerintah melakukan sosialisasi mengenai aturan pendirian sarana peribadatan dengan baik	0	0	100	0
3	Saya menilai Pemerintah memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan dengan baik	0	0	100	0
4	Saya menilai Prosedur perizinan pembangunan tempat ibadat yang sekarang berlaku sudah menjamin hak yang sama bagi setiap agama untuk membangun rumah ibadatnya	0	0	100	0
5	Saya menilai Prosedur perizinan pembangunan tempat ibadat yang sekarang berlaku sudah diterapkan dengan konsisten bagi setiap agama	0	0	100	0
6	Saya menilai Pemerintah memfasilitasi dialog antar umat agama dengan baik	0	0	100	0
7	Saya menilai Pemerintah sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai agama	0	4,5	95,5	0
8	Saya menilai Pemerintah bersikap tegas dalam menyikapi kasus penistaan agama	0	0	97,9	2,1
9	Saya menilai Pemerintah bersikap tegas dalam menyikapi kasus kekerasan antar umat beragama	0	0	100	0
10	Saya menilai Pemerintah bersikap tegas dalam menyikapi kasus penyimpangan ajaran agama	0	0	100	0
11	Saya menilai Pemerintah melindungi kebebasan beribadah setiap pemeluk agama	0	0	95,8	4,2
	Rerata	0,00	0,41	98,85	0,75
	Responden	0	2	494	4

Dari jawaban di atas semua indikator direspon baik dan setuju oleh responden. Hal ini menjadikan indek untuk aspek ini masuk dalam kategori “baik”.

4. Indeks Harapan terhadap Pemerintah Dalam Hubungan Antarumat Beragama

Harapan terhadap Pemerintah Dalam Hubungan Antarumat Beragama

No	Variabel	Sangat Tidak Setuju	tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1	Menurut saya Pemerintah perlu memfasilitasi pembangunan sarana peribadatan	0	2,3	97,7	0
2	Menurut saya Pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai aturan pendirian sarana peribadatan	0	2,5	95,1	2,5
3	Menurut saya Pemerintah perlu memfasilitasi kegiatan-kegiatan keagamaan	0	2,4	95,2	2,4
4	Menurut saya Prosedur perizinan pembangunan tempat ibadat perlu menjamin hak yang sama bagi setiap agama untuk membangun rumah ibadatnya	0	2,5	95,1	2,5
5	Menurut saya Prosedur perizinan pembangunan tempat ibadat perlu diterapkan dengan konsisten bagi setiap agama	0	2,5	94,9	2,5
6	Menurut saya Pemerintah perlu memfasilitasi dialog antar umat agama	0	8,5	89	2,4
7	Menurut saya Pemerintah perlu mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai agama	0	2,5	95	2,5
8	Menurut saya Pemerintah perlu tegas dalam menyikapi kasus penistaan agama	0	2,5	95	2,5
9	Menurut saya Pemerintah perlu tegas dalam menyikapi kasus kekerasan antar umat beragama	0	2,5	95	2,5

10	Menurut saya Pemerintah perlu tegas dalam menyikapi kasus penyimpangan ajaran agama	0	2,5	95	2,5
11	Menurut saya Pemerintah perlu membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sampai tingkat RW	0	5,9	91,2	2,9
12	Menurut saya Pemerintah perlu memasukkan muatan kerukunan umat beragama dalam kurikulum di sekolah	1,3	5,1	91	2,6
	Rerata	0,11	3,48	94,10	2,32
	Responden	1	17	471	12
	Indeks Harapan Pemerintah		3,74		

Dari jawaban di atas semua indikator direspon baik dan setuju oleh responden. Hal ini menjadikan indek untuk aspek ini masuk dalam kategori “baik”. Secara umum, berdasarkan jawaban responden terdapat 3 kategori utama yaitu kategori jawaban yang berada memiliki frekuensi tertinggi dalam kategori setuju, netral dan tidak setuju yang akan dijelaskan

lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Jawaban memiliki frekuensi tertinggi dalam kategori setuju menunjukkan bahwa sikap pemerintah dinilai baik dalam memelihara hubungan antar umat beragama. Adapun beberapa sikap pemerintah yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 1. Pemerintah memfasilitasi pembangunan sarana peribadatan dengan baik (97,7%).
 2. Pemerintah memfasilitasi kegiatankegiatan keagamaan di Kabupaten Lahat Pemerintah dengan baik (95,1%)
 3. Pemerintah sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai agama (95,2%)
 4. Pemerintah bersikap tegas dalam menyikapi kasus penistaan agama (95%)
 5. Pemerintah bersikap tegas dalam menyikapi kasus kekerasan antar umat beragama (95%)

6. Pemerintah melindungi kebebasan beribadah setiap pemeluk agama (91%)
 7. Pemerintah bersikap tegas dalam menyikapi kasus penyimpangan ajaran agama (95%)
- b. Jawaban memiliki frekuensi tertinggi dalam kategori netral pada ketiga indikator di bawah ini:
1. Prosedur perizinan pembangunan tempat ibadah yang sekarang berlaku sudah menjamin hak yang sama bagi setiap agama untuk membangun rumah ibadatnya.
 2. Prosedur perizinan pembangunan tempat ibadah yang sekarang berlaku sudah diterapkan dengan konsisten bagi setiap agama.
 3. Pemerintah memfasilitasi dialog antar umat agama dengan baik. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 terdapat persyaratan administratif, persyaratan teknis dan persyaratan khusus yang harus ditempuh masyarakat dalam pendirian rumah beribadat. Responden menyatakan netral atas prosedur perizinan yang konsisten dan terjaminnya hak yang sama bagi setiap agama dalam membangun rumah ibadah pemerintah. Dalam perspektif ketatanegaraan, perizinan merupakan salah satu bentuk pengendalian dan merupakan pengecualian atas suatu larangan. Oleh karenanya prosedur yang ada harus konsisten diterapkan sehingga dapat menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara.
- c. Jawaban memiliki frekuensi tertinggi dalam kategori tidak setuju terdapat pada indikator kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah dinilai belum melakukan sosialisasi mengenai aturan pendirian sarana beribadatan dengan baik. Sosialisasi diperlukan dalam rangka menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat

beragama. Untuk itu dalam masa mendatang kegiatan sosialisasi ini perlu ditingkatkan.

5. Harapan Pemerintah dalam Hubungan Antarumat Beragama

Harapan Pemerintah dalam Hubungan Antarumat Beragama

No	Variabel	Sangat Tidak Setuju	tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1	Menurut saya Pemerintah perlu memelihara dan meningkatkan kerukunan umat beragama agar Lahat aman dan harmonis	0	3,5	91,9	4,7
2	Menurut saya Pemerintah perlu memperhatikan agama minoritas	0	6,6	93,4	0
3	Menurut saya Pemerintah perlu memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan FKUB	0	6,1	93,9	0
4	Menurut saya Pemerintah perlu sosialisasi keberadaan FKUB	0	6,1	93,9	0
5	Menurut saya Pemerintah perlu penjaminan hak-hak setiap penganut agama	0	4,8	95,2	0
6	Menurut saya Pemerintah harus mencegah dan meredam konflik antar umat beragama	0	5	92,5	2,5
7	Menurut saya Pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai pemahaman toleransi antarumat beragama	0	5,3	94,7	0
8	Menurut saya Pemerintah perlu membentuk layanan cepat seperti hotline untuk laporan konflik agama di Lahat	0	8,1	89,2	2,7
9	Menurut saya Lahat sudah ada rencana pembangunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	0	0	13,3	86,7
10	Menurut saya Lahat sudah ada Kebijakan diskriminatif pemerintah pada agama tertentu	5,3	10,5	84,2	0

11	Menurut saya Lahat sudah ada pernyataan dari pejabat kunci terkait peristiwa intoleransi	0	8,8	88,2	2,9
12	Menurut saya Lahat sudah ada tindakan nyata dari pejabat kunci terkait peristiwa intoleransi	0	8,3	88,9	2,8
13	Menurut saya Lahat sudah rendah adanya peristiwa intoleransi	0	5	87,5	7,5
14	Menurut saya Lahat sudah redah dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi.	0	5,1	89,7	5,1
15	Menurut saya Lahat sudah ada heterogenitas (keberagaman) keagamaan penduduk	0	4,7	89,5	5,8
16	Menurut saya Lahat sudah ada inklusi (keterbukaan) sosial keagamaan.	0	7,1	88,1	4,8
	Rerata	0,33	5,94	85,88	7,84

6. Perhitungan Indeks Toleransi

Indeks Toleransi Antarumat Beragama

No	Capaian Indeks	Skor	Kategori
1	Indeks Persepsi	3,80	Tinggi
2	Indeks Sikap	3,53	Tinggi
3	Indeks Kerjasama	3,64	Tinggi
4	Indeks Sikap Pemerintah	3,76	Tinggi
5	Indeks Harapan Terhadap Pemerintah	3,74	Tinggi
	Indeks toleransi	3,69	Tinggi

Rubrik Skor

Rentang Skor	Kategori
1 - 1.7	sangat rendah
1.8 - 2.5	rendah
2.6 - 3.3	cukup
3.4 - 4.1	tinggi
4.2 - 5	sangat tinggi

BAB VI PENUTUP

Proposal ini menjadi gambaran tentang langkah kerja yang akan dilakukan untuk melakukan kegiatan Adanya kegiatan kajian penguatan indeks harmoni dan toleransi sosial di Kabupaten Lahat tahun 2023. Hal ini penting dilakukan mengingat Kabupaten Lahat telah mengupayakan berbagai kebijakan yang sangat menjunjung tinggi nilai toleransi dan mengedepankan harmoni, sehingga mampu mewujudkan Lahat yang harmonis. Di samping itu, toleransi sebagai kebajikan juga diperkuat oleh kebijakan publik yang secara nyata mendorong dan membumikan toleransi. Hal ini karena potensi untuk menjadi zero-tolerance dan active tolerance sama-sama ada. Sehingga kegiatan ini penting dilakukan sehingga optimalisasi kegiatan yang bermuara pada penguatan harmoni dan toleransi di Lahat bisa semakin efektif.

Referensi

- Al Husin, Syahri. 2001. Aplikasi Statistik Praktis Dengan SPSS 9. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Azwar, Azrul. 1996. Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Bovaird, Tony and Loffler, Elke. 2003. Publik Management and Governance. New York: Routledge,
- Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif/kualitatif. Surabaya; Airlangga University Press
- Denhardt, Janet and Denhardt, Robert B. 2003. The New Publik Service: Serving, not Steering. New York: M.E. Sharpe.
- Islamy, M. Irfan. 2005. Teori Administrasi Publik. Malang: Universitas Brawijaya.
- Keraf, Gorys. 1997. Komposisi. Ende; Nusa Indah
- Kotler, Phillip. 2000. Marketing Management, The Millenium Edition. New Jersey: Prentice- Hall
- Lovelock, Christopher H. 1984. Sevices Marketing: Text, Cases, and Reading, . New Jersey: Prentice- Hall
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mudie, Peter and Angela Cottam. 1993. The Management and Marketing of Services, Butterworth-Heinemann Ltd, Oxford
- Marijan, Kacung. 2006. Demokratisasi di Daerah: Pelajaran Dari Pilkada Secara Langsung. Pustaka Eureka&PusDeHAM: Surabaya
- Robbins, Stephen P. 1994. Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi (Edisi 3) (Terj). Jakarta: Penerbit Arcan
- Sugiyono. 2003. Statistik untuk Penelitian. Alfabeta; Bandung
- Surbakti, Ramlan. 1998. Memahami Ilmu Politik. Grasindo, Jakarta
- Tjiptono, Fandy. 2000. Manajemen Jasa, Penerbit Andi , Yogyakarta
- W. Finifter, Ada. 1993. (ed) Political Science: The State of the dicipline II. American Political Science Association:Washington
- Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta ; Media Pressindo
- Zeithaml, Valarie A., A. Parasuraman, and Leonard L. Barry. 1988. "Communication and Control Processes in the Delivery of Service Quality", Journal of Marketing American Marketing Association, April.

